

## TESIS

# ANALISIS KOMPOSISI PENYALURAN DANA PADA BANK-BANK YANG TELAH GO PUBLIC SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PAKET FEBRUARI 1991



KK  
TE 122/46  
Sua  
a

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**DWI LUSI TYASING SWASTIKA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

**ANALISIS KOMPOSISI PENYALURAN DANA  
PADA BANK-BANK YANG TELAH GO PUBLIC  
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA  
PAKET FEBRUARI 1991**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Manajemen  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**DWI LUSI TYASING SWASTIKA  
NIM. 099311426 M**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 AGUSTUS 1996

oleh  
Pembimbing



Drs. Djoko Mursinto, M.Ec.  
NIP. 130935811

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Manajemen  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Prof. DR. H. Suroso Imam Zadjuli, SE  
NIP. 130355369

*Kupersembahkan untuk  
yang tercinta :  
Suamiku : Agus Ismail Junaidi  
Anakku : Amanda Egatya Talitha  
Aldwin Ryan Zakaria*

## **KATA PENGANTAR**

Segenap puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikan penulisan Tesis untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Pendidikan Pascasarjana /Strata-2, dalam bidang Ilmu Manajemen di Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun judul Tesis ini adalah **Analisis Komposisi Penyaluran Dana Pada Bank-Bank Yang Telah Go Public Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Paket Februari 1991**. Pada dasarnya penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis komposisi penyaluran dana bank sehubungan dengan adanya kebijakan permodalan yang berbentuk CAR, yang merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menanggung resiko kerugian yang mungkin timbul.

Selama penyelesaian penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta kerjasama semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Djoko Mursinto, M.Ec, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Suroso Imam Zadjuli, SE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

3. Rektor Universitas Airlangga beserta Direktur Program Pascasarjana, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Program Pascasarjana (S-2) di Universitas Airlangga Surabaya.
4. Ibu Dra. Dahniar, selaku Ketua STIE Malangkuwara Malang yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Program Pascasarjana (S-2) di Universitas Airlangga Surabaya.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Manajemen, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang sangat berguna terutama dalam penulisan Tesis ini.
6. Pimpinan dan Staf Bank Indonesia (BI) serta Bursa Efek Surabaya (BES) yang sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.
7. Semua rekan-rekan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, terutama Tini, Mbak Atik, Elok, Ana dan bapak Irhas.
8. Suami dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan dorongan serta doa demi suksesnya penulis dalam menempuh Pendidikan Pascasarjana.

Akhirnya, tak dapat dipungkiri bahwa hasil Tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran demi perbaikan sangat penulis harapkan. Sekalipun demikian, semoga Tesis ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Surabaya, 7 September 1996

Dwi Lusi Tyasing Swastika

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
RINGKASAN .....	xv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	17
2.2 Tinjauan Pustaka .....	20
2.2.1 Pengertian Bank .....	20
2.2.2 Jenis Bank .....	21
a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya .....	21
b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilik- kannya .....	22
2.2.3 Usaha Bank .....	22
2.2.4 Sumber dan Penggunaan Dana Bank ....	24
a. Sumber Dana Bank .....	24
b. Penggunaan Dana Bank .....	27
2.2.5 Modal Bank .....	32
a. Pengertian Modal Bank .....	32
b. Arti Penting Modal Bank .....	38
c. Fungsi Modal Bank .....	39
2.2.6 Capital Adequacy Ratio .....	40
2.2.7 Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum Bank .....	42

a.	Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal	42
b.	Cara Perhitungan Kebutuhan Modal	43
2.3	Hipotesis .....	46
2.4	Model Analisis .....	48
<b>3. METODOLOGI</b>		
3.1	Identifikasi Variabel .....	50
3.2	Definisi Operasional Variabel .....	50
3.3	Penentuan Sampel .....	56
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	60
3.5	Pengumpulan Data .....	60
3.6	Teknik Analisis Data .....	61
<b>4. GAMBARAN UMUM DEREGULASI PERBANKAN</b>		
4.1	Gambaran Singkat Deregulasi Perbankan di Indonesia .....	65
4.2	Strategi Perbankan dalam Menghadapi Keten-tuan CAR .....	69
<b>5. DISKRIPSI HASIL PENELITIAN</b>		
5.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	72
5.2	Capital Adequacy Ratio .....	88
5.3	Penyaluran Dana .....	90
5.3.1	Cadangan Primer .....	90
5.3.2	Cadangan Sekunder .....	92
5.3.3	Penyaluran Kredit .....	93
5.3.4	Investasi Jangka Panjang .....	94
5.3.5	Investasi dalam Aktiva Tetap dan In-ventaris .....	96
<b>6. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>		
6.1	Pembuktian Hipotesis .....	98
6.1.1	Pengujian Hipotesis Kesatu .....	99
6.1.2	Pengujian Hipotesis Kedua yang Ke-satu .....	100
6.1.3	Pengujian Hipotesis Kedua yang Ke-dua .....	101
6.1.4	Pengujian Hipotesis Kedua yang Ke-tiga .....	103
6.1.5	Pengujian Hipotesis Kedua yang Ke-empat .....	104
6.1.6	Pengujian Hipotesis Kedua yang Ke-lima .....	106
6.2	Pembahasan Hasil Penelitian .....	109
6.2.1	Hasil Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) .....	110
6.2.2	Hasil Perhitungan Penyaluran Dana ..	115
6.2.2.1	Cadangan Primer .....	116
6.2.2.2	Cadangan Sekunder .....	119



6.2.2.3	Penyaluran Kredit .....	122
6.2.2.4	Investasi Jangka Panjang ...	126
6.2.2.5	Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris .....	129
7. KESIMPULAN DAN SARAN		
7.1	Kesimpulan .....	133
7.2	Saran .....	136
DAFTAR PUSTAKA .....		138

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 : Posisi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) atau CAR dalam persen ..	9
Tabel 1.2 : Daftar Peringkat Bank-Bank yang telah Go Public Menurut Pembobotan Kinerja Berdasarkan Neraca per 31 Desember 1994 .....	10
Tabel 3.1 : Sebelas Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya antara Tahun 1989 sampai dengan 1990 .....	56
Tabel 3.2 : Rata-Rata CAR, Cadangan Primer, Cadangan Sekunder, Penyaluran Kredit, Investasi Jangka Panjang, serta Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91 ...	63
Tabel 5.1 : Sebagian Data Neraca Panin Bank untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	73
Tabel 5.2 : Sebagian Data Neraca Lippo Bank untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	75
Tabel 5.3 : Sebagian Data Neraca Bank Surya untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	76
Tabel 5.4 : Sebagian Data Neraca BII untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	78
Tabel 5.5 : Sebagian Data Neraca Bank Niaga untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	79
Tabel 5.6 : Sebagian Data Neraca Bank Danamon untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	81
Tabel 5.7 : Sebagian Data Neraca Bank Bali untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	82

Tabel 5.8 :	Sebagian Data Neraca Tamara Bank unt Periode yang Berakhir pada 31 Desem - ber 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	84
Tabel 5.9 :	Sebagian Data Neraca BDN I untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desem - ber 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	85
Tabel 5.10:	Sebagian Data Neraca Bank Duta untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desem - ber 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	86
Tabel 5.11:	Sebagian Data Neraca BUN untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desem - ber 1990-1994 (dalam ribuan rupiah) .	88
Tabel 5.12:	Hasil Perhitungan CAR Bank-Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya un - tuk Tahun 1990 sampai dengan 1994 (da prosentase) .....	89
Tabel 5.13:	Hasil Perhitungan Cadangan Primer Bank-Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya untuk tahun 1990 sampai de - ngan 1994 (dalam prosentase) .....	91
Tabel 5.14:	Hasil Perhitungan Cadangan Sekunder Bank-Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya untuk tahun 1990 sampai de - ngan 1994 (dalam prosentase) .....	92
Tabel 5.15:	Hasil Perhitungan Penyaluran Kredit Bank-Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya untuk tahun 1990 sampai de - ngan 1994 (dalam prosentase) .....	94
Tabel 5.16:	Hasil Perhitungan Investasi Jangka Panjang Bank-Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya untuk tahun 1990 sampai dengan 1994 (dalam prosentase)	95
Tabel 5.17:	Hasil Perhitungan Investasi dalam Ak tiva Tetap dan Inventaris Bank-Bank yang Go Public di Bursa Efek Suraba- ya untuk tahun 1990 sampai dengan 1994 (dalam prosentase) .....	96
Tabel 6.1 :	Pengujian Hipotesis CAR Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91 .....	99
Tabel 6.2 :	Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Cadangan Primer) Sebelum dan Sesu- dah Pakfeb'91 .....	100

<b>Tabel 6.3 : Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Cadangan Sekunder) Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91 .....</b>	<b>102</b>
<b>Tabel 6.4 : Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Penyaluran Kredit) Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91 .....</b>	<b>103</b>
<b>Tabel 6.5 : Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Inv. Jk. Panjang) Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91 .....</b>	<b>105</b>
<b>Tabel 6.6 : Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Inv. dlm AT &amp; Inventaris) Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91 .....</b>	<b>106</b>
<b>Tabel 6.7 : Rangkuman Pengujian Hipotesis ....</b>	<b>108</b>
<b>Tabel 6.8 : Daftar Peringkat Bank-Bank yang telah Go Public Menurut Pembobotan Kinerja Berdasarkan Neraca per 31 Desember 1995 .....</b>	<b>112</b>

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1 : Pool of Funds Approach .....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 2.2 : Conversion of Funds Approach .....</b>	<b>31</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 : Tabel Peringkat Rata-Rata CAR, Cadangan Primer, Cadangan Sekunder, Penyaluran Kredit, Investasi Jangka Panjang dan Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91 .....	142
Lampiran 2 : Tabel Rata-Rata CAR, Cadangan Primer, Cadangan Sekunder, Penyaluran Kredit, Investasi Jangka Panjang dan Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91 ..	145
Lampiran 3 : Print-out Program Microstat untuk CAR .....	148
Lampiran 4 : Print-out Program Microstat untuk Cadangan Primer .....	149
Lampiran 5 : Print-out Program Microstat untuk Cadangan Sekunder .....	150
Lampiran 6 : Print-out Program Microstat untuk Penyaluran Dana .....	151
Lampiran 7 : Print-out Program Microstat untuk Investasi Jangka Panjang .....	152
Lampiran 8 : Print-out Program Microstat untuk Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris .....	153
Lampiran 9 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank .....	154

## RINGKASAN

Penyaluran dana merupakan semua aktivitas bank yang berada di sisi Aktiva Neraca dan berkaitan dengan bagaimana bank menggunakan atau mengalokasikan kembali dana tersebut dengan berbagai alternatif untuk memaksimalkan laba. Komponen penyaluran dana ini terdiri dari cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang, serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris.

Paket kebijakan yang dikeluarkan BI pada tanggal 28 Februari 1991 (Pakfeb'91) berkaitan dengan masalah pemenuhan ketentuan minimum modal bank yang diwujudkan dalam bentuk CAR dan harus dapat dipenuhi secara bertahap, yaitu 5% sampai akhir Maret 1992, 7% sampai akhir Maret 1993 dan 8% sampai akhir Desember 1993. Pakfeb'91 berisi penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank yang bertujuan agar bank beroperasi dengan lebih hati-hati, berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran dananya.

Adapun masalah yang dibahas dalam Tesis ini adalah ada tidaknya perbedaan persentase CAR dan komponen penyaluran dana sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.

Dengan analisis yang menggunakan model Selisih Dua Rata-Rata dan dilanjutkan dengan uji  $t$ , diperoleh hasil bahwa besar persentase CAR sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 adalah tidak berbeda ( $t_0$  1,7540 <  $t_t$  2,23). Besar persentase cadangan primer sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 adalah berbeda ( $t_0$  2,7182 >  $t_t$  2,23). Besar persentase cadangan sekunder sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 adalah berbeda ( $t_0$  -4,8906 <  $t_t$  2,23). Besar persentase penyaluran kredit sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 adalah berbeda ( $t_0$  3,5489 >  $t_t$  2,23). Besar persentase investasi jangka panjang sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 adalah tidak berbeda ( $t_0$  1,1404 <  $t_t$  2,23). Dan besar persentase investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 adalah berbeda ( $t_0$  -2,8419 <  $t_t$  2,23).

## **BAB 1**

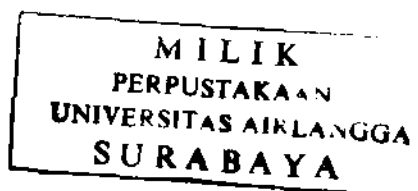
### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dunia perbankan Indonesia mengalami perubahan yang dramatis setelah dikeluarkannya paket-paket deregulasi dalam bidang keuangan oleh pemerintah. Hal ini telah memberikan sumbangan yang besar dalam menunjang pelaksanaan strategi dan kebijaksanaan pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter, dan pemerataan.

Para pelaku perbankan, baik di kelompok bank pemerintah, swasta nasional, bank pembangunan daerah maupun asing, dan bank campuran memiliki andil dan peranan yang tidak kecil dalam menunjang pembangunan dan kegiatan ekonomi selama ini. Kelompok bank pemerintah yang merupakan ujung tombak dan diharapkan berperan sebagai dinamisator, fasilitator, dan stabilisator pada awal-awalnya memiliki peranan yang sangat besar dengan dukungan dari Bank Sentral, namun sejak deregulasi dicanangkan pertama kali pada tahun 1983, terlebih lagi sejak tahun 1988, secara bertahap telah terjadi pergeseran yang berarti dalam fungsi dan perannya.

Deregulasi perbankan mempunyai makna yang dalam kehidupan perbankan tidak saja mengubah cara berpikir serta pola tindak, melainkan juga mengambil sikap dan keputusan yang dianggap sesuai dengan arah dan tujuan deregulasi. Secara material langkah deregulasi memang telah membuahkan





sikap efisien, kerja keras, bersikap profesional, menghargai waktu dan berpikir produktif. Dengan deregulasi pengelola bank berpacu untuk menaikkan kegiatan dan usaha mereka yang seringkali melampaui batas-batas kewajaran dan etika yang selama ini masih dipegang teguh.

Deregulasi perbankan pertama kali dicanangkan pada tanggal 1 Juni 1983 yang dikenal dengan istilah Pakjun '83. Paket ini memberikan kebebasan kepada bank-bank dalam mengatur tingkat bunganya, baik untuk pinjaman maupun deposito, sehingga bank dapat bersaing secara sehat guna memobilisasi dana melalui produk dan suku bunga yang ditawarkan tersebut. Selain itu pagu kredit dihapuskan yang mengakibatkan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dihapuskan secara bertahap yang menjadikan lingkungan perbankan lebih kompetitif, sehingga diharapkan tercapai efisiensi dan efektivitas kerja. Demikian pula dengan tugas Bank Sentral yang sebelumnya melakukan pembinaan secara langsung, kini lebih bersifat tidak langsung.

Kebijaksanaan susulan yang dikeluarkan pemerintah selanjutnya adalah paket deregulasi 27 Oktober 1988 atau Pakto '88. Kebijakan ini ditujukan untuk lebih memacu penerahan dana masyarakat dengan cara memberikan kemudahan dalam pendirian bank, kantor cabang dan pembantunya, mendorong ekspor non migas, efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, penurunan ketentuan *reserve*

*requirement* (cadangan wajib minimum) dari 15% menjadi 2%, kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan menciptakan iklim yang lebih baik untuk pengembangan pasar modal.

Dengan adanya Pakto 1988, terjadi peningkatan yang sangat menyolok dalam jumlah bank, terutama pada Bank Swasta Nasional dan Bank Perkreditan Rakyat. Perkembangan yang sangat pesat terjadi pada perluasan kantor bank dimana sejak 1988/1989 hingga 1993/1994 terdapat kenaikan sebanyak 517 kantor atau 65,11 %. Di samping itu, dunia pasar modal mulai dimasuki oleh perbankan yang pada sekitar tahun 1989 dan 1990 keadaan pasar modal sedang *booming*, sehingga dunia perbankan dapat melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat atau *go public*. Perkembangan pasar modal itu sendiri telah diatur oleh pemerintah melalui paket kebijakan 24 Desember 1987 (Pakdes '87) dengan menyederhanakan perijinan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan yang terjun mencari dana melalui pasar modal. Disusul kemudian dengan paket kebijakan 20 Desember 1988 yang semakin mendukung berkembangnya bursa efek di Indonesia dan mendukung pula dunia perbankan untuk ikut serta dalam bursa efek tersebut.

Sejak dikeluarkannya paket-paket deregulasi bidang perbankan tersebut, beberapa bank umum swasta nasional telah memanfaatkan kesempatan untuk *go public*. Dengan *go public* bank memperoleh tambahan modal yang di samping digunakan untuk mendukung perkembangan usahanya, juga untuk

mendukung kegiatan-kegiatan operasionalnya. Dengan demikian jumlah kredit yang disalurkan pihak perbankan diharapkan meningkat pesat. Hal ini mengakibatkan angka inflasi membumbung tinggi yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar, sehingga pada bulan Januari 1990 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat yang dikenal dengan istilah *Tight Money Policy (TMP)*. Adanya TMP ini menghambat aktivitas yang dilakukan para pengusaha dalam menyelesaikan proyek-proyeknya. Kredit bermasalah bermunculan yang akhirnya menjadi macet dan mengakibatkan pihak perbankan terpaksa menyediakan dana penghapusan kredit macet yang semakin besar. Keadaan ini merupakan akibat dari tingginya tingkat persaingan antar bank pasca Pakto '88 yang mengabaikan prinsip hati-hati dalam mengelola usahanya, sehingga pada waktu itu ada beberapa bank yang terpaksa dilikuiditir, sehingga sempat menurunkan kredibilitas perbankan.

Pemulihan kredibilitas perbankan dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan paket kebijaksanaan baru pada tanggal 27 Februari 1991 yang berisi penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank. Paket ini dikenal dengan sebutan Pakfeb '91 yang merupakan penyempurnaan dari Pakto 1988. Pakfeb '91 lebih banyak menekankan masalah pelaksanaan pengelolaan bank dengan menjalankan prinsip hati-hati (*prudential banking system*). Dengan ketentuan baru ini, para pemegang saham maupun para pengelola berusaha menjalankan usaha banknya secara hati-hati dan

konservatif. Bahkan seringkali banyak bank yang dinilai kelewat hati-hati, yang justru merugikan kepentingan dunia usaha dan kegiatan ekonomi nasional. Pola berpikir yang dianut tersebut berangkat dari kenyataan bahwa kepentingan banknya, terutama penjagaan tingkat kesehatannya lebih diutamakan ketimbang pengembangan kegiatan di luar banknya, yaitu baik lingkungan dunia usaha maupun kegiatan dan perkembangan ekonomi makro. Dengan prinsip dan pola berpikir tersebut, masyarakat perbankan berusaha menahan diri untuk melakukan ekspansi, memantau secermat mungkin komponen-komponen kegiatan usahanya agar jangan mengganggu penilaian tingkat kesehatannya. Kegiatan demikian dilakukan para pengelola secara rutin dan cermat, dan bahkan bank-bank pada umumnya telah membentuk unit-unit yang mempunyai tugas khusus untuk memantau perkembangan komponen-komponen penilaian kesehatan banknya (Rijanto, 1995:32).

Prinsip *prudential* yang digunakan perbankan kini adalah menggunakan indikator-indikator yang dinilai oleh Bank Indonesia untuk mengukur kesehatan suatu bank, seperti modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, likuiditas, atau yang disebut dengan CAMEL. *CAMEL rating system* merupakan penilaian tingkat kesehatan bank di Amerika Serikat yang dilakukan dengan cara menilai berbagai indikator keuangan, yang terdiri dari : (1) Capital adequacy, (2) Asset quality, (3) Management, (4) Earning, dan (5) Liquidity (Fraser and Fraser, 1990:12).

Sesuai dengan ketentuan Pakfeb 1991 yaitu mengenai syarat permodalan bank, pihak perbankan harus memenuhi kewajiban kecukupan modal bank yang ditunjukkan dengan angka Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai standar Bank for International Settlement (BIS) sebesar 5% pada akhir Maret 1992, 7% pada akhir Maret 1993, dan 8% pada akhir Desember 1993.

Adanya kebijaksanaan uang ketat dan Pakfeb '91, menyebabkan dunia perbankan di Indonesia membatasi pengeluaran kegiatannya dalam pertumbuhan aktiva dan berusaha memperbaiki struktur permodalannya. Bagi Bank Umum Swasta Nasional yang telah go public untuk memenuhi ketentuan tersebut tidak terlalu sulit karena dari hasil go public akan mendapat tambahan modal yang cukup besar sehingga mampu memperbaiki struktur permodalannya. Disamping itu dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 juga ikut menunjang perbaikan struktur permodalan bank, karena pada Undang-Undang tersebut tercantum ketentuan bahwa investor asing dapat memiliki saham bank nasional, meskipun pemilikan saham oleh pihak asing tersebut tidak boleh melebihi 49 % dari total emisi saham yang dilakukan pada saat penawaran umum saham bank-bank nasional tersebut. Jadi bagi Bank Umum Swasta Nasional yang telah go public masih terbuka kesempatan untuk menambah modalnya, dimana penambahan modal ini lebih banyak digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan bank dan membatasi pengeluaran untuk aktiva yang pada dasarnya sebagian besar

berupa pemberian kredit dan surat-surat berharga (yang mempunyai resiko tinggi) selain juga membatasi pengeluaran untuk aktiva tetap bank, hal ini mengakibatkan CAR bank akan meningkat, yang berarti resiko akan mengalami penurunan sehingga profitabilitas (Return on Equity) bank juga akan mengalami penurunan.

Menyimak permasalahan yang ada, ketentuan CAR memang suatu dilema bagi pihak perbankan. Di satu pihak CAR tersebut sangat diperlukan untuk menjamin kesehatan perbankan yang telah berkembang terlalu cepat, di pihak lain suplai modal yang terbatas akan menyebabkan aktivitas penyalur dana perbankan menjadi lamban, bahkan terhenti.

Permasalahan tersebut sampai akhir tahun 1991 masih mengganjal tidak saja dihadapi oleh bank-bank swasta, tetapi juga dihadapi oleh bank pemerintah, yaitu mengenai struktur permodalan yang masih lemah. Kondisi ini pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekspansi perbankan. Pada awal pelaksanaan Pakfeb 1991, diperkirakan terdapat sekitar 30% BUSN (Bank Umum Swasta Nasional) atau 32 Bank yang masih memiliki CAR di bawah 5% dan sekitar 14% atau 15 bank memiliki kurang dari 3%, sedangkan yang sudah mencapai 8% atau lebih terdapat 43 buah atau sekitar 40% dari seluruh BUSN. (Rijanto, 1992 : 15). Sedangkan bank pemerintah yang telah melebihi ketentuan CAR, hanya Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pada Pertemuan Tahunan Perbankan 1993, Gubernur Bank Indonesia mengemukakan bahwa sebagian besar bank telah memenuhi CAR 7%. Dari 217 bank yang telah beroperasi hingga Oktober 1992 tercatat hanya tinggal 6 bank yang belum memenuhi tingkat kecukupan modal atau CAR sebesar 5%. Sedangkan bank-bank yang belum memenuhi CAR 7% (batas waktu akhir Maret 1993), tinggal 18 bank lagi. Sisanya, atau dari keseluruhan bank tersebut tercatat 187 bank justru telah memenuhi CAR 8%. Padahal batas waktu pemenuhan CAR sebesar 8% itu masih cukup panjang, yaitu akhir Desember 1993. Berarti dapat disimpulkan sebagian besar bank pada akhir Maret 1993 sebagai batas akhir pemenuhan CAR 7%, tidak menemui ganjalan berarti seperti banyak dikeluhkan sebelumnya (Apep Suhendar, 1993:9).

Pada Tabel 1.1 diperlihatkan posisi kewajiban penyediaan modal minimum bagi semua bank yang beroperasi di Indonesia. Tampak bahwa sampai dengan batas akhir penentuan kecukupan modal minimum, yaitu akhir Desember 1993, seluruh bank baik itu bank pemerintah maupun bank swasta telah mampu memenuhinya, sehingga pihak perbankan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan perekonomian.

Tabel 1.1

Posisi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) atau CAR dalam persen

Kelompok Bank	Desember 1993	Desember 1994
Seluruh Bank Umum	9,96	12,50
Bank Pemerintah	9,57	10,50
BPD	12,12	11,40
BUSN Devisa	9,41	13,10
BUSN Non Devisa	9,37	15,50
Bank Campuran	16,46	21,80
Bank Asing	10,40	11,90

Sumber : Bank Indonesia

Sedangkan pada Tabel 1.2, tersusun daftar peringkat bank yang telah go public antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 menurut skor total kinerjanya yang didasarkan pada Neraca per 31 Desember 1994. Kinerja bank yang ditampilkan disini terdiri dari *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang menunjukkan besarnya kewajiban pemenuhan kebutuhan modal minimum bagi tiap bank (merupakan rasio antara modal dengan aset tertimbang menurut resiko (ATMR)), *Return on Risk Assets (RORA)* yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengoptimalkan aktivitya untuk menghasilkan laba (merupakan rasio antara laba sebelum pajak dengan aset beresiko, yaitu penjumlahan antara kredit yang diberikan dengan penempatan dana pada surat berharga) dan *Loan to Core Deposit Ratio (LCDR)* digunakan untuk mengukur besarnya jumlah kredit yang diberikan apabila dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun (giro, tabungan dan deposito). LCDR mirip dengan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*



sebelum cara perhitungannya diperingan, yaitu dengan memasukkan unsur modal ke dalam komponen pembagi (diatur dalam Pakmei 1993).

Tabel 1.2

Daftar Peringkat Bank-Bank Yang Telah Go Public  
Menurut Pembobotan Kinerja  
Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 1994

Peringkat	Nama Bank	CAR (%)	RORA (%)	LCDR (%)	Aset (Rp. Juta)
<b>ASBT DI ATAS RP. 5 TRILIUN</b>					
1	Bank Internasional Indonesia (BII)	7,78	2,41	111,38	9.414.192
2	Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)	9,98	2,16	109,74	8.936.897
3	Lippo Bank	6,34	1,73	88,84	6.883.148
4	Bank Danamon Indonesia	8,24	1,42	94,87	10.514.639
7	Bank Umum Nasional (BUN)	4,90	1,14	103,38	5.576.466
<b>ASBT RP. 1 - 5 TRILIUN</b>					
5	Bank Dula	14,51	1,54	89,78	2.444.928
7	Bank Bali	6,98	2,48	104,29	4.863.186
9	Pania Bank	9,47	2,65	99,86	3.446.585
14	Bank Niaga	5,58	1,52	103,21	4.939.235
16	Bank POPCI	13,27	2,12	336,73	1.302.418
23	Yamara Bank	7,42	1,44	111,89	1.515.888
<b>ASBT RP. 0,5 - 1 TRILIUN</b>					
14	Bank Surya	9,32	2,34	88,54	868.814
28	Inter-Pasifik Bank	12,48	2,69	273,68	687.655
36	Ficorinvest Bank	8,69	1,89	243,34	797.753

Sumber : Majalah Swa 2/XI/MRI/1995

Semakin tinggi CAR berarti kemampuan bank untuk menutup resiko jika terjadi "sesuatu" semakin besar. Selain itu bank berpotensi besar untuk berekspansi. Demikian pula

halnya dengan RORA, yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin optimalnya aktiva dalam menghasilkan keuntungan bagi bank. Tetapi, tidak demikian halnya dengan LCDR. Apabila terlalu rendah berarti banyak dana yang tidak dioptimalkan pemanfaatannya dalam bentuk penyaluran kredit dan sebaliknya, apabila terlalu tinggi menunjukkan ketergantungan yang besar pada dana beresiko tinggi (karena bunganya sangat fluktuatif) seperti call money, yang jika berkelanjutan bisa memungkinkan mismatch di bidang pendanaan. Besarnya LCDR yang bagus adalah yang nilainya berkisar antara 85% - 110%.

Kemampuan pemenuhan kecukupan modal minimum sebelum diberlakukannya Pakfeb 1991 dan sesudahnya, mempunyai perbedaan yang berarti bagi pihak BUSN yang telah go public dengan berusaha untuk menyesuaikan indikator dari CAR itu sendiri, yang berupa Modal dan ATMR. Tampaknya, pemenuhan kebutuhan akan modal (sumber dana) tidak menimbulkan permasalahan yang berarti, karena semua bank mempunyai cara tersendiri untuk menarik nasabah baru dengan kemudahan-kemudahannya. Misalnya memberikan hadiah cuma-cuma bagi penabung baru. Disamping itu dengan go public-nya BUSN permodalan dapat lebih diperkokoh. Sedangkan untuk ATMR yang berada di sisi aktiva Neraca dan merupakan penggunaan dana, cukup mempunyai masalah yang harus segera dipecahkan.

Sisi aktiva Neraca yang berisi cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit dan investasi jangka panjang, serta aktiva tetap dan inventaris, sangat

berpengaruh terhadap besarnya ATMR setiap bank. Penyaluran atau penggunaan dana dari sumber dana yang ada, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pihak perbankan harus memperhitungkan secara cermat parameter lain yang nantinya berpengaruh ataupun mempengaruhi aktiva Neraca. Misalnya, tingkat likuiditas, RORA dan LCDR-nya

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dibenarkan apabila diadakan penelitian guna penyusunan thesis dengan judul : "ANALISIS KOMPOSISI PENYALURAN DANA PADA BANK-BANK YANG TELAH GO PUBLIC SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PAKET KEBIJAKAN FEBRUARI 1991".

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah ada perbedaan persentase tingkat ketentuan kebutuhan modal minimum pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb 1991 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb 1991 ?
- b. 1) Apakah ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk cadangan primer pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb 1991 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb '91 ?
- 2) Apakah ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk cadangan sekunder pada bank-bank yang telah go



public sesudah diberlakukannya Pakfeb 1991 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 ?

- 3) Apakah ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk penyaluran kredit pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb 1991 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 ?
- 4) Apakah ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk investasi jangka panjang pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb 1991 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 ?
- 5) Apakah ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk investasi dalam aktiva tetap dan inventaris pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb 1991 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Ada tidaknya perbedaan persentase tingkat ketentuan kebutuhan modal minimum pada bank-bank yang telah go public sesudah dan sebelum diberlakukannya penetapan kebutuhan modal minimum sesuai dengan Pakfeb 1991.
- b. 1) Ada tidaknya perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk cadangan primer pada bank-bank yang telah go public sesudah dan sebelum diberlakukannya

penetapan kebutuhan modal minimum sesuai dengan Pakfeb 1991.

- 2) Ada tidaknya perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk cadangan sekunder pada bank-bank yang telah go public sesudah dan sebelum diberlakukannya penetapan kebutuhan modal minimum sesuai dengan Pakfeb 1991.
- 3) Ada tidaknya perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk penyaluran kredit pada bank-bank yang telah go public sesudah dan sebelum diberlakukannya penetapan kebutuhan modal minimum sesuai dengan Pakfeb 1991.
- 4) Ada tidaknya perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk investasi jangka panjang pada bank-bank yang telah go public sesudah dan sebelum diberlakukannya penetapan kebutuhan modal minimum sesuai dengan Pakfeb 1991.
- 5) Ada tidaknya perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk investasi dalam aktiva tetap dan inventaris pada bank-bank yang telah go public sesudah dan sebelum diberlakukannya penetapan kebutuhan modal minimum sesuai dengan Pakfeb 1991..

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dapat tercapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Dengan diberlakukannya deregulasi di bidang perbankan, terutama Pakfeb 1991, akan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kesehatan bank-bank yang telah go public serta bagaimana pihak perbankan tersebut mengantisipasi akan terjadinya kerugian yang mungkin timbul.
- b. Sumber dana perbankan yang merupakan permodalan dapat dialokasikan pada penggunaan yang tepat, sehingga dengan diberlakukannya ketentuan tentang kebutuhan modal minimum (CAR) dapat menjamin tingkat likuiditas dan rentabilitasnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian (tesis) ini dibagi ke dalam 7 (tujuh) bab, yaitu :

Bab 1 merupakan pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 merupakan tinjauan pustaka dan hipotesis, yang menguraikan tentang tinjauan penelitian terdahulu, tinjauan pustaka atas pengertian bank, jenis bank, usaha bank, sumber dan penggunaan dana bank, modal bank, capital adequacy ratio dan perhitungan kebutuhan modal minimum bank, serta diikuti dengan hipotesis penelitian dan model analisis.

Bab 3 merupakan metodologi, yang menguraikan tentang identifikasi variabel, definisi operasional variabel, pe-

mentuan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab 4 merupakan gambaran umum deregulasi perbankan, yang berisi tentang gambaran singkat deregulasi perbankan di Indonesia dan strategi perbankan dalam menghadapi ketentuan CAR.

Bab 5 merupakan diskripsi hasil penelitian, yang menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, capital adequacy ratio (CAR), penyaluran dana yang terdiri dari cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris.

Bab 6 merupakan analisis dan pembahasan, yang menguraikan tentang pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab 7 merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti terdahulu telah banyak melakukan penelitian dalam bidang perbankan, seperti yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian tersebut antara lain menyangkut penilaian tentang tingkat kesehatan bank, struktur modal bank serta sumber dan penggunaan dana bank. Tetapi, penelitian yang dilakukan disini bukan merupakan replikasi dari penelitian terdahulu.

Penelitian mengenai tingkat kesehatan bank dilakukan oleh Taufik Andriawan (1994), dengan judul : "Analisis Tingkat Likuiditas dan Profitabilitas Bank Umum Indonesia Pra dan Pasca Paket Februari 1991". Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hypothesis test for differences between means for paired samples-large samples, digunakan untuk menguji data yang berpasangan dan berkorelasi dari sampel-sampel besar, yaitu tingkat likuiditas dan profitabilitas bank pra dan pasca Pakfeb'91. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), dimana  $X_1$  adalah LDR rata-rata pra Pakfeb'91 (1989 - 1990) dan  $X_2$  adalah LDR rata-rata pasca Pakfeb'91 (1991 - 1992). Sedangkan variabel tidak bebas yang digunakan adalah tingkat profitabilitas



yang diukur dengan Return on Assets (ROA), dimana  $Y_1$  adalah ROA rata-rata pra Pakfeb'91 (1989 - 1990) dan  $Y_2$  adalah ROA rata-rata pasca Pakfeb'91 (1991 - 1992). Sebagai sampel digunakan 70 buah Bank Umum dari 140 buah yang tercatat di Bank Indonesia (BI), yang terdiri dari 4 buah Bank Pemerintah, 12 buah BUSN Devisa, 30 BUSN Non Devisa, 11 buah Bank Asing/Campuran dan 13 buah BPD. Hasil pengujian signifikansi perbedaan rata-rata likuiditas dan profitabilitas bank pra dan pasca Pakfeb'91 dengan menggunakan pengujian signifikansi satu arah (one tailed test of significant) yang taraf signifikansinya 5%, diperoleh hasil bahwa tingkat likuiditas bank umum Indonesia pasca Pakfeb'91 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tingkat likuiditas bank pra Pakfeb'91. Sedangkan tingkat profitabilitasnya menunjukkan keadaan yang sebaliknya, yaitu pasca Pakfeb'91 mengalami penurunan dibandingkan dengan pra Pakfeb'91.

Persamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan model analisis hypothesis test for differences between means for paired samples, tetapi untuk sampel kecil, yaitu khusus untuk bank-bank yang telah go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990. Selain itu, peneliti juga menggunakan keadaan sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91. Sedangkan hal-hal yang lainnya berbeda.

Penelitian yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana bank dilakukan oleh Lydia Ari Widyarini (1994),

dengan judul : "Analisis Portfolio Penyaluran Dana Bank-Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya Tahun 1990 - 1993". Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Linier Programming yaitu Goal Programming dengan ranking goal yang sama, untuk satu tujuan yaitu meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini kesemuanya merupakan variabel bebas yaitu portfolio penyaluran dana bank, yang terdiri dari surat berharga, penempatan dana pada bank-bank lain dan kredit ; dengan kendala peraturan pemerintah mengenai Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Sebagai sampel digunakan semua bank yang go public di Bursa Efek Surabaya (BES) antara tahun 1989 - 1990 yang memiliki aset antara 1 - 5 triliun rupiah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata profit yang diterima oleh bank-bank yang telah go public belum optimal karena dananya belum disalurkan dalam portfolio yang sesuai.

Persamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan obyek penelitian bank-bank yang telah go public di Bursa Efek Surabaya (BES) antara tahun 1989 - 1990. Sedangkan hal-hal yang lainnya berbeda.

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Pengertian Bank

Secara umum pengertian bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana. Dengan demikian fungsi bank mencakup tiga hal pokok, yaitu :

- "a. Sebagai pengumpul dana.
  - b. Sebagai penjamin kredit antara debitur dan kreditur.
  - c. Sebagai penanggung resiko interest rate transformasi dana, dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi."
- (Ruddy, 1994 : 1)

Sedangkan menurut UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan pasal 1, disebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari UU tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pokok bank adalah :

- a. Menghimpun dana dari pihak ketiga; dalam hal ini adalah masyarakat.
- b. Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit.
- c. Memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi tersebut, maka sifat usaha bank dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Sisi Pasiva, yaitu kegiatan melakukan penarikan dana dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya dengan berbagai instrumen utang.
- b. Sisi Aktiva, yaitu kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana terutama dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Sisi Jasa-jasa, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jasa-jasa dalam mekanisme pembayaran.

### 2.2.2 Jenis Bank

Di Indonesia, bank dibedakan menurut jenisnya yang berdasarkan fungsi dari bank itu sendiri dan kepemilikannya. Jenis bank dimaksud adalah sebagai berikut :

#### a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Jenis bank berdasarkan fungsinya, terdiri dari :

- "a) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia (BI) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 tahun 1968.
- b) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- d) Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegia-

tan tertentu, antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas dan pengembangan pembangunan perumahan." (Widjanarto, 1994 : 46)

#### b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya, terdiri dari :

- "a) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan UU.
- b) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan BI.
- c) Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
- d) Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik Pemerintah Daerah." (Widjanarto, 1994 : 47)

#### 2.2.3 Usaha Bank

Sesuai dengan Pasal 6, UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank, meliputi :

- "a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

- 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat termaksud.
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia.
  - 5) Obligasi.
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
  - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
  - f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
  - g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  - h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  - i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  - j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  - k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang di beli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  - l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
  - m) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
  - n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Widjanarto, 1994 : 52)

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas,

Bank Umum dapat pula (Pasal 7) :

- "a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.



- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku." (Widjanarto, 1994 : 54)

#### 2.2.4 Sumber dan Penggunaan Dana Bank

Sumber dan penggunaan dana bank tercermin dari Neraca bank. Semua kegiatan bank yang berada di sisi pasiva berkaitan dengan bagaimana bank menghimpun atau memobilisasi dana dari sumber-sumber dana yang ada dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di sisi aktiva. Sedangkan kegiatan bank yang berada di sisi aktiva berkaitan dengan bagaimana bank menggunakan atau mengalokasikan kembali dana tersebut dengan berbagai alternatif untuk memaksimalkan laba. Dapat pula dikatakan bahwa sisi pasiva bank mencerminkan sumber dana bank, sedangkan sisi aktiva-nya mencerminkan penggunaan dana bank itu sendiri.

##### a. Sumber Dana Bank

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki Bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari :

- "a) Dana dari Modal Sendiri (Dana Pihak ke I)  
Dana ini berasal dari para pemegang saham Bank, yaitu pemilik bank. Dana modal sendiri ini terdiri dari beberapa bagian (pos dari sisi pasiva Neraca), yaitu :
- 1) Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri.
  - 2) Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko di kemudian hari.
  - 3) Laba yang ditahan, yaitu laba yang semestinya milik para pemegang saham, tetapi tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.  
Biasanya laba ditahan ini digunakan untuk memperkuat posisi *cash reserve* atau untuk penambahan *loanable funds*." (Muchdarsyah Sinungan, 1993 : 85)
- "b) Dana Pinjaman dari Pihak Luar (Dana Pihak ke II)  
Dana ini berasal dari pihak yang memberikan pinjaman dana (uang) kepada bank, yang terdiri dari :
- 1) Pinjaman dari bank-bank lain, yang disebut *Call Money* yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam yang disebut juga dengan *overnight call money*.
  - 2) Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah atau jangka panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia (BI) yang secara tidak langsung selaku bank sentral, BI ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank bersangkutan.
  - 3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yang kadang-kadang tidak benar-



benar berbentuk pinjaman atau kredit, tetapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk *Sertifikat Bank* atau *Deposito on call* dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru.

- 4) Pinjaman dari Bank Sentral (BI) yang disebut dengan *Kredit Likuiditas*. Disini pihak BI akan membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas, seperti kredit investasi pada sektor pertanian, perhubungan, industri, ekspor non migas, koperasi, kredit untuk meningkatkan golongan ekonomi lemah, dan sebagainya. Kredit likuiditas merupakan instrumen moneter dari Bank Sentral dalam rangka *refinancing facility* demi memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi. Kredit ini merupakan sumber dana yang tergolong murah (*soft loan*), yaitu dengan *jangka waktu yang relatif lebih panjang dan dengan suku bunga yang rendah*, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 4 % per tahun." (Muchdarsyah Sinungan, 1993 : 86)

- "c) Dana dari Masyarakat (Dana Pihak ke III)  
Bank adalah pelayan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat, sehingga bank harus selalu berada ditengah-tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan.  
Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank, yaitu :
- 1) Giro (*Demand Deposits*), yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
  - 2) Deposito (*Time Deposits*) atau simpanan berjangka, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.
  - 3) Tabungan (*Saving*), yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu." (Muchdarsyah Sinungan, 1993 : 87)

Dana yang terhimpun selanjutnya diputar kembali untuk ditanam dan dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau oleh bank sendiri sebagai suatu penanaman dana baik yang menghasilkan (*earning assets*) atau yang tidak menghasilkan (*non earning assets*). Dalam memilih alternatif pemilihan dana tersebut, tentunya disamping memperhatikan segi hasilnya (keuntungan) juga harus memperhitungkan besarnya resiko.

#### b. Penggunaan Dana Bank

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

- a) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup.
- b) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (*safe*).

Dengan menggabungkan dua keinginan di atas, maka penggunaan dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan, semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Bilamana sumber dana tertera dalam pos-pos pasiva bank, maka penggunaan dana bank semuanya tertera dalam pos-pos aktiva bank. Sesuai dengan arti aktiva (*assets*), maka keseluruhan dana yang dialokasikan oleh bank,

berarti menjadi kekayaan atau harta benda milik bank itu sendiri. Walaupun pada mulanya berasal dari keuangan pihak-pihak lain di luar bank, akan tetapi karena tujuan *profitability dan safety* berjalan secara simultan, artinya serentak dilakukan bersama-sama, maka pengelolaan penempatan dana-dana tersebut agar supaya *idle* (tidak produktif) harus pada ruang gerak aktivitas yang masih dapat dijangkau oleh daya kerja bank serta kelaziman dalam *line of business* bank tersebut.

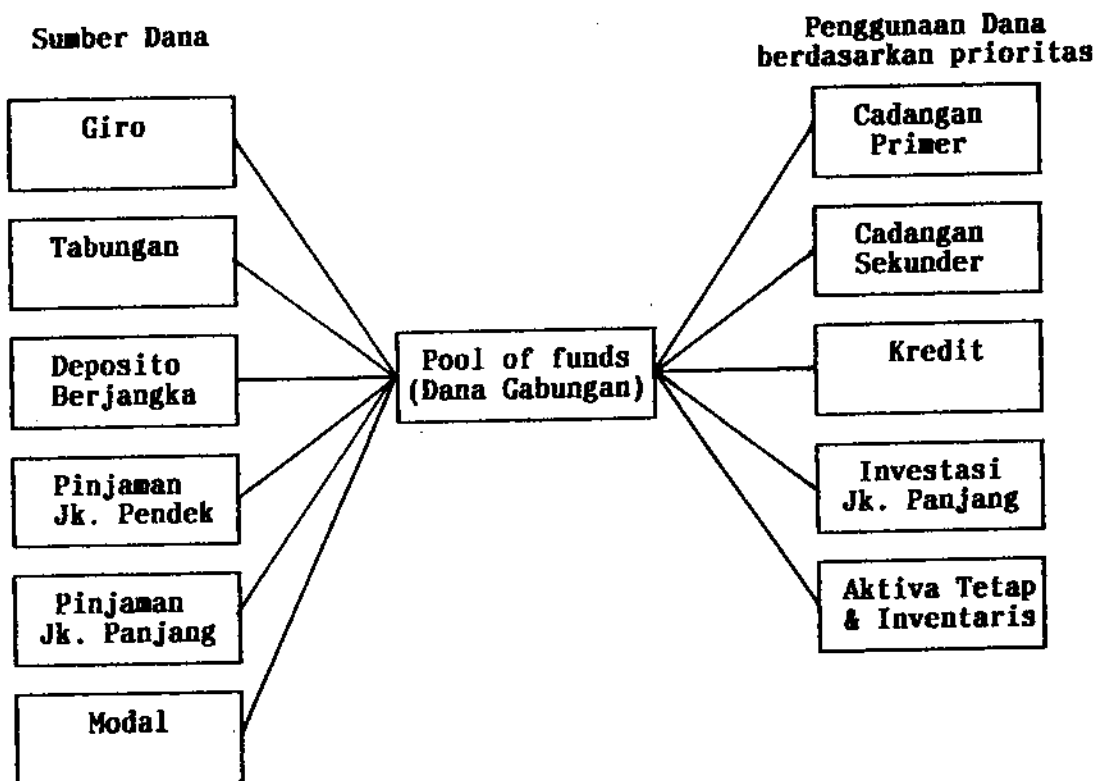
Penggunaan dana bank, pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu :

- "a) Non earning assets (aktiva yang tidak menghasilkan), terdiri dari :
- 1) Primary Reserve yang berbentuk uang tunai dalam kas dan uang tunai dalam saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam primary reserve ini digunakan untuk kepentingan penjagaan posisi likuiditas bank berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral (dalam bentuk cash ratio).
  - 2) Penanaman dana dalam Aktiva Tetap dan Inventaris, adalah untuk kepentingan kelancaran usaha bank, seperti gedung kantor, peralatan kantor, yang semuanya untuk menjaga standing bank dalam konstelasi perekonomian dan perbankan. Dana ini umumnya berasal dari Cadangan dan Modal Bank.
- b) Earning assets (aktiva yang menghasilkan), terdiri dari :
- 1) Secondary Reserve, untuk menyangga likuiditas dan sekaligus tujuan profit.
  - 2) Kredit (pinjaman yang diberikan) yang merupakan tugas utama bank.
  - 3) Investasi dalam jangka panjang, misalnya wesel, cek atau tagihan, surat berharga, surat berharga pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia." (Muchdarsyah Sinungan, 1993 : 92)

Penghimpunan dana dan pengalokasiannya, digunakan dua teori, yaitu :

- a) Pool of funds approach, dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya.
- b) Conversion of funds approach atau Assets allocation approach, yaitu penempatan dana-dana ke dalam aktiva.

Di bawah ini digambarkan dua teori yang berhubungan dengan sumber dan penggunaan dana bank.



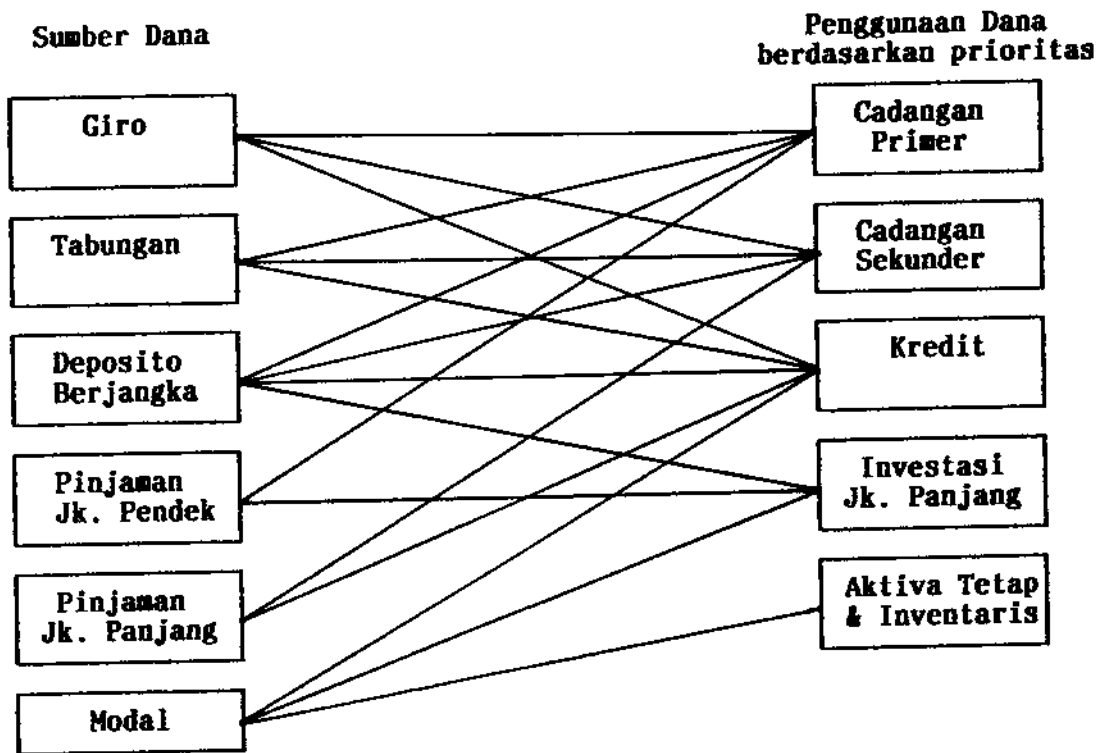
Gambar 2.1

Pool of Funds Approach

Sumber : Dahlan Siamat, 1993 : 137

### Kelebihan dan Kelemahan dari Pool of Funds Approach

- a) Kelebihan pendekatan ini adalah :
- 1) Penghitungan biaya dana relatif sederhana.
  - 2) Pengelolaannya tidak kompleks.
- b) Kelemahan pendekatan ini adalah :
- 1) Tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas.
  - 2) Tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro, deposito, tabungan dan sumber lainnya.
  - 3) Mengabaikan likuiditas yang berasal dari port-folio kredit melalui pembayaran cicilan dan bunga secara terus menerus.
  - 4) Memperkecil peranan cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas.
  - 5) Mengaburkan kenyataan mengenai kemampuan bank untuk memperoleh laba dari operasinya.
  - 6) Mengabaikan peran interaksi aktiva dan pasiva dalam penyediaan likuiditas secara musiman.



Gambar 2.2

## Conversion of Funds Approach

Sumber : Dahlan Siamat, 1993 : 141

## Kelebihan dan Kelemahan Conversion of Funds Approach

a) Kelebihan dari pendekatan ini adalah :

- 1) Mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas.
- 2) Menjadikan jumlah rata-rata cadangan likuiditas yang dimiliki bank mengalami penurunan, sehingga
- 3) Pengalokasian dana dapat dialihkan lebih besar pada penyaluran kredit dan atau penanaman dalam

surat-surat berharga yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi.

b) Kelemahan dari pendekatan ini adalah :

- 1) Keputusan mengenai jumlah likuiditas dilakukan berdasarkan perkiraan atas perputaran simpanan. Akibatnya keuntungan dapat berkurang karena dapat saja terjadi kelebihan perkiraan kebutuhan likuiditas.
- 2) Memperlakukan portfolio kredit sama sekali tidak likuid dan karenanya tidak menganggap kredit sebagai sumber likuiditas potensial.
- 3) Menganggap bahwa keputusan mengenai manajemen aktiva-pasiva dibuat secara independen.

Dua teori tentang pengalokasian dana tersebut di atas, digunakan oleh bank sesuai dengan tujuannya. Dalam penelitian ini, hanya digunakan pengalokasian menurut teori yang kedua, yaitu conversion of funds approach.

### 2.2.5 Modal Bank

#### a. Pengertian Modal Bank

Pengertian antara modal bank dengan modal perusahaan mempunyai kaitan yang hampir sama. Seperti pernyataan berikut ini :

"..... bank capital is much like capital provided for any business in that it provides an incentive

and protection. As we have seen, a bank need capital to continue operating. In this respect, a bank is no different from any other corporation. Funds invested or reinvested by the owners will earn profits if the business is successfull. They will be lost in this event of failure. Thus, capital encourages competent management at the same time that it protect creditors." (Kamerschen, 1988 : 116)

Menurut ketentuan Bank Indonesia (BI), pengertian modal bank dapat dibedakan antara bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia.

Pengertian modal bank seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a) Modal Bank yang Didirikan dan Berkantor Pusat di Indonesia.

Modal bank disini terdiri atas modal inti (primary capital) dan modal pelengkap (secondary capital).

"1) Modal Inti

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut :

- (a) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- (b) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- (c) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau



- rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing.
- (d) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
  - (e) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
  - (f) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
  - (g) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal laba tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
  - (h) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank." (Dahlan Siamat, 1993 : 80)

Apabila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti tersebut pada angka 1) s/d 8) harus dikurangi dengan jumlah *goodwill* tersebut.

## "2) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

- (a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.
- (b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba-rugi yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25 % dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.
- (c) Modal kuasi yang menurut BIS disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang yang mempunyai ciri-ciri :
  - (1) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (subordinated) dan telah dibayar penuh.
  - (2) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia,
  - (3) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi, dan
  - (4) pembayaran bunga dapat ditanggungkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari modal disetor oleh pemilik bank yang belum didukung modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.

- (d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- (1) ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman,
  - (2) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh,
  - (3) minimal berjangka waktu 5 tahun,
  - (4) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat, dan hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata). Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah sebesar 50 % dari modal inti.

Seluruh modal pelengkap tersebut pada angka 1) s/d 4) hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100 % dari jumlah modal inti." (Dahlan Siamat, 1993 : 83)

#### b) Modal Kantor Cabang Bank Asing

Modal disini adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia (*net head office funds*), yang merupakan selisih antara saldo

penanaman kantor pusat dan atau kantor cabangnya di luar Indonesia pada kantor cabangnya di Indonesia (pasiva) dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan atau kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia (aktiva).

Komponen-komponen *net head office funds* adalah :

"1) Komponen pasiva

Komponen pasiva ini terdiri dari :

- (a) Dana yang ditanamkan oleh kantor pusat atau kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia dalam segala bentuk penempatan di kantor cabangnya di Indonesia.
- (b) Cadangan yang dibentuk oleh kantor cabang di Indonesia baik berupa cadangan modal, cadangan umum, cadangan tujuan dan cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan.
- (c) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.
- (d) Laba yang ditahan, yaitu laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia.
- (e) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh kantor pusat. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal.
- (f) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal

pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal.

2) Komponen aktiva

Dana yang ditanam oleh kantor cabang dalam segala bentuk penempatan pada kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia." (Dahlan Siamat, 1993 : 84)

**b. Arti Penting Modal Bank**

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagaimana layaknya badan usaha, maka modal bank harus dapat juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya resiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya berasal dari sebagian besar dana pihak ketiga atau masyarakat.

Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba di satu pihak, sedangkan di pihak lain memungkinkan timbulnya resiko. Modal yang terlalu besar akan dapat mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh, sedangkan apabila terlalu kecil di samping akan membatasi kemampuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian

khususnya para deposan, debitur dan pemegang saham bank.

Arti penting lainnya dari modal bank, adalah :

"..... capital serves, at the minimum, the following purpose :

- 1) Maintaining public confidence in individual bank and in the commercial banking system.
- 2) Serving as a cushion against losses, thereby enabling a bank to function during periods of loss or negligible earnings.
- 3) Assuring that risks in commercial banking are appropriately distributed between the private and public sectors.
- 4) Providing protection to uninsured depositors, unsecured creditors, and public sectors interests in cases of insolvency.
- 5) Providing a foundation to support and discipline growth.
- 6) Providing funds for the acquisition of property necessary for banking operations". (Walker, 1992 : 226)

### c. Fungsi Modal Bank

Fungsi utama dari modal bank adalah fungsi operasional, fungsi perlindungan dan fungsi pengaturan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- "1) Untuk melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan likuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya.
- 3) Memenuhi ketentuan permodalan minimum yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki resiko yang tidak dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti.
- 4) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian." (Dahlan S., 1993 : 63)

Sedangkan fungsi modal bank lainnya, dikemukakan sebagai berikut :

"Function of capital are :

- 1) Supports volume and character of bank's operation. Level of capital increases confidence in bank, especially when borrowing or raising new capital.
- 2) Absorbs losses and the unexpected. Depositors are not mean to assume risk; capital should be sufficient to absorb shrinkage in assets value and other losses. Earning can absorb losses, but not for an unlimited time.
- 3) Protection to uninsured depositor and debt holders in the even of liquidation. Debt issues have been playing a bigger and bigger part vis-a-vis a bank's financial condition." (Rayback, 1988 : 253)

### 2.2.6 Capital Adequacy Ratio

Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) menunjukkan bahwa pergerakan dan pergeseran pasiva ke arah aktiva akan menimbulkan berbagai resiko, sejalan dengan semakin kompleksnya struktur dan aktivitas keuangan dan perekonomian masyarakat. Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil atau pencipta keuntungan justru harus memperhatikan dengan seksama kepentingan pihak-pihak yang menjadi asalnya, yaitu pihak ketiga yang menyimpan uangnya di bank, pemberi pinjaman dan para pemegang saham yang memasok modal bank. Oleh karena itu bank harus menopang dengan tegar dalam permainan bisnis perbankan internasional.

Seperti disebutkan diatas, bahwa salah satu fungsi modal adalah untuk memenuhi ketentuan minimum modal bank

yang ditetapkan oleh penguasa moneter yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh Bank Sentral.

Kecukupan modal atau jumlah modal minimum yang dapat disediakan oleh pihak perbankan, diperlihatkan pada definisi kecukupan modal bank itu sendiri.

"Adequacy capital provides the confidence necessary to keep a bank open so that it can absorb losses out of future earnings than out of capital funds". (Hempel et.al., 1990 : 273)

"Capital adequacy was the performance dimension mentioned first because it is the heart of the bank examination process. Capital adequacy is especially controversial within banking circles because the capital asset ratio has important but opposite effects on banker's profitability and solvency". (Meyer, 1982 : 221)

Ketentuan permodalan yang saat ini berlaku di Indonesia ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral. Untuk keperluan ini Bank Indonesia telah mengeluarkan SK Direksi BI No.23/67/KEP/DIR serta SEBI No.23/11/BPPP tertanggal 28 Februari 1991 perihal kewajiban penyediaan modal minimum bank, yang ketentuannya didasarkan pada standar yang ditetapkan BIS (Bank for International Settlement). Menurut standar BIS, masing-masing negara dapat melakukan penyesuaian dalam penerapan prinsip perhitungan permodalan dengan melihat kondisi perbankan setempat.

Capital Adequacy atau permodalan yang cukup adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari



penanaman dana dalam aktiva produktif yang mengandung resiko serta untuk membiayai penanaman dalam benda tetap dan inventaris.

Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh BIS, Bank Indonesia berdasarkan Paket Kebijakan 29 Februari 1991 (Pakfeb'91) mewajibkan setiap bank menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Ketentuan presentase tersebut harus telah terpenuhi selambat-lambatnya pada akhir tahun 1993. Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut BIS disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Oleh karena itu ketentuan CAR bagi perbankan Indonesia adalah 8% dari ATMR.

Pihak perbankan diberi kesempatan oleh BI untuk melakukan penyesuaian permodalannya dengan pemenuhan bertahap, yaitu 5% untuk akhir Maret 1992, 7% untuk Maret 1993 dan 8% pada Desember 1993.

## **2.2.7 Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum Bank**

### **a. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal**

Perhitungan penyediaan modal minimum (*capital adequacy*) didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini terdiri dari aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif, sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.

Seperti diketahui, bahwa resiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul dalam bentuk resiko kredit maupun resiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing.

Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut, ditetapkan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot resiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

#### b. Cara Perhitungan Kebutuhan Modal

Kebutuhan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio = CAR) dihitung berdasarkan ATMR yang merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif.

- "a) ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko masing-masing pos aktiva neraca.
- b) ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko masing-masing pos rekening administratif.
- c) Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal inti dan modal pelengkap atau modal kantor cabang bank asing, bagi bank asing dengan total ATMR (neraca dan administratif).
- d) Dengan membandingkan rasio modal pada huruf c) tersebut diatas dengan kewajiban penyediaan modal minimum (8 %) dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan atau tidak." (Dahlan Siamat, 1993 : 85)

Berdasarkan SEBI No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 (Pakmei'93) perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank bagi Bank Umum, yang merupakan penyempurnaan dari Pakfeb'91, diberikan tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diatur sebagai berikut :

- "a) Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Neraca terdiri dari :
  - 1) ATMR aktiva neraca dalam rupiah dan valas.
  - 2) ATMR aktiva administratif dalam rupiah dan valas.
- b) Modal, yaitu modal inti dan modal pelengkap.
- c) Modal minimum, yaitu  $8\% \times \text{ATMR}$ .
- d) Kelebihan atau kekurangan modal, yaitu jumlah modal dikurangi modal minimum.
- e) Rasio Modal, yaitu  $(\text{jumlah modal} : \text{ATMR}) \times 100\%$ ." (Bank Indonesia, 1993 : 48)

Berdasarkan ketentuan CAR sesuai dengan Pakfeb'91 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi CAR suatu bank sangat tergantung pada :

- "a) Jenis aktiva serta besarnya resiko yang melekat padanya.
- b) Kualitas aktiva serta tingkat kolektibilitas.
- c) Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva, semakin bertambah pula resikonya.
- d) Struktur posisi dan kualitas permodalan bank.
- e) Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba." (Widjanarto, 1993 : 143)

Selain itu, posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki dengan cara :

- "a) Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan. Jadi, para debitur yang mendapat plafon yang relatif besar dibandingkan

- dengan pemakaiannya atau penggunaan rata-ratanya, plafon kreditnya dapat dikurangi.
- b) Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga resiko semakin berkurang.
  - c) Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa provisi yang relatif kecil namun dengan resiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi.
  - d) Komitmen L/C bagi bank-bank devisa yang belum benar-benar memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat dimanfaatkan secara efisien sebaiknya juga dibatasi.
  - e) Penyertaan yang memiliki resiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak.
  - f) Posisi aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan.
  - g) Menambah atau memperbaiki posisi modalnya dengan cara :
    - 1) Setoran tunai.
    - 2) Go public.
    - 3) Pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham." (Widjanarto, 1993 : 144)

Perhitungan rasio permodalan yang merupakan rasio kebutuhan modal minimum (CAR), dapat juga ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$1) \text{ Rasio Modal (CAR)} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio ini digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank menutupi penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian-kerugian atas aktiva bank, dengan menggunakan modal sendirinya. Kerugian-kerugian tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya modal bank. Rasio ini banyak digunakan dan merupakan rasio utama untuk mengukur CAR suatu bank (Dahlan Siamat, 1993:271).

$$2) \text{ Rasio modal (CAR)} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Kredit} + \text{Sekuritas}}$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan permodalan bank untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam penyaluran kredit, misalnya akibat gagalnya kreditur membayar kembali sebagian atau seluruh pinjaman beserta bunganya (default), dan juga kemungkinan timbulnya kerugian atas portfolio investasi sekuritas (Dahlan Siamat, 1993:272).

$$3) \text{ Rasio Modal (CAR)} = \frac{\text{Modal Sendiri} - \text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Kredit} + \text{Sekuritas}}$$

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan modal bank setelah dikurangi aktiva tetapnya untuk menutupi kerugian dari penyaluran kredit dan pengalokasian dana dalam bentuk surat-surat berharga (Dahlan Siamat, 1993:272).

Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya CAR masing-masing bank, digunakan formula yang pertama, yaitu dengan membandingkan modal sendiri terhadap total aktivasinya.

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

- a. Diduga ada perbedaan persentase tingkat ketentuan kebutuhan modal minimum pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.
- b. 1) Diduga ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk cadangan primer pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.
- 2) Diduga ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk cadangan sekunder pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.
- 3) Diduga ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk penyaluran kredit pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.
- 4) Diduga ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk investasi jangka panjang pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.
- 5) Diduga ada perbedaan persentase penyaluran dana dalam bentuk investasi dalam aktiva tetap dan inventaris pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.

## 2.4 Model Analisis

Guna menguji hipotesis seperti yang telah disebutkan di atas, maka model analisis yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model *Selisih Dua Rata-Rata dari kelompok data observasi perpasangan (Difference between means : paired observation)* berdasarkan penggabungan data *time series (runtut waktu)* dan *cross section* yang disebut dengan *pooling the data*. Penggabungan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar jumlah kasus pengamatan yang diteliti, sehingga hasil perhitungannya akan lebih valid dan mendekati kebenaran. Selain itu jumlah bank yang diteliti di Bursa Efek Surabaya hanya 11 (sebelas bank) dengan jumlah tahun pengamatan masing-masing 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, yaitu dari tahun 1990 sampai dengan 1991 dan 2 (dua) tahun setelah diberlakukannya Pakfeb'91, yaitu dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1993. Sehingga total kasus untuk masing-masing pengamatan jumlahnya menjadi sebanyak 11 pengamatan.

Alasan digunakannya model tersebut adalah variabel-variabel yang diteliti merupakan variabel bebas, dimana dalam hal ini adalah kebutuhan akan adanya modal minimum dan komponen penyaluran dana pada bank sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91.

Model seperti disebutkan di atas, digunakan dengan dasar bahwa klasifikasi data yang diteliti merupakan data rasio dengan jenis kontinyu. Melihat dari sedikitnya jumlah

pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka digunakan uji t. Model yang dimaksudkan adalah :

$$t_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

$t_0$  merupakan distribusi t dengan derajat kebebasan sebesar  $n_1 + n_2 - 2$ .

Keterangan :

$\bar{X}_1$  = rata-rata variabel sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.

$\bar{X}_2$  = rata-rata variabel sesudah diberlakukannya Pakfeb'91.

$S_1$  = standar deviasi sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.

$S_2$  = standar deviasi sesudah diberlakukannya Pakfeb'91.

$n_1$  = banyaknya jumlah sampel dalam penelitian sebelum diberlakukannya Pakfeb'91.

$n_2$  = banyaknya jumlah sampel dalam penelitian sesudah diberlakukannya Pakfeb'91.

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, meliputi : CAR, cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris pada bank-bank yang telah go public.



## **BAB 3**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Identifikasi Variabel**

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui komposisi penyaluran dana pada bank-bank yang telah go public sebelum dan sesudah diberlakukannya paket kebijaksanaan Februari 1991.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini keseluruhannya merupakan variabel bebas, dimana antara variabel satu dengan yang lainnya tidak saling mempengaruhi. Variabel-variabel bebas tersebut meliputi kebutuhan modal minimum yang diukur dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan komposisi penyaluran dana, yang terdiri dari cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 ( $X_1$ ) dan Capital Adequacy Ratio (CAR), cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris setelah diberlakukannya Pakfeb'91 ( $X_2$ ).

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Guna menghindari salah pengertian dari masing-masing variabel dan membatasi analisis yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan operasionalisasi dari masing-masing variabel baik variabel yang digunakan dalam

pengujian statistik maupun variabel lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

a. Kebutuhan Modal atau Capital Adequacy

Kebutuhan modal akan diukur dengan menggunakan kebutuhan modal minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR), yang menunjukkan besarnya kemampuan permodalan untuk menutup penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian atas aktiva bank, yang dapat mengakibatkan berkurangnya modal bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) diukur dengan cara mencari persentase dari pembagian antara jumlah modal sendiri (total ekuitas) dengan total aktiva. Tidak digunakannya perhitungan CAR yang dihitung dengan cara mencari persentase dari pembagian jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), disebabkan terbatasnya data yang ada. Tetapi penentuan CAR yang lebih disederhanakan dengan menggunakan perbandingan total ekuitas dengan total aktiva tersebut, tidak mengurangi hakekat CAR yang sesungguhnya. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BIS dalam Paket Kebijakan Februari 1991 (Pakfeb'91), mewajibkan setiap bank menyediakan modal minimum secara bertahap, yaitu sebesar 5 % pada akhir Maret 1992, 7 % pada akhir Maret 1993 dan 8 % pada akhir Desember 1993.

Satuan yang digunakan dalam menentukan kebutuhan modal minimum ini adalah persentase.

**b. Komposisi Penyaluran Dana.**

Penyaluran atau penggunaan dana merupakan semua kegiatan bank yang berada di sisi aktiva neraca dan berkaitan dengan bagaimana bank menggunakan atau mengalokasikan kembali dana tersebut dengan berbagai alternatif untuk memaksimalkan laba. Komposisi penyaluran dana bank terdiri dari :

a) Cadangan Primer, merupakan prioritas paling tinggi yang harus dipegang teguh oleh setiap bank. Cadangan primer ini diperlukan sebagian untuk memenuhi tuntutan hukum (legal reserve requirement), sedangkan sebagian lainnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Karakteristik dasar untuk cadangan primer ialah bahwa aktiva ini tidak mendatangkan pendapatan bagi bank. Cadangan primer bank terdiri dari uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral, dan bank-bank lainnya, warkat-warkat dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini disebut dengan alat-alat likuid.

Besarnya cadangan primer ditentukan dengan membandingkan besarnya cadangan primer sebuah bank dengan total aktivasinya.

Satuan yang digunakan dalam menentukan besarnya cadangan primer ini adalah persentase.

b) Cadangan Sekunder, merupakan prioritas berikutnya yang harus dipenuhi oleh bank setelah cadangan

primer. Dua fungsi utama yang harus dipenuhi oleh cadangan sekunder ini adalah untuk memenuhi likuiditas dan untuk memenuhi rentabilitas. Sehingga, sifat-sifat aktiva yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai cadangan sekunder bentuknya harus tidak jauh dari bentuk uang tunai/kas, dalam arti mudah diuangkan atau dijual tanpa banyak disertai dengan menurunnya harga dan bahwa aktiva tersebut juga harus mendatangkan pendapatan bagi pemiliknya. Walaupun tingkat pendapatan yang diperoleh dari cadangan sekunder pada umumnya rendah, pihak bank harus tetap memilikinya.

Cadangan sekunder bank terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan Sertifikat Deposito.

Besarnya cadangan sekunder ditentukan dengan membandingkan besarnya cadangan sekunder sebuah bank dengan total aktivanya.

Satuan yang digunakan dalam menentukan besarnya cadangan sekunder ini adalah persentase.

- c) Penyaluran Kredit dilakukan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank yang bersangkutan. Penyaluran kredit ini dilakukan oleh bank setelah tingkat likuiditas yang bisa dipenuhi cukup memadai. Dari kredit atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah inilah bank memperoleh pendapatan berupa bunga. Penanaman dana dalam bentuk

kredit pada umumnya kurang likuid dan lebih tinggi risikonya bila dibandingkan dengan penanaman dalam bentuk cadangan sekunder. Tetapi apabila dilihat dari segi keuntungannya, menunjukkan keadaan yang sebaliknya, yaitu lebih menguntungkan dibandingkan dengan cadangan sekunder. Bagi bank umum, penerimaan yang berasal dari pemberian kredit pada umumnya merupakan penerimaan terbesar.

Besarnya penyaluran kredit ditentukan dengan membandingkan besarnya penyaluran kredit sebuah bank dengan total aktivasinya.

Satuan yang digunakan dalam menentukan besarnya penyaluran kredit ini adalah persentase.

- d) Investasi Jangka Panjang, yaitu penanaman dana dalam surat-surat berharga yang berjangka lebih dari satu tahun dengan maksud untuk memperoleh pendapatan. Investasi ini dilakukan oleh bank setelah kebutuhan akan cadangan primer, cadangan sekunder dan permintaan nasabah untuk kredit telah terpenuhi semuanya, sehingga dana yang tersisa dapat ditanamkan dalam bentuk surat-surat berharga. Investasi ini antara lain berbentuk obligasi yang diterbitkan oleh bank-bank lain.

Besarnya investasi jangka panjang ditentukan dengan membandingkan besarnya investasi jangka panjang sebuah bank dengan total aktivasinya.

Satuan yang digunakan dalam menentukan besarnya investasi jangka panjang ini adalah persentase.

- e) Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris yang dimiliki oleh bank.

Dalam melaksanakan usahanya, pasti bank memerlukan kantor, peralatan dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk dapat menjalankan usaha perbankan secara meyakinkan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga keuangan tentunya memerlukan penampilan yang meyakinkan. Oleh karena itu, bank selalu berusaha untuk menampilkan diri dalam bentuk kantor yang modern baik untuk bangunannya maupun peralatan yang digunakan guna menunjang usahanya. Untuk itu, diperlukan dana yang tidak sedikit, sehingga pihak bank perlu untuk merencanakannya secara matang.

Besarnya investasi dalam aktiva tetap dan inventaris ditentukan dengan membandingkan besarnya investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sebuah bank dengan total aktivasinya.

Satuan yang digunakan dalam menentukan besarnya investasi dalam aktiva tetap dan inventaris ini adalah persentase.

Dari kelima komponen penyaluran dana diatas, yang termasuk dalam *non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan) adalah cadangan primer serta penanaman

dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Sedangkan yang termasuk dalam *earning assets* (aktiva yang menghasilkan) adalah cadangan sekunder, penyaluran kredit kepada nasabah dan investasi dalam jangka panjang.

### 3.3 Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 11 bank (Bank Umum Swasta Nasional) dari 14 bank yang go public di Bursa Efek Surabaya pada tahun 1989 dan 1990. Kesebelas bank yang go public di Bursa Efek Surabaya tersebut, tampak pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Sebelas Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya antara Tahun 1989 sampai dengan 1990

No.	Nama Bank	Tanggal Emisi I
1.	Bank Surya	29 September 1989
2.	Bank Internasional Indonesia	2 Oktober 1989
3.	Lippo Bank	5 Oktober 1989
4.	Panin (Pan Indonesia) Bank Ltd.	16 Oktober 1989
5.	Bank Danamon	27 Oktober 1989
6.	Bank Niaga	29 November 1989
7.	Bank Bali	2 Desember 1989
8.	Tamara Bank	30 Januari 1990
9.	Bank Dagang Nasional Indonesia	2 April 1990
10.	Bank Duta	12 April 1990
11.	Bank Umum Nasional	26 Mei 1990

Tiga bank lain yang juga go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini, adalah :

- a. PT. Bank Ficorinvest (PT. First Indonesian Finance and Investment Corporation), dengan tanggal Emisi I pada 14 Agustus 1989.
- b. PT. Bank PDFCI (PT. Private Development Finance Company of Indonesia Ltd.), dengan tanggal Emisi I pada 25 Mei 1990.
- c. PT. Bank Inter-Pasifik (PT. Inter-Pasific Financial Corporation), dengan tanggal Emisi I pada 23 Agustus 1990.

Ketiga bank tersebut diatas tidak digunakan dalam penelitian ini, karena sampai saat ini ketiganya beroperasi bukan sebagai lembaga keuangan layaknya bank yang lainnya, melainkan berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lingkup kerja LKBB hanya melakukan kegiatan di bidang keuangan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk pembiayaan-pembiayaan proyek investasi. Jadi, ruang gerak operasi LKBB lebih sempit dari lembaga keuangan dalam bentuk bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tidak melaksanakan penghimpunan dana masyarakat melalui jasa perbankan pada umumnya, seperti tabungan, giro dan deposito; tetapi hanya melaksanakan transaksi yang berbentuk jaminan yang diberikan kepada nasabahnya. Meskipun setelah Pakto 27/1988, LKBB diijinkan untuk menerbitkan sertifikat deposito guna memperluas ruang gerak operasinya.



Sampai saat ini, LKBB kebanyakan beroperasi dan bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter), pedagang valuta asing, lembaga pembiayaan (leasing), dan jasa asuransi. Sedangkan untuk penyaluran dananya lebih banyak ke pembiayaan usaha proyek (project financing) dalam bidang pembangunan serta investasi-investasi yang lain.

Dipilihnya bank-bank yang telah go public sebagai obyek penelitian dengan maksud bahwa tambahan modal yang diperoleh pihak bank relatif murah dan dapat dijadikan sarana dalam rangka pengembangan usahanya. Sehingga, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa sumber dana bank tidak sulit untuk mendapatkannya.

Disebutkan di atas, bahwa dengan go public-nya suatu bank, pihak bank akan mudah untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan dana yang murah. Hal ini diperkuat dengan adanya motivasi yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk go public, dimana bank merupakan salah satu bagian dari perusahaan tersebut. Motivasi yang dimaksud, adalah :

a. Menciptakan kondisi yang baik guna membiayai perusahaan di masa yang akan datang.

Suatu perusahaan yang mengadakan emisi saham selain memperoleh dana yang diperlukan juga mendapatkan manfaat lain secara tidak langsung. Bilamana saham yang diemisikan sudah memasyarakat, maka emisi yang berikutnya akan lebih mudah diterima oleh pasar. Sementara itu, pihak kreditor memiliki kecenderungan untuk memberi kemudahan pemberian kredit pada perusahaan yang sahamnya

sudah mampu diterima dan diakui masyarakat. Bila perusahaan merencanakan untuk merger ataupun akuisisi, saham yang telah teruji di pasar modal merupakan instrumen yang sangat berharga dalam suatu perundingan.

b. Alat pemberi motivasi bagi manajer puncak.

Penggunaan stock option plan akan lebih berarti bilamana pasar bagi saham perusahaan terbentuk. Dalam pelaksanaannya, jasa produksi yang dibayarkan dalam rencana ini dibayarkan dalam bentuk saham, sehingga manajer puncak akan memperoleh insentif dengan go public-nya suatu perusahaan.

c. Hubungan masyarakat.

Saham perusahaan yang tersebar luas pemilikannya di masyarakat akan merupakan publikasi yang sangat efektif. Hal tersebut akan lebih bermanfaat apabila yang dimaksud masyarakat adalah para pemegang saham yang juga bertindak sebagai konsumen, nasabah dari barang dan jasa yang diperdagangkan.

d. Diversifikasi.

Go public merupakan alat bagi pemilik suatu perusahaan guna memiliki perusahaan lainnya, karena dana yang diperoleh dari emisi digunakan untuk investasi dalam perusahaan lain guna memenuhi kepuasan pribadi.

e. Agunan kredit.

Saham yang sudah terdaftar di bursa dapat digunakan sebagai agunan kredit.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari :

- a. Laporan Neraca dan Rugi-Laba masing-masing bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Jakarta, mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1993.
- b. Prospektus, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan masing-masing bank yang diperoleh dari Bursa Efek Surabaya, mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1993.
- c. Buku-buku teks, makalah-makalah, dan majalah-majalah yang berkaitan dengan perbankan.

### 3.5 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diajukan. Selain itu, juga digunakan teknik dokumentasi, artinya mencari data dengan cara mencari dari dokumen-dokumen milik BI dan BES.

Tahap awal data dikumpulkan dengan cara membaca buku-buku teks, makalah-makalah dan majalah-majalah yang berhubungan dengan perbankan untuk memperoleh gambaran data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperlukan meliputi kebutuhan modal minimum (CAR), cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta aktiva tetap dan inventaris sebelum dan

sesudah diberlakukannya Pakfeb'91. Dilanjutkan kemudian dengan mengumpulkan segala macam informasi yang diperlukan dan masih berkaitan guna menunjang penelitian ini, seperti literatur-literatur, laporan keuangan tiap-tiap bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun prospektus tiap-tiap bank di Bursa Efek Surabaya. Data yang telah terkumpul, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisis selanjutnya.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data agar sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif artinya memakai uji statistik, dan metode kualitatif untuk menjelaskan (mendiskripsikan) hubungan antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang dipakai melalui uraian-uraian secara sistematis.

Dari uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa dengan menggunakan model Selisih Dua Rata-Rata akan diperoleh parameter-parameter koefisien baik yang bertanda positif maupun negatif (uji dua arah). Dari tanda-tanda yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan teori yang ada, sesuai ataukah tidak. Apabila sesuai, kemudian dilanjutkan dengan pengujian statistik dengan menggunakan tingkat kebermaknaan tertentu.

Pada tahap awal terlebih dahulu dihitung berapa besar rata-rata hitung untuk masing-masing variabel serta standar

deviasinya. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam rumus, seperti yang tertera dalam model analisis yang akan menghasilkan nilai  $t_{\text{observasi}} (t_o)$ . Dari hasil perhitungan  $t_o$  tersebut, kemudian dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}} (t_t)$  yang ada, dengan tingkat kebermaknaan 5%. Dalam uji  $t$  ini, apabila  $t_t \leq t_o \leq t_t$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Sedangkan apabila  $t_o > t_t$  atau  $t_o < t_t$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ( $H_a$ ) diterima.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan hipotesis alternatif, karena menggunakan dasar teori yang telah ada, yaitu :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : Kebutuhan modal minimum (CAR), cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris pada kesebelas bank yang telah go public sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, adalah tidak berbeda.

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$  : Kebutuhan modal minimum (CAR), cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris pada kesebelas bank yang telah go public sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, adalah berbeda.

Pada Tabel 3.2 diperlihatkan cara untuk mencari rata-rata dari semua variabel bebas, yaitu CAR, cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka

panjang, serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris.

**Tabel 3.2**

**Rata-rata CAR, Cadangan Primer, Cadangan Sekunder, Penyaluran Kredit, Investasi Jangka Panjang, serta Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91**

Bank (n)	Periode 1990-1991 (Sebelum Pakfeb'91)	Periode 1992-1993 (Sesudah Pakfeb'91)	$d_i$	$(d_i - \bar{d})^2$
	$X_{i1}$	$X_{i2}$		
1	$X_{11}$	$X_{12}$	$d_1$	$(d_1 - \bar{d})^2$
2	$X_{21}$	$X_{22}$	$d_2$	$(d_2 - \bar{d})^2$
3	$X_{31}$	$X_{32}$	$d_3$	$(d_3 - \bar{d})^2$
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
n	$X_{n1}$	$X_{n2}$	$d_n$	$(d_n - \bar{d})^2$

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_{i1}}{n} \quad ; \quad \bar{X}_2 = \frac{\sum X_{i2}}{n}$$

$$d_i = X_{i1} - X_{i2} \quad ; \quad \bar{d} = \frac{1}{n} \sum d_i$$

$$S_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (d_i - \bar{d})^2}$$

$$t_o = \frac{\bar{d} - \mu_0}{S_d / \sqrt{n}}$$

Karena sampel yang digunakan adalah sampel kecil ( $n \leq 30$ ), maka digunakan uji  $t$  seperti tampak pada metode analisis di atas:

Selanjutnya dibandingkan nilai  $t_{\text{tabel}}$  dengan  $t_{\text{observasi}}$ , dengan cara sebagai berikut :

Jika  $t_t \leq t_o \leq t_t$  , berarti  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Jika  $t_o > t_t$  atau

$t_o < t_t$  , berarti  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Agar hasil perhitungan yang diperoleh keakuratannya lebih terjamin, maka dalam penelitian ini untuk perhitungannya tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan Komputer program Microstat.

## BAB 4

### GAMBARAN UMUM DEREGULASI PERBANKAN INDONESIA

#### 4.1 Gambaran Singkat Deregulasi Perbankan di Indonesia

Sasaran pokok deregulasi perbankan di Indonesia pada prinsipnya dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan bank menghimpun dana terutama dari masyarakat sebagai sumber pembiayaan.
- b. Menjadikan perbankan lebih mandiri dan tidak tergantung dari dukungan Bank Indonesia dalam hal pendanaannya.
- c. Mendorong efisiensi perbankan melalui kompetisi yang sehat.
- d. mengurangi peranan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dinilai memiliki dampak inflatoir.
- e. Memantapkan/mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai *"lender of last resort"*.
- f. Mengubah instrumen kebijakan moneter dari pengaturan langsung menjadi tidak langsung. (Dahlan Siamat, 1993:93)

Deregulasi di bidang moneter dan perbankan yang diawali pada 1 Juni 1983 (Pakjun'83), sangat mempengaruhi pola dan strategi manajemen bank di sisi pasiva maupun di sisi aktiva dalam neraca bank. Dalam memasuki era deregulasi ini, bank-bank mulai mengembangkan produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang dibutuhkan para nasabah. Secara perlahan tingkat suku bunga mengalami kenaikan yang diikuti dengan banyaknya hadiah-hadiah yang dapat diperoleh nasabah, apabila menginvestasikan dananya pada bank



tertentu. Bank-bank pemerintah yang sebelumnya dibatasi dan diatur tingkat bunganya oleh pemerintah, mulai dapat menentukan sendiri dan bersaing dengan bank-bank swasta, terutama dalam hal penghimpunan dana.

Kebijakan 1 Juni 1983 (deregulasi perbankan) dikatakan sebagai awal menuju sistem keuangan yang lebih liberal dan efisien. Inti dari deregulasi ini, adalah :

- a. Penghapusan pagu kredit perbankan.
- b. Pembebasan penetapan suku bunga bagi bank-bank pemerintah.
- c. Pengurangan KLBI secara bertahap, kecuali bagi sektor-sektor yang berprioritas tinggi.

Setelah kebijakan 1 Juni 1983 dikeluarkan, untuk lebih mendukungnya dikeluarkan paket deregulasi berikutnya pada tanggal 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan Pakto'88. Pakto'88 merupakan tonggak baru dalam sejarah perbankan, yang mencakup kebijakan berbagai kegiatan usaha bank, yang meliputi :

- a. Usaha peningkatan pengerahan dana masyarakat, dengan cara :
  - 1) Kemudahan pembukaan kantor cabang bank.
  - 2) Pendirian bank-bank umum dan BPR baru.
  - 3) Kemudahan penerbitan sertifikat deposito.
  - 4) Perluasan jenis tabungan.
- b. Peningkatan ekspor non migas, dengan cara :
  - 1) Perluasan bank-bank devisa.
  - 2) Pendirian bank-bank campuran.

- 3) Pembukaan kantor cabang pembantu bank asing.
  - 4) Penyempurnaan mekanisme swap.
  - 5) Perdagangan valuta asing.
- c. Peningkatan efisiensi, dengan cara :
- 1) Penempatan dana BUMN dan BUMD bukan bank pada bank-bank swasta.
  - 2) Perluasan jumlah bank dan kantor cabang bank.
  - 3) Penetapan batas maksimum pemberian kredit (Legal Lending Limit = LLL).
- d. Peningkatan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu :
- 1) Penurunan likuiditas wajib minimum dari 15 % menjadi 2 %.
  - 2) Pelaksanaan operasi pasar terbuka (open market operation) dengan menyempurnakan mekanisme perdagangan SBI dan SBPU dan fasilitas diskonto.
- e. Perbaikan iklim pasar modal, yaitu dengan pembebanan pajak atau bunga deposito dan tabungan. (Dahlan Siamat, 1993:92)

Kelanjutan dari Pakto'88 adalah dikeluarkannya paket deregulasi baru pada tanggal 27 Februari 1991, yang dikenal dengan Pakfeb'91 yaitu mengenai *prudential regulation*. Paket ini dilandasi dengan keadaan dan kondisi perbankan serta perekonomian yang tumbuh pesat setelah dikeluarkannya Pakto'88. Cepatnya pertumbuhan ini mengakibatkan naiknya tingkat inflasi, karena pertambahan uang yang beredar, yang

telah disalurkan menjadi kredit tidak seluruhnya digunakan untuk sektor produktif. Kredit ini dengan cepat berubah menjadi permintaan efektif yang tidak disertai kenaikan tingkat produksi barang dan jasa, sehingga menjadi pendorong naiknya tingkat inflasi.

Pakfeb'91 menyangkut azas kehati-hatian bagi perbankan. Pihak BI antara lain menentukan agar kalangan perbankan memenuhi standar Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8 % secara bertahap sampai dengan akhir Desember 1993, pembatasan Loan to Deposit Ratio (LDR) maksimum 110 %, ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP) serta pembentukan cadangannya. Sebagian besar keseluruhan isi dari paket ini merupakan penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank, yang bertujuan agar kalangan perbankan lebih memperhatikan pengawasan terhadap kesehatannya dengan beroperasi secara hati-hati dan menjadikan perbankan Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Sebagai penyesuaian terhadap kebijakan tersebut, sektor perbankan melakukan konsolidasi agar mampu memenuhi persyaratan terutama mengenai tingkat kesehatan dan CAR.

Paket deregulasi perbankan berikutnya yang dikeluarkan pemerintah, adalah kebijaksanaan 29 Mei 1993 (Pakmei'93). Paket ini berisi materi ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas kredit bagi dunia usaha, menyempurnakan ketentuan perbankan dalam hal

kewajiban pemenuhan CAR, LDR, penyempurnaan cadangan penghapusan piutang dan penyempurnaan pembatasan pemberian kredit (BMPK).

#### **4.2 Strategi Perbankan dalam Menghadapi Ketentuan CAR**

Paket deregulasi 27 Februari 1991 (Pakfeb'91) merupakan tonggak pembatas liberalisasi perbankan Indonesia. Salah satu ketentuan penting adalah penilaian tentang kesehatan bank dan terutama adalah ketentuan yang berkaitan dengan permodalan bank (Capital Adequacy Ratio = CAR). Bank Indonesia melalui Pakfeb'91 mewajibkan pihak perbankan memenuhi kewajiban CAR secara bertahap sebesar 5 % pada akhir Maret 1992, 7 % pada akhir Maret 1993 dan 8 % pada akhir Desember 1993. Pemenuhan ini dirasakan cukup berat walaupun dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan struktur likuiditas dan permodalan bank-bank di Indonesia setelah Pakto'88 cukup memprihatinkan. Rasio pinjaman terhadap dana masyarakat (Loan to Deposit Ratio) rata-rata bank swasta sebesar 130 % dan bank pemerintah adalah sebesar 200 %. Pemberian kredit yang cukup agresif pada tahun 1989 dan 1990 ternyata tidak ditunjang oleh struktur permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai. (Muchdarsyah S., 1993 : 184)

Dengan Pakfeb'91, pada dasarnya diharapkan tumbuhnya bank-bank yang sehat yang didukung oleh permodalan yang kuatpula, namun mengingat kemampuan bank-bank yang kurang mampu akan mengalami hambatan dalam CAR, maka bank-bank

tersebut akan mengalami hambatan pula dalam meningkatkan peranannya guna menunjang kegiatan ekonomi disamping akan terus berupaya secara optimal untuk memenuhi ketentuan CAR yang sudah digariskan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan pemenuhan CAR, adalah :

- 1) Kemampuan perbankan nasional terutama bank-bank swasta tidak sama antara bank devisa dan non devisa serta antara yang lama (sebelum Pakto'88) dengan yang baru, demikian pula antara yang sudah go public dengan yang belum. Perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban CAR yang sudah disyaratkan, sehingga kelompok BUSN lama dan bukan devisa umumnya akan menghadapi permasalahan dalam implementasinya.
- 2) Secara makro pelaksanaan CAR berdampak kurang menguntungkan terhadap kegiatan ekonomi dan dunia usaha, sebaliknya bagi pihak perbankan sendiri terbatasnya ekspansi kredit akan berdampak negatif bagi tingkat rentabilitasnya, sehingga bagi bank-bank kurang mampu tersebut diatas akan menghadapi kondisi yang semakin sulit.

Masalah pemenuhan CAR memerlukan beberapa strategi yang harus dilakukan baik oleh bank-bank pemerintah maupun oleh bank-bank swasta. Bagi bank-bank pemerintah, dalam mengatasi kebutuhan modalnya dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemilik, menurut Departemen Keuangan mendapat bantuan dana dari lembaga-lembaga

keuangan internasional, baik melalui konversi pinjaman-pinjaman bank pemerintah berupa two step loan, maupun melalui pinjaman baru yang diterima dari bank dunia.

Bagi bank-bank swasta yang tidak mendapat fasilitas seperti halnya bank milik pemerintah, dapat mengatasinya dengan cara sebagai berikut :

- 1) RUU Perbankan yang membolehkan saham bank dibeli oleh pihak asing, memungkinkan bank-bank yang sudah go public menjangkau modal dari luar negeri.
- 2) Mengurangi total aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang berarti bank-bank mengurangi *exposure* pada aktiva yang mengandung resiko tinggi.
- 3) Ketika bank sudah waktunya membayarkan deviden kepada para pemegang sahamnya, bank-bank tidak membagikan deviden tetapi mengeluarkan saham bonus. Secara otomatis bank tidak mengeluarkan uang, sebaliknya modal makin bertambah.
- 4) Menjual Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) ke Bank Indonesia.

Selain digunakan cara diatas, untuk keluar dari kemelut pemenuhan struktur permodalan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan menyuntikkan dana segar, mengurangi komposisi aktiva berbobot resiko tinggi pada struktur aktiva dan melakukan penggabungan (merger) antara dua bank atau beberapa bank.

## **BAB 5**

### **DISKRIPSI HASIL PENELITIAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Perusahaan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bank-bank yang go public di Bursa Efek Surabaya antara tahun 1989 sampai dengan 1990, dan mempunyai data laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember. Dari seluruh bank yang go public di tahun tersebut, terdapat 11 (sebelas) buah bank yang memenuhi persyaratan sebagai obyek penelitian.

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang gambaran umum dari masing-masing bank yang dimaksud.

##### **1) PT. Pan Indonesia Bank (Panin Bank)**

Panin Bank didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971 di Jakarta, yang merupakan merger (penggabungan usaha) dari PT. Bank Industri dan Dagang Negara, PT. Bank Kemakmuran serta PT. Bank Industri Djaja Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, bank ini bergabung lagi dengan PT. Bank Abadi Jaya, PT. Bank Lingga Harta, PT. Bank Pembangunan Ekonomi dan PT. Bank Pembangunan Sulawesi. Kemudian sejak tahun 1978 mengadakan kerja sama dengan Credit Lyonnais guna terus meningkatkan perluasan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para nasabah.

Panin Bank sebagai sebuah perseroan, *go public* sejak tanggal 28 Oktober 1982, dengan melakukan penawaran umum

perdana sejumlah 1.637.500 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 dan harga penawaran sebesar Rp. 3.475,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 12,5% dari 13.100.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk pengana-lisisan lebih lanjut, diperlihatkan oleh Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Sebagian Data Neraca Panin Bank  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	1.422.150.023	1.956.870.000	2.335.713.000	3.148.125.000	3.411.094.000
Total Ekuitas	108.362.000	306.568.000	306.821.000	316.598.000	356.681.000
Cad. Primer	65.031.000	57.881.000	52.270.000	63.633.000	79.537.000
Cad. Sekunder	274.684.828	544.959.000	1.164.515.000	1.388.838.000	1.120.914.000
Peny. Kredit	1.013.984.195	1.222.984.000	962.346.000	1.515.562.000	2.036.588.000
Inv. Jk. Panjang	18.392.000	18.687.000	25.590.000	26.380.000	27.022.000
Inv. dlm AT	50.066.000	112.359.000	130.992.000	161.712.000	147.033.000

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.1, tampak bahwa total aktiva dan total ekuitas yang dimiliki Panin Bank dari tahun 1990 sampai dengan 1994 mengalami kenaikan. Kenaikan ini diikuti oleh kenaikan dalam kelompok penyaluran dananya, kecuali cadangan primer yang justru mengalami penurunan dari tahun 1990 ke tahun 1991 dan 1992. Sedangkan penyaluran kreditnya hanya mengalami penurunan pada tahun 1991 ke tahun 1992.



## 2) PT. Lippo Bank

Lippo Bank pertama kali didirikan dengan nama NV. Bank Pertiagaan Indonesia (Indonesian Mercantile Bank), yang kemudian diubah menjadi PT. Bank Pertiagaan Indonesia pada tanggal 11 Maret 1948 di Jakarta. Merger dengan NV. Central Comercial Bank dilakukan pada tanggal 29 Maret 1977. Nama PT. Bank Pertiagaan Indonesia diubah menjadi PT. Lippo Bank pada tanggal 14 Februari 1989.

Pada perkembangan berikutnya, dilakukanlah merger antara Lippo Bank dengan PT. Bank Umum Asia pada tanggal 31 Juli 1989. Sedangkan mulai tanggal 7 September 1989, oleh Bank Indonesia ditunjuk sebagai bank devisa.

Lippo bank mulai *go public* sejak tanggal 5 Oktober 1989, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 6.800.000 lembar. Nilai nominal saham tersebut Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.000,00 per lembar sahamnya. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 17,14% dari 39.675.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk pengana-lisisan lebih lanjut, diperlihatkan oleh Tabel 5.2.

Tabel 5.2

Sebagian Data Neraca Lippo Bank  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	2.684.498.164	3.100.217.223	3.831.201.503	4.904.262.908	6.915.182.345
Total Ekuitas	164.251.870	181.695.259	204.167.948	383.305.563	437.195.770
Cad. Primer	109.688.919	96.015.225	96.160.038	121.897.409	191.930.050
Cad. Sekunder	719.242.311	927.233.265	1.363.083.447	1.085.815.292	1.140.098.306
Peny. Kredit	1.659.196.799	1.829.851.370	2.115.656.336	3.382.728.590	5.210.923.117
Inv. Jk. Panjang	24.044.200	26.110.182	26.130.182	29.348.261	45.258.019
Inv. dlm AT	172.325.935	221.007.181	230.171.500	284.473.356	326.972.853

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.2, tampak bahwa total aktiva dan total ekuitas Lippo Bank dari tahun 1990 ke tahun 1994 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan yang berturut-turut tersebut diikuti pula oleh kenaikan kelompok penyaluran dana, terkecuali cadangan primer yang pada tahun 1991 dan 1992 mengalami penurunan. Kenaikan pada cadangan primer barulah dapat terlihat mulai tahun 1993.

### 3) PT. Bank Surya

Bank Surya didirikan di Surabaya pada tanggal 17 Juli 1969 dengan nama PT. Bank Surya Indonesia. Terhitung sejak tanggal 18 September 1989, bank ini berubah kepemilikannya sehingga namanya berganti menjadi PT. Bank Surya, menyusul terjadinya pengalihan kepemilikan perseroan dari para pemegang saham lama ke PT. Dwi Golden Graha pada bulan November 1987.

Bank Surya *go public* sejak tanggal 29 September 1989, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 4.000.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 7.500,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 16 % dari 25.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk penganalisisan lebih lanjut, diperlihatkan oleh Tabel 5.3.

Tabel 5.3

Sebagian Data Neraca Bank Surya  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	420.736.602	560.789.793	688.781.198	758.313.318	861.114.509
Total Ekuitas	58.230.361	60.205.421	64.490.051	69.034.393	76.268.198
Cad. Primer	25.956.594	61.194.914	33.626.428	26.464.676	26.267.178
Cad. Sekunder	17.305.581	70.061.501	186.411.736	220.939.063	194.157.052
Peny. Kredit	265.966.400	351.129.949	450.126.188	492.445.074	611.261.729
Inv. Jk. Panjang	107.715.728	73.378.309	4.868.655	5.612.350	12.871.786
Inv. dlm AT	3.792.299	5.025.120	13.748.191	12.852.155	16.556.764

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.3, terlihat bahwa total aktiva, total ekuitas dan kelompok penyaluran dana yang terdiri dari cadangan primer, cadangan sekunder dan penyaluran kredit mengalami kenaikan yang berturut-turut mulai dari tahun 1990 sampai dengan 1994. Kelompok penyaluran dana yang lain, yaitu investasi jangka panjang dan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris, mulai tahun 1990 sampai dengan

1993 secara berturut-turut justru mengalami penurunan. Kenaikan baru terjadi pada tahun 1994 untuk investasi dalam jangka panjang, sedangkan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris kenaikannya dimulai tahun 1993.

#### 4) PT. Bank Internasional Indonesia (BII)

BII didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1959, yang pada tahun 1979 melakukan merger dengan PT. Bank Tabungan untuk Umum 1859 Surabaya. Sejalan dengan perkembangan aktivitas usahanya, pada tanggal 1 November 1988 BII dinyatakan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Bank Umum Swasta Non Devisa menjadi Bank Umum Swasta Devisa.

BII *go public* pada tanggal 2 Oktober 1989 dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 12.000.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 11.000,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 10,71% dari 112.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk penganalisisan lebih lanjut, diperlihatkan oleh Tabel 5.4.

Tabel 5.4

Sebagian Data Neraca Bil  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	2.872.579.479	3.673.887.491	4.897.443.594	7.138.718.000	9.329.305.000
Total Ekuitas	292.812.001	346.495.192	432.383.862	515.449.000	517.659.000
Cad. Primer	306.530.072	93.930.544	119.132.706	159.407.000	153.679.000
Cad. Sekunder	150.610.396	297.881.094	857.021.413	2.041.384.000	2.103.592.000
Peny. Kredit	2.218.253.398	3.025.184.484	3.638.264.753	4.606.330.000	6.709.516.000
Inv. Jk. Panjang	150.229.375	104.938.358	43.712.791	19.881.000	28.661.000
Inv. dlm AT	46.956.238	151.953.011	239.311.841	311.716.000	333.857.000

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.4, tampak bahwa total aktiva, total ekuitas dan sebagian kelompok penyaluran dana, yaitu cadangan sekunder dan penyaluran kredit mengalami kenaikan mulai tahun 1990 sampai dengan 1994. Sedangkan kelompok penyaluran dana lainnya, yaitu cadangan primer, investasi jangka panjang dan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris, keadaannya berfluktuasi dalam arti mengalami kenaikan dan penurunan.

##### 5) PT. Bank Niaga

Bank Niaga didirikan pada tanggal 26 September 1955 di Jakarta. Selama perkembangannya, Bank Niaga melakukan merger dengan PT. Bank Agung Surakarta, Yogyakarta dan Semarang pada tahun 1973. Pada tahun 1978, merger dilakukan dengan Bank Tabungan Bandung, dan merger dengan Bank Amerta terjadi pada tahun 1983. Terhitung sejak tahun 1974, Bank Niaga menjadi Bank Devisa.

Pesatnya perkembangan usaha yang dilakukan Bank Niaga mengakibatkan dibukanya cabang di Los Angeles pada tahun 1986. Sedangkan pada tahun 1990 didirikanlah bank patungan bersama Sumitomo Bank di Jepang, dengan nama Bank Sumitomo-Niaga.

Bank Niaga *go public* sejak tanggal 29 November 1989, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 5.000.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 12.500,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 10,36% dari 48.261.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk penganalisisan lebih lanjut, diperlihatkan oleh Tabel 5.5.

Tabel 5.5

Sebagian Data Neraca Bank Niaga  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	2.895.042.652	3.014.851.493	3.432.845.079	3.985.264.402	4.898.020.924
Total Ekuitas	140.899.394	154.231.904	194.014.473	211.561.698	251.321.060
Cad. Primer	82.981.620	88.866.600	87.129.909	104.449.481	135.582.502
Cad. Sekunder	259.5200131	341.519.274	616.062.350	778.796.951	790.912.065
Peny. Kredit	2.395.854.691	2.417.323.917	2.516.897.945	2.872.347.854	3.712.450.798
Inv. Jk. Panjang	71.097.409	74.196.960	66.543.789	87.096.091	112.140.944
Inv. dlm AT	85.588.919	92.944.742	146.211.086	146.934.615	326.972.853

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.5, tampak bahwa total aktiva, total ekuitas dan sebagian kelompok penyaluran dana, yaitu

cadangan sekunder dan penyaluran kredit secara berturut-turut mengalami kenaikan dari tahun 1990 ke tahun 1994. Kelompok penyaluran dana yang lain, seperti cadangan primer pada tahun 1992 mengalami penurunan dan tahun selanjutnya mengalami kenaikan. Investasi jangka panjang dan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sebagai kelompok penyaluran dana terakhir, mengalami keadaan yang naik turun mulai tahun 1990 sampai dengan 1994.

#### 6) PT. Bank Danamon

Bank Danamon didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1956 dengan nama PT. Bank Kopra Indonesia. Perubahan nama dari PT. Bank Kopra Indonesia menjadi PT. Bank Danamon terjadi sejak tanggal 13 Oktober 1977. Guna lebih meningkatkan usaha dan keuntungannya Bank Danamon melakukan merger dengan Bank Asia Afrika pada tanggal 26 Agustus 1981. Selanjutnya, mulai tanggal 5 November 1988 oleh BI ditunjuk sebagai Bank Devisa.

Bank Danamon *go public* sejak tanggal 27 Oktober 1989, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 12.000.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 12.000,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 10,71% dari 112.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk penganalisisan lebih lanjut, diperlihatkan oleh Tabel 5.6.

Tabel 5.6

Sebagian Data Neraca Bank Danamon  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	3.034.353.000	3.679.572.389	5.017.807.331	8.160.076.908	10.456.982.317
Total Ekuitas	272.612.610	291.364.621	214.415.937	545.935.576	759.116.150
Cad. Primer	69.000.208	110.370.366	145.745.331	181.571.816	244.628.940
Cad. Sekunder	659.293.018	290.920.779	886.700.510	1.710.172.503	2.083.230.834
Peny. Kredit	2.103.561.772	2.951.323.692	3.580.790.377	5.665.850.406	7.385.607.147
Inv. Jk. Panjang	7.609.000	7.618.000	7.603.000	62.603.000	31.853.940
Inv. dlm AT	194.889.002	319.339.552	396.968.113	539.879.183	711.661.456

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.6, tampak bahwa total aktiva mengalami kenaikan. Total ekuitas juga naik, tetapi pada tahun 1992 terjadi penurunan. Penyaluran kredit, investasi jangka panjang dan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sebagai kelompok penyaluran dana, mengalami kenaikan secara berurutan mulai tahun 1990 sampai 1994. Sedangkan kelompok penyaluran dana yang lain, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder mengalami keadaan yang naik turun.

#### 7) PT. Bank Bali

Bank Bali didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1954 dengan nama PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia. Nama Bank Bali baru digunakan sejak tanggal 5 Oktober 1971. Bank Bali meningkat menjadi Bank Devisa terhitung sejak tanggal 1 Juni 1956. Kerja sama untuk meningkatkan profesionalisme perbankan dilakukan dengan The Sanwa Bank Ltd. Jepang pada tanggal 1 April 1974, yang



diikuti dengan dilakukannya merger dengan Bank Dharma Usaha Surabaya tanggal 8 Agustus 1988.

Bank ~~Danamon~~ mulai *go public* sejak tanggal 2 Desember 1989, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama se sejumlah 3.999.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 9.900,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 8,6% dari 46.524.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk pengana-  
lisisan lebih lanjut, diperlihatkan oleh Tabel 5.7.

Tabel 5.7

Sebagian Data Neraca Bank Bali  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	2.987.631.670	3.184.861.854	3.360.952.277	4.139.758.654	4.983.496.604
Total Ekuitas	247.852.756	281.502.616	300.475.802	325.366.205	361.221.928
Cad. Primer	82.804.041	77.280.040	87.021.125	192.744.583	134.333.773
Cad. Sekunder	775.794.548	751.451.076	942.220.361	766.529.839	841.009.307
Peny. Kredit	1.950.859.587	2.076.636.632	1.971.122.188	2.803.420.848	3.488.554.187
Inv. Jk. Panjang	19.393.223	36.488.104	44.607.030	43.832.132	51.036.881
Inv. dlm AT	158.780.271	243.006.002	315.977.573	433.231.252	468.562.456

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.7, tampak bahwa dari tahun 1990 ke 1994 total aktiva, total ekuitas, kelompok penyaluran dana yang terdiri dari cadangan sekunder, investasi jangka panjang dan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris mengalami kenaikan. Khusus untuk cadangan sekunder, pada tahun 1993

mengalami penurunan. Sedangkan kelompok penyaluran dana lainnya, yaitu cadangan primer dan penyaluran kredit menunjukkan keadaan yang naik dan turun.

#### 8) PT. Tamara Bank

Tamara Bank didirikan pada tanggal 29 Agustus 1977 di Jakarta yang merupakan konsolidasi usaha dari PT. Taurus Credit Bank yang berdiri sejak tahun 1957 dan PT. Bank Semarang yang berdiri sejak tahun 1971.

Semakin lama perkembangan aset dan kegiatan usahanya semakin menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga BI sebagai Bank Sentral pada tanggal 22 Agustus 1989 merubah statusnya dari Bank Umum Swasta Non Devisa menjadi Bank Umum Swasta Devisa.

Tamara Bank melakukan *go public* sejak tanggal 30 Januari 1990, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 3.000.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 8.000,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 20% dari 15.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk penganalisisan lebih lanjut, diperlihatkan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8

Sebagian Data Neraca Tamara Bank  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	393.911.244	558.709.650	648.278.070	1.168.668.349	1.509.359.578
Total Ekuitas	46.621.644	50.801.353	55.532.304	62.289.553	119.488.910
Cad. Primer	17.332.088	21.178.899	16.007.839	19.002.321	33.156.239
Cad. Sekunder	23.152.552	57.204.518	125.985.379	330.964.378	155.929.022
Peny. Kredit	330.044.956	437.931.539	444.502.754	748.746.918	1.236.095.783
Inv. Jk. Panjang	36.000	3.036.000	10.604.123	10.800.413	12.902.236
inv. dlm AT	23.445.648	39.358.694	51.177.975	59.154.319	71.276.298

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.8, tampak bahwa mulai tahun 1990 sampai tahun 1994 kesemuanya mengalami kenaikan, kecuali cadangan primer yang merupakan salah satu kelompok penyaluran dana mengalami keadaan yang berfluktuasi.

#### 9) PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

BDNI berdiri sejak tanggal 5 Oktober 1945 di Medan. Pada tahun 1954, BDNI mulai membuka cabangnya di Jakarta dan setahun kemudian mulai berubah statusnya menjadi Bank Devisa. Seiring dengan pesatnya perekonomian dan guna memudahkan pengembangan usaha selanjutnya, mulai tahun 1977 kantor pusat yang semula berada di Medan dipindahkan ke Jakarta.

BDNI mulai *go public* pada tanggal 2 April 1990, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 11.000.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 8.000,00 per lembar

saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 8,088% dari 138.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk pengana-lisisan lebih lanjut, diperlihatkan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9

Sebagian Data Neraca BDN  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	2.292.304.666	3.194.038.387	4.284.992.446	6.195.682.549	8.894.480.752
Total Ekuitas	354.173.007	271.151.078	292.181.288	750.269.594	998.932.489
Cad. Primer	53.810.809	133.426.204	233.576.099	189.451.580	264.356.589
Cad. Sekunder	198.945.450	189.737.805	807.326.839	1.386.296.854	1.371.517.487
Peny. Kredit	1.957.649.634	2.730.618.878	3.894.873.806	4.210.950.025	6.696.489.775
Inv. Jk. Panjang	8.112.585	19.999.002	20.852.452	43.412.962	53.581.471
Inv. dlm AT	73.786.188	120.256.498	128.363.250	365.571.928	508.535.510

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.9, tampak bahwa semua data mengalami kenaikan berturut-turut dari tahun 1990 sampai dengan 1994. Kelompok penyaluran dana, yaitu cadangan primer pada tahun 1993 mengalami penurunan yang pada tahun selanjutnya meningkat kembali.

#### 10) PT. Bank Duta

Bank Duta didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1966 dengan nama PT. Bank Dharma Ekonomi, yang mulai tahun 1969 berubah menjadi PT. Bank Duta Ekonomi, dan akhirnya pada tahun 1985 mulai berganti nama menjadi PT.

Bank Duta. Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1975 Bank Duta melakukan merger dengan PT. Bank Dwikora Pontianak, sedangkan merger dengan PT. Bank Sarma Surabaya terjadi pada tahun 1976. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Januari 1978, Bank Duta menjadi Bank Devisa.

Bank Duta mulai *go public* tanggal 12 April 1990, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 27.500.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 8.000,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 19,56% dari 140.596.538 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk penganalisisan lebih lanjut, diperlihatkan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10

Sebagian Data Neraca Bank Duta  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	2.500.683.757	2.715.945.603	2.705.067.020	2.518.110.004	2.431.528.693
Total Ekuitas	183.959.948	228.639.498	240.952.247	216.931.993	391.041.406
Cad. Primer	402.036.810	218.209.108	48.139.837	50.614.116	55.362.502
Cad. Sekunder	363.675.769	573.529.550	891.731.835	927.563.669	549.634.830
Peny. Kredit	1.553.553.921	1.704.719.605	1.562.909.385	1.310.088.860	1.545.731.457
Inv. Jk. Panjang	22.874.910	30.068.620	22.477.710	24.737.709	22.126.521
Inv. dlm AT	158.542.347	189.418.720	179.808.253	205.105.650	258.673.383

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.10, tampak bahwa total aktiva mengalami penurunan, tetapi penyaluran kreditnya mengalami kenaikan

dari tahun 1990 ke 1994. Sedangkan yang lainnya, yaitu total ekuitas, kelompok penyaluran dana yang terdiri dari cadangan primer, cadangan sekunder, investasi jangka panjang dan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris keadaannya berfluktuasi, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang dimulai pada tahun 1990 dan berakhir pada tahun 1994.

#### 11) PT. Bank Umum Nasional (BUN)

BUN mulai berdiri di Jakarta pada tanggal 2 September 1952. Sejak bulan November 1954, BUN berubah status menjadi Bank Devisa.

BUN *go public* mulai tanggal 26 Mei 1990, dengan melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama sejumlah 8.000.000 lembar yang bernilai nominal Rp. 1.000,00 dengan harga penawaran Rp. 9.000,00 per lembar saham. Apabila dilihat dari proporsinya, jumlah saham yang ditawarkan tersebut besarnya 8,16% dari 98.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk penganalisisan lebih lanjut, diperlihatkan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11  
 Sebagian Data Neraca BUN  
 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 1990-1994  
 (dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994
Total Aktiva	2.722.899.783	2.942.525.903	2.994.438.005	4.017.807.000	5.547.823.000
Total Ekuitas	192.113.701	205.988.923	221.248.848	237.181.000	270.270.000
Cad. Primer	363.112.432	488.033.744	411.434.861	108.675.000	147.519.000
Cad. Sekunder	135.608.827	205.467.117	244.977.884	1.047.226.000	1.140.098.306
Peny. Kredit	2.131.125.482	2.127.710.648	2.187.362.289	2.603.280.000	4.237.129.000
Inv. Jk. Panjang	4.343.320	4.893.320	4.882.695	4.883.000	9.896.000
Inv. di AT	88.709.722	116.421.074	145.780.276	253.743.000	317.987.000

Sumber : Bursa Efek Surabaya.

Dari Tabel 5.11, tampak bahwa kenaikan terjadi pada total aktiva, total ekuitas dan kelompok penyaluran dana yang terdiri dari cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang dan investasi dalam ak aktiva tetap dan inventaris. Kenaikan ini mulai tampak berturut-turut yang dimulai dari tahun 1990 dan berakhir pada tahun 1994. Sedangkan penyaluran dana yang berbentuk cadangan primer mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini terlihat pada tahun 1991 dan 1994 mengalami kenaikan, dan pada tahun 1992 dan 1993 mengalami penurunan.

## 5.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan kebutuhan modal minimum yang harus disediakan oleh semua bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) bagi setiap bank didasarkan

pada standar yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement (BIS), yang diperkuat dengan dikeluarkannya paket deregulasi tanggal 27 Februari 1991 (Pakfeb'91). Ketentuan CAR menurut Pakfeb'91 dapat dipenuhi oleh pihak perbankan secara bertahap, yaitu 5 % pada akhir Maret 1992, 7 % pada akhir Maret 1993 dan 8 % pada akhir Desember 1993.

Berdasarkan hasil perhitungan CAR yang telah dilakukan, selanjutnya diperlihatkan perkembangan CAR bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990 hingga 1994. Perkembangan CAR tersebut tampak pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12

Hasil Perhitungan CAR  
Bank-Bank yang Go Public Di Bursa Efek Surabaya  
untuk tahun 1990 sampai dengan 1994  
(dalam prosentase)

No.	Nama Bank	1990	1991	1992	1993	1994
1.	Lippo	6.12	5.86	5.33	7.82	6.32
2.	Surya	13.84	10.74	9.36	9.10	8.86
3.	BII	10.19	9.43	8.83	7.22	5.55
4.	Niaga	4.87	5.12	5.65	6.31	5.13
5.	Danamon	8.98	7.92	7.27	6.69	7.26
6.	BUN	7.06	7.00	7.39	5.90	4.87
7.	Bali	8.30	8.84	8.94	7.86	7.25
8.	Tamara	11.84	9.09	8.57	5.33	7.92
9.	BDNI	11.09	8.49	6.82	12.11	11.23
10.	Duta	7.36	8.12	8.91	8.62	16.08
11.	Panin	7.62	15.67	13.14	10.06	10.46

Sumber : Data diolah.

Dari Tabel 5.12 terlihat bahwa standar kebutuhan modal minimum (CAR) yang dikenakan oleh pihak BI kepada setiap bank sampai dengan akhir tahun 1994, sebagian besar



bank mampu memenuhinya. Nilai CAR yang terendah dimiliki oleh Bank Niaga pada tahun 1990, yaitu sebesar 4,87 %. Sedangkan nilai CAR tertinggi dicapai oleh Bank Duta pada tahun 1994, yaitu sebesar 16,08 %.

### 5.3 Penyaluran Dana

Penyaluran atau penggunaan dana bank merupakan semua kegiatan bank yang tercermin dari Neraca bank sebelah aktiva dan berkaitan dengan bagaimana bank menggunakan atau mengalokasikan kembali dana yang diperoleh dari sumber dana bank (sebelah pasiva bank) dengan berbagai alternatif untuk memaksimalkan laba. Penyaluran dana ini terdiri dari beberapa komposisi, yaitu : cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris.

Semua komposisi penyaluran dana ini dihitung dengan cara dicari masing-masing prosentasenya dari total aktiva.

#### 5.3.1 Cadangan Primer

Cadangan primer merupakan prioritas paling tinggi yang harus tetap di jaga oleh pihak bank, karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.

Cadangan primer ditentukan dengan cara mencari prosentase cadangan primer tersebut terhadap total aktiva untuk masing-masing bank. Hasil perhitungan prosentase cadangan primer terhadap total aktiva untuk semua bank yang

diteliti selama periode 31 Desember 1990 hingga 1994, diperlihatkan pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13

Hasil Perhitungan Cadangan Primer  
Bank-Bank yang Go Public Di Bursa Efek Surabaya  
untuk tahun 1990 sampai dengan 1994  
(dalam prosentase)

No.	Nama Bank	1990	1991	1992	1993	1994
1.	Lippo	4.09	3.86	2.51	2.49	2.78
2.	Surya	6.17	10.91	4.88	3.49	3.05
3.	BII	10.67	2.56	2.43	2.23	1.65
4.	Niaga	2.87	2.95	2.54	2.62	2.77
5.	Danamon	2.27	3.00	2.91	2.23	2.34
6.	BUN	13.34	16.59	13.74	2.71	2.66
7.	Bali	2.77	2.43	2.59	2.24	2.70
8.	Tamara	4.38	3.79	2.47	1.63	2.20
9.	BDNI	2.35	4.18	5.45	3.06	2.97
10.	Duta	16.08	8.03	1.78	2.01	2.28
11.	Panin	4.57	2.96	2.24	2.02	2.33

Sumber : Data diolah.

Dari Tabel 5.13, tampak bahwa besarnya prosentase cadangan primer terhadap total aktivasnya menunjukkan angka yang bervariasi dan mendekati stabil pada tahun 1993 dan 1994. Prosentase cadangan primer terhadap total aktiva terendah dimiliki oleh Bank Tamara sebesar 1,63 % yang terjadi pada tahun 1993. Sedangkan prosentase tertinggi dimiliki oleh BUN pada tahun 1991, yaitu sebesar 16,59 %.

### 5.3.2 Cadangan Sekunder

Cadangan sekunder merupakan prioritas berikutnya yang harus dipenuhi pihak bank setelah pemenuhan cadangan primer dilakukan. Pemenuhan cadangan sekunder ini menyangkut masalah likuiditas dan rentabilitas yang harus dipertahankan pihak bank.

Cadangan sekunder ditentukan dengan cara mencari prosentase cadangan sekunder tersebut terhadap total aktiva untuk masing-masing bank. Hasil perhitungan prosentase cadangan sekunder terhadap total aktiva untuk semua bank yang diteliti selama periode 31 Desember 1990 hingga 1994, diperlihatkan pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14

Hasil Perhitungan Cadangan Sekunder  
Bank-Bank yang Go Public Di Bursa Efek Surabaya  
untuk tahun 1990 sampai dengan 1994  
(dalam prosentase)

No.	Nama Bank	1990	1991	1992	1993	1994
1.	Lippo	26.79	29.91	35.58	22.14	16.49
2.	Surya	4.11	12.49	27.06	29.14	22.55
3.	BII	5.24	8.11	17.50	28.60	22.55
4.	Niaga	8.96	11.33	17.95	19.54	16.15
5.	Danamon	21.73	7.91	17.67	20.96	19.92
6.	BUN	4.98	6.98	8.18	26.06	15.04
7.	Bali	25.97	23.59	28.03	18.52	16.88
8.	Tamara	5.88	10.24	19.43	28.32	10.33
9.	BDNI	8.68	5.94	18.84	22.38	15.42
10.	Duta	14.54	21.12	32.97	36.84	22.61
11.	Panin	19.31	27.85	49.86	43.86	32.86

Sumber : Data diolah.

Dari Tabel 5.14, tampak bahwa besarnya prosentase cadangan sekunder terhadap total aktiva menunjukkan hasil yang bervariasi. Prosentase cadangan primer terhadap total aktiva terendah dimiliki oleh Bank Surya sebesar 4,11 % yang terjadi pada tahun 1990. Sedangkan prosentase tertinggi dimiliki oleh Panin Bank pada tahun 1992, yaitu sebesar 49,86 %.

### 5.3.3 Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang membutuhkannya setelah tingkat likuiditas yang dimiliki bank cukup memadai. Dengan menyalurkan kredit kepada para nasabahnya, pihak bank akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga.

Penanaman dana dalam bentuk kredit ini umumnya kurang likuid dan lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan penanaman dana dalam bentuk cadangan sekunder.

Penyaluran kredit ditentukan dengan cara mencari prosentase penyaluran kredit tersebut terhadap total aktiva untuk masing-masing bank. Hasil perhitungan prosentase penyaluran kredit terhadap total aktiva untuk semua bank yang diteliti selama periode 31 Desember 1990 hingga 1994, diperlihatkan pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15

Hasil Perhitungan Penyaluran Kredit  
Bank-Bank yang Go Public Di Bursa Efek Surabaya  
untuk tahun 1990 sampai dengan 1994  
(dalam prosentase)

No.	Nama Bank	1990	1991	1992	1993	1994
1.	Lippo	61.81	59.02	55.22	68.98	75.35
2.	Surya	63.22	62.61	65.35	64.94	70.99
3.	BII	77.22	82.34	74.29	64.53	71.92
4.	Niaga	82.76	80.18	73.32	72.07	75.79
5.	Danamon	69.33	80.21	71.36	69.43	70.63
6.	BUN	78.27	72.31	73.05	64.79	76.39
7.	Bali	65.30	65.20	58.65	67.72	70.00
8.	Tamara	83.79	78.38	68.57	64.09	81.90
9.	BDNI	85.40	85.49	72.23	67.97	75.29
10.	Duta	62.13	62.77	57.78	52.03	63.57
11.	Panin	71.30	62.50	41.20	48.15	59.70

Sumber : Data diolah.

Dari Tabel 5.15, tampak bahwa besarnya prosentase penyaluran kredit terhadap total aktiva menunjukkan hasil yang bervariasi. Penyaluran kredit terendah dilakukan oleh Panin Bank pada tahun 1992, yaitu sebesar 41,20 %. Sedangkan penyaluran kredit tertinggi dilakukan oleh BDNI pada tahun 1991, yaitu sebesar 85,49 %.

#### 5.3.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka lebih dari satu tahun dengan maksud untuk memperoleh pendapatan. Investasi ini dilakukan setelah pemenuhan dalam bentuk cadangan primer, cadangan sekunder dan penyaluran kredit dilakukan pihak bank.

Investasi jangka panjang ditentukan dengan cara mencari prosentase investasi jangka panjang tersebut terhadap total aktiva untuk masing-masing bank. Hasil perhitungan prosentase investasi jangka panjang terhadap total aktiva untuk semua bank yang diteliti selama periode 31 Desember 1990 hingga 1994, diperlihatkan pada Tabel 5.16.

**Tabel 5.16**  
**Hasil Perhitungan Investasi Jangka Panjang**  
**Bank-Bank yang Go Public Di Bursa Efek Surabaya**  
**untuk tahun 1990 sampai dengan 1994**  
**(dalam prosentase)**

No.	Nama Bank	1990	1991	1992	1993	1994
1.	Lippo	0.90	0.84	0.68	0.60	0.65
2.	Surya	25.60	13.09	0.71	0.74	1.50
3.	BII	5.23	2.86	0.89	0.28	0.31
4.	Niaga	2.46	2.46	1.94	2.19	2.29
5.	Danamon	0.25	0.21	0.16	0.77	0.31
6.	BUN	0.16	0.17	0.16	0.12	0.19
7.	Bali	0.65	1.15	1.33	1.06	1.02
8.	Tamara	0.01	0.54	1.64	0.92	0.86
9.	BDNI	0.35	0.63	0.49	0.70	0.60
10.	Duta	0.91	1.11	0.83	0.98	0.91
11.	Panin	1.29	0.96	1.10	0.84	0.79

Sumber : Data diolah.

Dari Tabel 5.16, tampak bahwa besarnya prosentase investasi jangka panjang terhadap total aktiva menunjukkan hasil yang bervariasi dan mendekati angka yang stabil mulai tahun 1992. Investasi jangka panjang terendah dilakukan oleh Tamara Bank pada tahun 1990 sebesar 0,01 %. Sedangkan investasi jangka panjang tertinggi dilakukan oleh Bank Surya sebesar 25,60 % pada tahun 1990.

### 5.3.5 Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris

Penanaman dana terakhir dilakukan pihak bank untuk aktiva tetap dan inventarisnya. Hal ini dilakukan untuk lebih memperlancar aktivitas bank sehari-hari sebagai sebuah lembaga keuangan.

Investasi dalam aktiva tetap dan inventaris ditentukan dengan cara mencari prosentase investasi dalam aktiva tetap dan inventaris tersebut terhadap total aktiva untuk masing-masing bank. Hasil perhitungan prosentase investasi dalam aktiva tetap dan inventaris terhadap total aktiva untuk semua bank yang diteliti selama periode 31 Desember 1990 hingga 1994, diperlihatkan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17

Hasil Perhitungan Investasi dalam AT & Inventaris  
Bank-Bank yang Go Public Di Bursa Efek Surabaya  
untuk tahun 1990 sampai dengan 1994  
(dalam prosentase)

No.	Nama Bank	1990	1991	1992	1993	1994
1.	Lippo	6.42	7.13	6.01	5.80	4.73
2.	Surya	0.90	0.90	2.00	1.70	1.92
3.	BII	1.63	4.14	4.89	4.37	3.58
4.	Niaga	2.96	3.08	4.26	3.58	3.00
5.	Danamon	6.42	8.68	7.91	6.62	6.81
6.	BUN	3.26	3.96	4.87	6.32	5.73
7.	Bali	5.32	7.63	9.40	10.47	9.40
8.	Tamara	4.95	7.05	7.89	5.06	4.72
9.	BDNI	3.22	3.77	3.00	5.90	5.72
10.	Duta	6.34	6.97	6.65	8.15	10.64
11.	Panin	3.52	5.74	5.61	5.14	4.31

Sumber : Data diolah.

Dari Tabel 5.17, tampak bahwa besarnya prosentase investasi dalam aktiva tetap dan inventaris terhadap total aktiva menunjukkan hasil yang bervariasi. Investasi dalam aktiva tetap dan inventaris terendah dilakukan oleh Bank Surya pada tahun 1990 dan 1991, yaitu sebesar 0,90 %. Sedangkan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris tertinggi dilakukan oleh Bank Bali pada tahun 1993, yaitu sebesar 10,47 %.



## **BAB 6**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **6.1 Pembuktian Hipotesis**

Data yang diperoleh dari penelitian di Bursa Efek Surabaya yang berada di Bab 5 pada Tabel 5.12 sampai dengan Tabel 5.17, kemudian dianalisis dengan menggunakan model *Selisih Dua Rata-Rata dari Kelompok Data Observasi Berpasangan (Difference between Means : Paired Observation)*. Dilanjutkan dengan uji t (uji dua arah) yang mempunyai tingkat kebermaknaan 5 %.

Analisis dilakukan hanya mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 (empat tahun), dengan pembagian dua tahun pertama (tahun 1990 dan 1991) merupakan data sebelum ketentuan CAR berlaku dan dua tahun terakhir (tahun 1992 dan 1993) merupakan data sesudah ketentuan CAR diberlakukan. Sedangkan untuk data tahun 1994, digunakan untuk membandingkan dan mengetahui perkembangan CAR serta komposisi penyaluran dana untuk masa-masa mendatang.

Agar hasil perhitungan yang diperoleh keakuratannya lebih terjamin, maka dalam penelitian ini untuk perhitungannya tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan Komputer program Microstat, yang tampak pada lampiran 2 sampai dengan lampiran 7.

### 6.1.1 Pengujian Hipotesis Kesatu

Hasil pengujian CAR bank sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, diperlihatkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Pengujian Hipotesis CAR  
Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91

Keterangan	Periode	
	1990 - 1991	1992 - 1993
$\Sigma X$	96,775	88,115
n	11	11
$\bar{X}$	8,80	8,01
Mean	0,7873	
Sd	1,4887	
$t_o$	1,7540	
$t_t$	± 2,23	

Sumber : diolah dari Lampiran 1, 2 dan 3

Dari Tabel 6.1, terlihat penurunan CAR rata-rata bank pada periode sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dibandingkan periode sebelumnya. Rata-rata CAR sesudah Pakfeb'91 turun dari sebesar 8,80 % menjadi sebesar 8,01 %, atau turun sebesar 0,79 %. Sedangkan standar deviasi (Sd) dari perbedaan rata-rata CAR tersebut adalah sebesar 1,4887. Berdasarkan nilai-nilai pada tabel diatas, nilai  $t_{\text{observasi}}$  besarnya 1,7540. Nilai  $t_{\text{observasi}}$  tersebut ternyata lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}}$  (2,23), yang berarti terdapat perbedaan rata-rata sebesar 0,476, sehingga hipotesis alternatif ditolak, dan hipotesis nol diterima. Hal ini

berarti bahwa CAR rata-rata sesudah Pakfeb'91 sama dengan CAR rata-rata sebelum Pakfeb'91.

Dengan demikian, hipotesis kesatu yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan persentase nilai CAR pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 tidak terbukti dengan probabilitas kesalahan lebih dari 5 % (5,5 %).

### 6.1.2 Pengujian Hipotesis Kedua yang Kesatu

Hasil pengujian penyaluran dana bank dalam bentuk cadangan primer sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, diperlihatkan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2

Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Cadangan Primer)  
Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91

Keterangan	Periode	
	1990 - 1991	1992 - 1993
$\Sigma X$	65,410	35,135
n	11	11
$\bar{X}$	5,95	3,19
Mean	2,7523	
Sd	3,3582	
$t_o$	2,7182	
$t_t$	± 2,23	

Sumber : diolah dari Lampiran 1, 2 dan 4

Dari Tabel 6.2, terlihat penurunan cadangan primer rata-rata bank pada periode sesudah diberlakukannya

Pakfeb'91 dibandingkan periode sebelumnya. Rata-rata Cadangan Primer sesudah Pakfeb'91 turun dari sebesar 5,95 % menjadi sebesar 3,19 %, atau turun sebesar 2,76 %. Sedangkan standar deviasi (Sd) dari perbedaan rata-rata Cadangan Primer tersebut adalah sebesar 3,3582. Berdasarkan nilai-nilai pada tabel diatas, nilai  $t_{\text{observasi}}$  besarnya 2,7182. Nilai  $t_{\text{observasi}}$  tersebut ternyata lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  (2,23). yang berarti terdapat perbedaan rata-rata sebesar 0,4882, sehingga hipotesis alternatif diterima, dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti bahwa Cadangan Primer rata-rata sesudah Pakfeb'91 berbeda (lebih rendah) dari Cadangan Primer rata-rata sebelum Pakfeb'91.

Dengan demikian, hipotesis kedua yang kesatu yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan persentase nilai cadangan primer pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 terbukti dengan probabilitas kesalahan kurang dari 5 % (1,08 %).

### 6.1.3 Pengujian Hipotesis Kedua yang Kedua

Hasil pengujian penyaluran dana bank dalam bentuk cadangan sekunder sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, diperlihatkan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3

Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Cadangan Sekunder)  
Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91

Keterangan	Periode	
	1990 - 1991	1992 - 1993
$\Sigma X$	155,830	284,710
$n$	11	11
$\bar{X}$	10,53	25,88
Mean	-11,7168	
Sd	7,9459	
$t_o$	-4,8906	
$t_t$	± 2,23	

Sumber : diolah dari Lampiran 1, 2 dan 5

Dari Tabel 6.3, terlihat peningkatan cadangan sekunder rata-rata bank pada periode sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dibandingkan periode sebelumnya. Rata-rata Cadangan Sekunder sesudah Pakfeb'91 naik dari sebesar 10,53 % menjadi sebesar 25,88 % atau naik sebesar 15,35 %. Sedangkan standar deviasi (Sd) dari perbedaan rata-rata Cadangan Sekunder tersebut adalah sebesar 7,9459. Berdasarkan nilai-nilai pada tabel diatas, nilai  $t_{\text{observasi}}$  besarnya -4,8906. Nilai  $t_{\text{observasi}}$  tersebut ternyata lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}}$  (2,23), yang berarti terdapat perbedaan rata-rata sebesar 2.6606, sehingga hipotesis alternatif diterima, dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti bahwa Cadangan Sekunder rata-rata sesudah Pakfeb'91 berbeda (lebih tinggi) dari Cadangan Sekunder rata-rata sebelum Pakfeb'91.

Dengan demikian, hipotesis kedua yang kedua yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan persentase nilai cadangan sekunder pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 terbukti dengan probabilitas kesalahan kurang dari 5 % (0,00 %).

#### 6.1.4 Pengujian Hipotesis Kedua yang Ketiga

Hasil pengujian penyaluran dana bank dalam bentuk penyaluran kredit sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, diperlihatkan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4

Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Penyaluran Kredit) Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91

Keterangan	Periode	
	1990 - 1991	1992 - 1993
$\Sigma X$	795,770	707,860
$n$	11	11
$\bar{X}$	72,34	64,35
Mean	7,9918	
Sd	7,4688	
$t_o$	3,5489	
$t_t$	± 2,23	

Sumber : diolah dari Lampiran 1, 2 dan 6

Dari Tabel 6.4, terlihat penurunan penyaluran kredit rata-rata bank pada periode sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dibandingkan periode sebelumnya. Rata-rata

Penyaluran Kredit sesudah Pakfeb'91 turun dari sebesar 72,34 % menjadi sebesar 64,35 %, atau turun sebesar 7,99 %. Sedangkan standar deviasi (Sd) dari perbedaan rata-rata Penyaluran Kredit tersebut adalah sebesar 7,4688. Berdasarkan nilai-nilai pada tabel diatas, nilai  $t_{\text{observasi}}$  besarnya 3,5489. Nilai  $t_{\text{observasi}}$  tersebut ternyata lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  (2,23), yang berarti terdapat perbedaan rata-rata sebesar 1,3189, sehingga hipotesis alternatif diterima, dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti bahwa Penyaluran Kredit rata-rata sesudah Pakfeb'91 berbeda (lebih rendah) dari Penyaluran Kredit rata-rata sesudah Pakfeb'91.

Dengan demikian, hipotesis kedua yang ketiga yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan persentase nilai penyaluran kredit pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 terbukti dengan probabilitas kesalahan kurang dari 5 % (0,00 %).

#### 6.1.5 Pengujian Hipotesis Kedua yang Keempat

Hasil pengujian penyaluran dana bank dalam bentuk investasi jangka panjang sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, diperlihatkan pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5

Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Inv. Jk. Panjang)  
Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91

Keterangan	Periode	
	1990 - 1991	1992 - 1993
$\Sigma X$	30,915	9,565
n	11	11
$\bar{X}$	2,81	0,87
Mean	1,9409	
Sd	5,6449	
$t_o$	1,1404	
$t_t$	± 2,23	

Sumber : diolah dari Lampiran 1, 2 dan 7

Dari Tabel 6.5, terlihat penurunan Investasi Jangka Panjang rata-rata bank pada periode sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dibandingkan periode sebelumnya. Rata-rata Investasi Jangka Panjang sesudah Pakfeb'91 turun dari sebesar 2,81 % menjadi sebesar 0,87 %, atau turun sebesar 1,94 %. Sedangkan standar deviasi (Sd) dari perbedaan rata-rata Investasi Jangka Panjang tersebut adalah sebesar 5,6449. Berdasarkan nilai-nilai pada tabel diatas, nilai  $t_{observasi}$  besarnya 1,1404. Nilai  $t_{observasi}$  tersebut ternyata lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (2,23), yang berarti terdapat perbedaan rata-rata sebesar 1,0896, sehingga hipotesis alternatif ditolak, dan hipotesis nol diterima. Hal ini berarti bahwa Investasi Jangka Panjang rata-rata sesudah Pakfeb'91 sama dengan Investasi Jangka Panjang rata-rata sebelum Pakfeb'91.



Dengan demikian, hipotesis kedua yang keempat yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan persentase nilai investasi jangka panjang pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 tidak terbukti dengan probabilitas kesalahan lebih dari 5 % (14,04 %).

#### 6.1.6 Pengujian Hipotesis Kedua yang Kelima

Hasil pengujian penyaluran dana bank dalam bentuk investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, diperlihatkan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6  
Pengujian Hipotesis Penyaluran Dana (Inv. dlm AT & Inventaris)  
Sebelum dan Sesudah Pakfeb'91

Keterangan	Periode	
	1990 - 1991	1992 - 1993
$\Sigma X$	51,995	62,800
n	11	11
$\bar{X}$	4,73	5,71
Mean	-0,9823	
Sd	1,1464	
$t_o$	-2,8419	
$t_t$	± 2,23	

Sumber : diolah dari Lampiran 1, 2 dan 8

Dari Tabel 6.6, terlihat peningkatan Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris rata-rata bank pada periode sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dibandingkan periode

sebelumnya. Rata-rata investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sesudah Pakfeb'91 naik dari sebesar 4,73 % menjadi sebesar 5,71 %, atau naik sebesar 0,98 %. Sedangkan standar deviasi (Sd) dari perbedaan rata-rata Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris tersebut adalah sebesar 1,1464. Berdasarkan nilai-nilai pada tabel diatas, nilai  $t_{\text{observasi}}$  besarnya -2,8419. Nilai  $t_{\text{observasi}}$  tersebut ternyata lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}}$  (2,23), yang berarti terdapat perbedaan rata-rata sebesar 0,6119, sehingga hipotesis alternatif diterima, dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti bahwa Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris rata-rata sesudah Pakfeb'91 berbeda (lebih tinggi) dari Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris rata-rata sebelum Pakfeb'91.

Dengan demikian, hipotesis kedua yang kelima yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan persentase nilai investasi dalam aktiva tetap dan inventaris pada bank-bank yang telah go public sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 terbukti dengan probabilitas kesalahan kurang dari 5 % (0,00 %).

Dari keseluruhan pengujian hipotesis mulai dari hipotesis kesatu hingga hipotesis kedua yang kelima yang telah dilakukan, dapatlah dibuat rangkuman yang diperlihatkan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7  
Rangkuman Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis	Variabel	Hipotesis nol ( $H_0$ )	Hipotesis alternatif ( $H_a$ )	Keterangan
Kesatu	CAR	diterima	ditolak	$t_o ( 1,7540) < t_t ( 2,23)$
Kedua (1)	Cad.Primer	ditolak	diterima	$t_o ( 2,7182) > t_t ( 2,23)$
Kedua (2)	Cad.Sekunder	ditolak	diterima	$t_o (-4,8906) < t_t (-2,23)$
Kedua (3)	Peny.Kredit	ditolak	diterima	$t_o ( 3,5489) > t_t ( 2,23)$
Kedua (4)	Inv.Jk.Panjang	diterima	ditolak	$t_o ( 1,1404) < t_t ( 2,23)$
Kedua (5)	Inv.dlm.AT	ditolak	diterima	$t_o (-2,8419) < t_t (-2,23)$

Dari uraian di atas telah dibuktikan ada tidaknya perbedaan antara CAR dan komposisi penyaluran dana yang terdiri dari cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91.

Pembuktian secara statistik hanya mampu untuk menjelaskan terjadi perbedaan atau tidak terjadi perbedaan suatu peristiwa. Namun statistik tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya, untuk itu diperlukan analisis yang lebih rinci melalui analisis kualitatif berdasarkan data penunjang lainnya yang dianggap cukup relevan dapat dipakai sebagai alasan.

Berikut ini diberikan analisis kualitatif untuk menunjang alasan terjadinya perbedaan atau tidak terjadinya perbedaan dimaksud.

## 6.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Bank-bank swasta dewasa ini telah menunjukkan peranan yang lebih besar, baik dalam hal mobilisasi dana maupun penyaluran kredit. Tanpa adanya bank swasta yang beroperasi di Indonesia, bank pemerintah tidak merasa tertantang untuk meningkatkan usaha dan kinerjanya, sehingga kesan monoton dalam mengelola usahanya akan tampak dengan jelas, yang otomatis membosankan dan tidak menunjukkan kemajuan untuk menunjang pembangunan menuju era globalisasi dan pasar bebas. Adanya bank-bank swasta yang beroperasi, justru menyegarkan iklim perbankan, sehingga persaingan untuk memajukan usaha perbankan sebagai lembaga keuangan menjadi semakin sehat dan kompetitif.

Deregulasi, sebagai salah satu bentuk peraturan untuk penyempurnaan operasi perbankan mempunyai makna yang dalam pada kehidupan perbankan itu sendiri, tidak saja merubah cara berfikir serta pola tindak, tetapi juga mengambil sikap dan keputusan yang dianggap sesuai dengan arah dan tujuan deregulasi. Secara material langkah deregulasi telah membuahkan sikap efisien, kerja keras, profesional, menghargai waktu dan berfikir produktif. Salah satu deregulasi yang dikeluarkan oleh BI pada tanggal 27 Februari 1991 (Pakfeb'91) yang berupa ketentuan pemenuhan modal minimum (CAR), merupakan langkah untuk menyederhanakan besarnya modal minimum yang wajib dipenuhi oleh pihak perbankan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan kebutuhan modal minimum melalui Pakfeb'91, penulis menganalisis ketentuan kebutuhan modal minimum (CAR) tersebut dengan membandingkannya terhadap komposisi penyaluran dana.

### 6.2.1 Hasil Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)

Berdasarkan Tabel 5.12 pada bab terdahulu, diperlihatkan bahwa sampai dengan akhir tahun 1994, sebagian besar bank-bank yang go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 mampu memenuhi standar ketentuan kebutuhan modal minimum (CAR) sesuai dengan ketetapan BI. Sampai dengan akhir 1992 (CAR harus mampu dipenuhi minimal sebesar 5 % pada akhir Maret 1992) semua bank mampu menghasilkan CAR di atas 5 %. Nilai CAR terendah diraih oleh Lippo Bank (5,33 %) dan tertinggi diraih oleh Panin Bank (13,14 %). Pada tahap berikutnya, yaitu pemenuhan standar CAR minimal sampai dengan akhir 1993 yang besarnya 8 %, tidak semua bank mampu memenuhinya. Diperlihatkan beberapa bank yang tidak mampu memenuhinya, antara lain Lippo Bank (7,82 %), BII ( 7,22 %), Bank Niaga (6,31 %), Bank Danamon (6,69 %), BUN (5,90 %), Bank Bali (7,86 %) dan Tamara Bank (5,33 %). Keadaan ini berlanjut pada tahun 1994, dimana besarnya CAR yang dapat dipenuhi untuk Lippo Bank 6,32 %, BII 5,55 %, Bank Danamon 7,26 %, BUN 4,87 %, Bank Bali 7,25% dan Tamara Bank 7,92 %.

Bank-bank go public yang lain untuk tahun 1993 dan 1994 telah mampu memenuhi standar yang ditentukan BI. Bank-

bank yang dimaksud, adalah Bank Surya (9,10 % dan 8,86 %), BDN (12,11 % dan 11,23 %), Bank Duta (8,62 % dan 16,08 %) dan Panin Bank (10,06 % dan 10,46 %).

Hasil perhitungan CAR ini apabila dihitung juga rata-ratanya, diperlihatkan pada lampiran 1. Rata-rata CAR yang diperoleh bank-bank yang go public sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 8,80 %, sedangkan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 8,01 %. Selain itu juga tampak urutan peringkat menurut besarnya CAR. Sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, peringkat pertama diduduki oleh Bank Surya dengan CAR rata-rata 12,29 % dan peringkat terakhir diduduki oleh Bank Niaga dengan CAR rata-rata 4,995 %. Sedangkan setelah Pakfeb'91 diberlakukan, peringkat pertama diduduki oleh Panin Bank dengan CAR rata-rata 11,06 % dan peringkat terakhir tetap diduduki oleh Bank Niaga dengan CAR rata-rata yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu 5,48 %.

Dari Tabel 6.8, diperlihatkan hasil perhitungan CAR bank-bank yang go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 yang dibuat oleh Majalah Swa untuk akhir tahun 1995.

Tabel 6.8

**Daftar Peringkat Bank-Bank Yang Telah Go Public  
Menurut Pembobotan Kinerja  
Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 1995**

Peringkat	Nama Bank	CAR (%)	ROBA (%)	LCDR (%)	Aset (Rp. Juta)
<b>ASET DI ATAS RP. 10 TRILIUN</b>					
1	Bank Internasional Indonesia (BII)	7,35	2,51	98,72	12.899.881
2	Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)	8,29	1,86	127,66	12.435.865
3	Bank Danamon Indonesia	6,11	1,54	95,98	14.815.188
<b>ASET RP. 1 - 10 TRILIUN</b>					
8	Bank Bali	7,81	2,55	103,88	6.334.454
13	Lippo Bank	6,14	2,13	188,66	7.629.579
16	Pania Bank	11,72	2,97	110,53	4.173.372
19	Bank Surya	13,14	2,48	84,49	1.123.658
22	Tanara Bank	6,78	1,99	189,32	2.859.455
25	Bank Niaga	4,45	1,68	181,39	6.587.343
26	Bank Duta	10,81	1,76	106,37	3.287.965
31	Bank PDPCI	11,66	2,37	257,89	1.544.221
32	Bank Umum Nasional (BUN)	4,72	1,67	183,78	5.988.569
39	Ficorinvest Bank	6,91	1,55	168,57	1.897.271
<b>ASET RP. DIBAWAH RP. 1 TRILIUN</b>					
161	Inter-Pasifik Bank	10,68	2,69	293,14	866.850

Sumber : Majalah Swa 10/XII/11-31 JULI/1996

Dari Tabel 6.8, terlihat bahwa pihak bank semakin mampu untuk memenuhi standar CAR sesuai dengan standar yang ditetapkan BI, walaupun ada beberapa bank yang mengalami penurunan yang cukup menyolok dalam CAR-nya, seperti Bank Niaga (4,45 %) dan BUN (4,72 %).

Tidak berubahnya CAR yang diperoleh bank-bank yang go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 dengan sesudahnya, disebabkan

pihak bank tersebut telah memenuhinya tanpa menunggu standar yang dikeluarkan BI dengan kesadaran penuh bahwa dengan semakin tingginya CAR yang diperoleh akan semakin baik permodalan yang dimiliki pihak bank. Keadaan ini mempunyai arti bahwa bank semakin mampu menutupi penurunan aktiva akibat kerugian yang terjadi dengan menggunakan modal sendirinya (ekuitas).

Penetapan ketentuan prudensial yang dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan sistem perbankan yang sehat dikenal dengan sebutan Pakfeb'91 (28 Februari 1991). Ketentuan ini antara lain diberlakukannya standar Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPPM) sesuai dengan yang disarankan oleh Bank for International Settlement (BIS), dilakukan untuk mendorong bank-bank memperbaiki manajemen, menerapkan strategi bisnis yang komprehensif dan sehat serta meningkatkan efektivitas sistem operasi sebuah bank.

Ketentuan modal minimum (CAR) berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva produktif yang mengandung resiko serta untuk membiayai penanaman dalam benda tetap dan inventaris.

Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh BIS, Bank Indonesia berdasarkan Pakfeb'91 mewajibkan setiap bank menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Ketentuan tersebut harus telah terpenuhi selambat-lambatnya pada akhir tahun 1993. Tetapi,



BI memberikan kesempatan kepada pihak perbankan untuk melakukan penyesuaian permodalannya dengan pemenuhan bertahap, yaitu 5% untuk akhir Maret 1992, 7% untuk Maret 1993 dan 8% pada Desember 1993.

Besar kecilnya CAR suatu bank dipengaruhi oleh perbandingan komponen CAR itu sendiri. Dalam hal ini CAR dihitung dengan membandingkan total ekuitas dengan total aktiva yang dinyatakan dalam persentase. Sehingga, besar kecilnya CAR ditentukan oleh :

- a) Apabila total ekuitas bertambah sedangkan total aktiva tetap, maka nilai CAR akan bertambah besar.
- b) Apabila total ekuitas tetap sedangkan total aktiva bertambah, maka nilai CAR akan bertambah kecil.
- c) Apabila total ekuitas dan total aktiva bertambah, tetapi pertambahan total aktiva tidak sebesar pertambahan total ekuitas, maka nilai CAR akan bertambah kecil.
- d) Apabila total ekuitas dan total aktiva berkurang, tetapi pengurangan total aktiva tidak sebesar pengurangan total ekuitas, maka nilai CAR akan bertambah besar.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan untuk keluar dari kemelut pemenuhan struktur permodalan guna mencapai pemenuhan standar CAR, antara lain dengan menyuntikkan dana segar, mengurangi komposisi aktiva berbobot resiko tinggi pada struktur aktiva dan melakukan penggabungan (merger) antara dua bank atau beberapa bank. Suntikan dana segar ini dapat mempertinggi CAR pada suatu

bank, yang dapat diperoleh melalui pengumpulan dana masyarakat (giro, tabungan dan deposito yang akhir-akhir ini banyak diwarnai dengan undian berhadiah ataupun hadiah langsung), maupun melalui emisi saham di pasar modal.

### 6.2.2 Hasil Perhitungan Penyaluran Dana

Sumber dan penggunaan dana bank tercermin dari Neraca Bank. Semua kegiatan bank yang berada pada sisi pasiva mencerminkan sumber dana bank, yaitu berkaitan dengan bagaimana bank menghimpun atau memobilisasi dana dari sumber-sumber dana yang ada dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di sisi aktiva. Sedangkan kegiatan bank yang berada di sisi aktiva mencerminkan penggunaan (penyaluran) dana bank, yaitu berkaitan dengan bagaimana bank menggunakan atau mengalokasikan kembali dana tersebut dengan berbagai alternatif untuk memaksimalkan laba.

Masing-masing komponen penyaluran dana mempunyai komposisi tertentu sesuai dengan keputusan BI, yaitu 2% dari modal sendiri untuk cadangan primer, 25% untuk cadangan sekunder dan sampai dengan 80% untuk penyaluran kreditnya. Sedangkan untuk investasi jangka panjang serta investasi dalam aktiva tetap dan inventaris disesuaikan dengan kebutuhan (pertimbangan keuntungan dan resiko yang mungkin terjadi).

Berubahnya komposisi penyaluran dana sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, diakibatkan oleh :

- a. Bertambahnya aset yang dimiliki masing-masing bank, karena diperolehnya keuntungan dari hasil operasi pada tahun-tahun yang telah dilalui.
- b. Bertambahnya sumber dana yang diperoleh dari masyarakat (giro, tabungan dan deposito), karena adanya rangsangan dari pihak bank yang berupa undian berhadiah ataupun hadiah langsung, sehingga pihak bank dapat menyalurkannya lebih leluasa tanpa bermaksud melewati standar masing-masing komponen penyaluran dana yang telah ditetapkan BI.
- c. Bertambahnya investasi terutama pada aktiva tetap dan inventaris sesuai dengan perkembangan zaman menuju era globalisasi yang dihadapi perbankan, dimana dalam hal ini pihak perbankan harus mampu menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat (nasabah) untuk menginvestasikan dan meminjam dana. Investasi ini dapat berupa dibangunnya gedung baru yang lebih lengkap sarana dan prasarannya (dibuka kantor cabang baru, dibangunnya tempat ATM di kampus ataupun di pusat perbelanjaan).

#### 6.2.2.1 Cadangan Primer

Berdasarkan Tabel 5.13 pada bab terdahulu, diperlihatkan bahwa prosentase cadangan primer terhadap total aktivasinya menunjukkan angka yang bervariasi dan mendekati stabil pada tahun 1993 dan 1994, dengan rata-rata 2,60 %. Penurunan prosentase ini tampak menyolok di BII, dimana

pada tahun 1990 menunjukkan angka 10,67 % dan pada akhir 1994 hanya menjadi 1,65 %.

Hasil perhitungan cadangan primer ini apabila dihitung juga rata-ratanya, diperlihatkan pada lampiran 1. Rata-rata cadangan primer yang diperoleh bank-bank yang go public sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 5,95 %, sedangkan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 3,19 %. Selain itu juga tampak urutan peringkat menurut besarnya cadangan primer. Sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, peringkat pertama diduduki oleh BUN dengan cadangan primer rata-rata 14,965 % dan peringkat terakhir diduduki oleh Bank Bali dengan cadangan primer rata-rata 2,60 %. Sedangkan sesudah Pakfeb'91 diberlakukan, peringkat pertama tetap diduduki oleh BUN dengan cadangan primer rata-rata 8,225 % dan peringkat terakhir diduduki oleh Bank Duta dengan cadangan primer rata-rata 1,895 %.

Cadangan primer merupakan prioritas paling tinggi yang harus dipegang teguh oleh setiap bank, karena merupakan alat likuid yang harus dipelihara bank, yang sebagian digunakan untuk memenuhi Legal Reserve Requirement (LRR) dan sebagian lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Cadangan primer ini terdiri dari uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral dan bank-bank lainnya serta warkat-warkat dalam proses penagihan.

Cadangan primer yang menyangkut pemeliharaan likuiditas minimum (Legal Reserve Requirement atau LRR) diatur dalam surat edaran Bank Indonesia No. 12/66/UPPB tanggal 18 Maret 1980. LRR ini besarnya ditentukan 2% (semula 15 % dan diubah melalui surat keputusan Direksi BI No. 21/56/Kep/Dir tanggal 27 Oktober 1988 dan surat edaran BI No. 21/12/BPPP tanggal 27 Oktober 1988), yang diukur dengan membandingkan rasio alat likuid (saldo kas dan giro pada BI) dengan kewajiban yang segera dapat dibayar.

Ditetapkannya LRR oleh Bank Indonesia, mempunyai dua tujuan, yaitu :

- a. Pihak bank agar dapat menjaga posisinya yang setiap saat dalam keadaan likuid.
- b. Dalam rangka pencapaian target moneter pada perekonomian nasional, yaitu pemeliharaan besarnya money supply melalui reserve requirement. Makin besar presentase LRR, maka makin kecil money multiplier yang ditimbulkannya, demikian pula sebaliknya.

Berbedanya prosentase cadangan primer antara sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, menunjukkan bahwa pihak bank semakin memperhatikan pemeliharaan alat likuid yang dimilikinya. Hal ini berakibat pada likuiditas bank yang merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan alat likuid yang tersedia, semakin terjaga dan terpelihara.

Besar kecilnya penyaluran dana yang berbentuk cadangan primer dalam suatu bank, tergantung dari perbandingan

komponen yang membentuk cadangan primer itu sendiri. Dalam hal ini cadangan primer ditentukan persentasenya atas total aktiva. Sehingga, besar kecilnya cadangan primer ditentukan oleh :

- a) Apabila cadangan primer bertambah sedangkan total aktiva tetap, maka nilai cadangan primer dalam persentase akan bertambah besar.
- b) Apabila cadangan primer tetap sedangkan total aktiva bertambah, maka nilai cadangan primer dalam persentase akan bertambah kecil.
- c) Apabila cadangan primer dan total aktiva bertambah, tetapi pertambahan total aktiva tidak sebesar pertambahan cadangan primer, maka nilai cadangan primer dalam persentase akan bertambah kecil.
- d) Apabila cadangan primer dan total aktiva berkurang, tetapi pengurangan total aktiva tidak sebesar pengurangan cadangan primer, maka nilai cadangan primer dalam persentase akan bertambah besar.

#### 6.2.2.2 Cadangan Sekunder

Berdasarkan Tabel 5.14 pada bab terdahulu, diperlihatkan bahwa besarnya prosentase cadangan sekunder terhadap total aktiva menunjukkan hasil yang bervariasi. Kalau dilihat secara rata-rata, bahwa semua bank mempunyai cadangan sekunder yang tidak lebih dari 50 % besarnya. Cadangan sekunder terendah dimiliki oleh Bank Surya pada tahun 1990, yaitu 4,11 %. Sedangkan cadangan sekunder

tertinggi dimiliki oleh Panin Bank pada tahun 1992, yaitu 49,86 %.

Hasil perhitungan cadangan sekunder ini apabila dihitung juga rata-ratanya, diperlihatkan pada lampiran 1. Rata-rata cadangan sekunder yang diperoleh bank-bank yang go public sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 14,17 %, sedangkan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 25,88 %. Selain itu juga tampak urutan peringkat menurut besarnya cadangan sekunder. Sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, peringkat pertama diduduki oleh Lippo Bank dengan cadangan sekunder rata-rata 28,35 % dan peringkat terakhir diduduki oleh BUN dengan cadangan sekunder rata-rata 5,98 %. Sedangkan sesudah Pakfeb'91 diberlakukan, peringkat pertama tetap diduduki oleh Panin Bank dengan cadangan sekunder rata-rata 46,86 % dan peringkat terakhir tetap diduduki oleh BUN dengan cadangan sekunder rata-rata yang lebih besar, yaitu 1,895 %.

Selain kewajiban memelihara alat likuid yang diwujudkan dalam cadangan primer, perbankan masih harus memelihara cadangan sekunder yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan Sertifikat Deposito, dengan beberapa pertimbangan, antara lain :

- a. Sebelum dana masyarakat yang dihimpun digunakan oleh sektor perkreditan, untuk sementara dimanfaatkan di pasar uang atau pasar modal, baik dalam negeri maupun luar negeri agar dapat menghasilkan keuntungan, karena

untuk pemupukan dana masyarakat tersebut dikeluarkan biaya.

b. Besarnya cadangan sekunder dipengaruhi oleh :

- 1) Pertumbuhan dana masyarakat rupiah yang dihimpun.
- 2) Pertumbuhan/pola penarikan kredit oleh nasabah-nasabah debitur.

c. Dalam menjaga kemungkinan kekurangan likuiditas, selain dalam rupiah, dipelihara pula cadangan sekunder dalam valuta asing (valas). Jumlah cadangan sekunder dalam valas tersebut disebut dengan posisi long valuta asing yang bagi bank-bank devisa diperoleh melalui mekanisme ekspor-impor melalui cabang-cabangnya.

Posisi long valuta asing merupakan selisih antara aktiva valuta asing dengan pasiva valuta asing, yang apabila rekening administratif dimasukkan akan diperoleh posisi devisa netto. Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/80/Kep/Dir tanggal 25 Maret 1989, ditetapkan bahwa hanya dapat memelihara posisi devisa netto maksimum 25 % dari modal sendiri yang berlaku secara harian. Pelampauan atas posisi devisa netto tersebut dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

d. Selain untuk memenuhi likuiditas, cadangan sekunder ini juga digunakan untuk memenuhi rentabilitas bank. Sehingga sifat-sifat aktiva dari cadangan sekunder harus mudah diuangkan dan mendatangkan pendapatan bagi pemiliknya.



Besar kecilnya penyaluran dana yang berbentuk cadangan sekunder dalam suatu bank, tergantung dari perbandingan komponen yang membentuk cadangan sekunder itu sendiri. Dalam hal ini cadangan sekunder ditentukan persentasenya atas total aktiva. Sehingga, besar kecilnya cadangan sekunder ditentukan oleh :

- a) Apabila cadangan sekunder bertambah sedangkan total aktiva tetap, maka nilai cadangan sekunder dalam persentase akan bertambah besar.
- b) Apabila cadangan sekunder tetap sedangkan total aktiva bertambah, maka nilai cadangan sekunder dalam persentase akan bertambah kecil.
- c) Apabila cadangan sekunder dan total aktiva bertambah, tetapi pertambahan total aktiva tidak sebesar pertambahan cadangan sekunder, maka nilai cadangan sekunder dalam persentase akan bertambah kecil.
- d) Apabila cadangan sekunder dan total aktiva berkurang, tetapi pengurangan total aktiva tidak sebesar pengurangan cadangan sekunder, maka nilai cadangan sekunder dalam persentase akan bertambah besar.

#### 6.2.2.3 Penyaluran Kredit

Berdasarkan Tabel 5.15 pada bab terdahulu, diperlihatkan bahwa besarnya prosentase penyaluran kredit terhadap total aktiva menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan rata-rata 86 %.

Hasil perhitungan penyaluran kredit ini apabila dihitung juga rata-ratanya, diperlihatkan pada lampiran 1. Rata-rata penyaluran kredit yang diperoleh bank-bank yang go public sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 72,34 %, sedangkan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 64,35 %. Selain itu juga tampak urutan peringkat menurut besarnya penyaluran kredit. Sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, peringkat pertama diduduki oleh BDNI dengan penyaluran kredit rata-rata 85,445 % dan peringkat terakhir diduduki oleh Lippo Bank dengan penyaluran kredit rata-rata 60,415 %. Sedangkan sesudah Pakfeb'91 diberlakukan, peringkat pertama diduduki oleh Bank Niaga dengan penyaluran kredit rata-rata 72,695 % dan peringkat terakhir diduduki oleh Panin Bank dengan penyaluran kredit rata-rata 44,675 %.

Berbedanya prosentase penyaluran kredit antara sesudah dan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, menunjukkan bahwa pihak bank berusaha untuk memenuhi permintaan masyarakat terutama nasabah untuk diberikan kredit guna kepentingan usaha atau yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin membantunya pihak bank sebagai salah satu sumber dana bagi pihak masyarakat untuk membantu memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Besar kecilnya penyaluran dana yang berbentuk penyaluran kredit dalam suatu bank, tergantung dari perbandingan komponen yang membentuk penyaluran kredit itu sendiri. Dalam hal ini penyaluran kredit ditentukan persen-

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

tasenya atas total aktiva. Sehingga, besar kecilnya penyaluran kredit ditentukan oleh :

- a) Apabila penyaluran kredit bertambah sedangkan total aktiva tetap, maka nilai penyaluran kredit dalam persentase akan bertambah besar.
- b) Apabila penyaluran kredit tetap sedangkan total aktiva bertambah, maka nilai penyaluran kredit dalam persentase akan bertambah kecil.
- c) Apabila penyaluran kredit dan total aktiva bertambah, tetapi pertambahan total aktiva tidak sebesar pertambahan penyaluran kredit, maka nilai penyaluran kredit dalam persentase akan bertambah kecil.
- d) Apabila penyaluran kredit dan total aktiva berkurang, tetapi pengurangan total aktiva tidak sebesar pengurangan penyaluran kredit, maka nilai penyaluran kredit dalam persentase akan bertambah besar.

Penyaluran kredit dilakukan oleh bank setelah tingkat likuiditas yang bisa dipenuhi cukup memadai. Penanaman dana dalam bentuk kredit ini pada umumnya kurang likuid dan lebih tinggi risikonya bila dibandingkan dengan penanaman dana dalam bentuk cadangan sekunder, tetapi apabila dilihat dari segi keuntungannya adalah lebih menguntungkan dibandingkan dengan cadangan sekunder.

Pelaksanaan penyaluran kredit oleh bank kepada masyarakat (terutama kepada pengusaha kecil dan menengah) diatur oleh BI untuk lebih lancarnya pengembalian kredit

ini, karena pada tahun-tahun terakhir banyak terjadi kasus kredit macet yang mengakibatkan gulung tikarnya suatu bank.

Ada dua alasan pokok yang mendorong penyempurnaan cara penyaluran kredit perbankan kepada usaha kecil dan menengah, yaitu : *Pertama*, bagian terbesar dari struktur dunia usaha di Indonesia adalah usaha kecil dan menengah yang menyerap bagian terbesar dari angkatan kerja nasional. Disamping itu usaha kecil dan menengah tidak terpusat di kota besar saja. *Kedua*, sebagian besar dana masyarakat yang dihimpun perbankan berasal dari para penabung kecil dan menengah. (Ginancar Kartasasmita, 1995 : 20/VI)

Pokok-pokok penyempurnaan penyaluran kredit perbankan adalah memperbesar kredit bank bagi pengusaha kecil dan menengah dan mendorong pengusaha besar agar lebih memanfaatkan pasar modal sebagai sumber utama pembiayaan.

Penyempurnaan ini dilakukan dengan *Pertama*, meningkatkan pangsa penyediaan dana bagi usaha kecil dan menengah, yang dilakukan dengan mewajibkan bank umum, baik milik negara maupun swasta menyalurkan kreditnya dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK) minimal 20 %. *Kedua* memperluas pelayanan perbankan, sehingga makin terjangkau oleh usaha kecil di daerah seperti hadirnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sejalan dengan penyempurnaan penyaluran kredit, perlu diperhatikan masalah penetapan kebijaksanaan perkreditan yang berpedoman pada 3 (tiga) azas pokok, yaitu :

- 1) Azas likuiditas.
- 2) Azas solvabilitas.
- 3) Azas rentabilitas. (Teguh Pudjo Mulyono, 1994:20)

Azas likuiditas, yaitu azas yang mengharuskan bank menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya dan atau dari masyarakat luas. Azas likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya.

Azas solvabilitas, yaitu azas yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi segala kewajibannya (baik jangka pendek maupun jangka panjang), karena usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit, maka kebijaksanaan perkreditan yang dijalankan harus memperhitungkan tingkat resiko kegagalan yang sekecil mungkin.

Azas rentabilitas, yaitu azas yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan atau laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk perkembangan usahanya.

#### 6.2.2.4 Investasi Jangka Panjang

Berdasarkan Tabel 5.16 pada bab terdahulu, diperlihatkan bahwa besarnya prosentase investasi jangka panjang terhadap total aktiva menunjukkan hasil yang bervariasi, dan mendekati angka yang stabil mulai tahun 1992, dengan rata-rata 86 %. Penurunan prosentase ini tampak menyolok di

Bank Surya, dimana pada tahun 1990 menunjukkan angka 25,60 % dan pada akhir 1994 hanya menjadi 1,50 %.

Hasil perhitungan investasi jangka panjang ini apabila dihitung juga rata-ratanya, diperlihatkan pada lampiran 1. Rata-rata investasi jangka panjang yang diperoleh bank-bank yang go public sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 2,81 %, sedangkan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 0,87 %. Selain itu juga tampak urutan peringkat menurut besarnya investasi jangka panjang. Sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, peringkat pertama diduduki oleh Bank Surya dengan investasi jangka panjang rata-rata 19,345 % dan peringkat terakhir diduduki oleh BUN dengan investasi jangka panjang rata-rata 0,165 %. Sedangkan sesudah Pakfeb'91 diberlakukan, peringkat pertama diduduki oleh Bank Niaga dengan investasi jangka panjang rata-rata 2,065 % dan peringkat terakhir diduduki oleh BUN dengan investasi jangka panjang rata-rata yang lebih kecil, yaitu 0,14 %.

Tidak berbedanya investasi jangka panjang sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, selain dipengaruhi oleh adanya gejolak yang terjadi antara tahun 1990 sampai dengan 1994 (Inflasi yang tinggi, kebijaksanaan uang ketat dan memburuknya perekonomian), juga karena pendapatan yang diterima jangka waktunya lebih panjang (lebih dari satu tahun). Hal ini juga tidak terlepas dari semakin senangnya bank memberikan kredit kepada masyarakat walaupun beresiko tinggi.

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana dalam surat-surat berharga yang berjangka lebih dari satu tahun dengan maksud untuk memperoleh pendapatan. Investasi ini berbentuk obligasi yang diterbitkan oleh bank-bank lain.

Tujuan utama kebijaksanaan investasi bank adalah mendapatkan pendapatan yang maksimum dengan resiko yang minimum. Memaksimumkan pendapatan haruslah dihitung dengan jangka panjang, dalam arti tidak hanya melakukan pembelian efek sekarang saja. Resiko yang terjadi harus ditanggung, karena untuk menghilangkan sama sekali resiko tersebut adalah tidak mungkin. Pendapatan yang diterima dan resiko yang harus ditanggung pihak bank sehubungan dengan adanya investasi, dipengaruhi oleh :

- a. Kualitas investasi tersebut.
- b. Tingkat bunga umum yang berlaku saat pembelian efek dilakukan.
- c. Masa berlakunya (umur) dari efek yang dibeli.
- d. Pajak yang dikenakan atas efek.
- e. Rasio penghasilan aktiva investasi dengan jumlah dana modal yang dibutuhkan untuk menunjang resiko intrinsik (profitabilitas versus laba).

Besar kecilnya penyaluran dana yang berbentuk investasi jangka panjang dalam suatu bank, tergantung dari perbandingan komponen yang membentuk investasi jangka panjang itu sendiri. Dalam hal ini investasi jangka panjang ditentukan persentasenya atas total aktiva. Sehingga, besar kecilnya investasi jangka panjang ditentukan oleh :

- a) Apabila investasi jangka panjang bertambah sedangkan total aktiva tetap, maka nilai investasi jangka panjang dalam persentase akan bertambah besar.
- b) Apabila investasi jangka panjang tetap sedangkan total aktiva bertambah, maka nilai investasi jangka panjang dalam persentase akan bertambah kecil.
- c) Apabila investasi jangka panjang dan total aktiva bertambah, tetapi pertambahan total aktiva tidak sebesar pertambahan investasi jangka panjang, maka nilai investasi jangka panjang dalam persentase akan bertambah kecil.
- d) Apabila investasi jangka panjang dan total aktiva berkurang, tetapi pengurangan total aktiva tidak sebesar pengurangan investasi jangka panjang, maka nilai investasi jangka panjang dalam persentase akan bertambah besar.

#### 6.2.2.5 Investasi dalam Aktiva Tetap dan Inventaris

Berdasarkan Tabel 5.17 pada bab terdahulu, diperlihatkan bahwa besarnya prosentase investasi dalam aktiva tetap dan inventaris terhadap total aktiva menunjukkan hasil yang bervariasi. Kalau dilihat secara rata-rata, bahwa semua bank menginvestasikan dananya dalam aktiva tetap dan inventaris besarnya tidak lebih dari 11 %.

Hasil perhitungan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris ini apabila dihitung juga rata-ratanya, diperlihatkan pada lampiran 1. Rata-rata investasi dalam



aktiva tetap dan inventaris yang diperoleh bank-bank yang go public sebelum diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 4,73 %, sedangkan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 besarnya adalah 5,71 %. Selain itu juga tampak urutan peringkat menurut besarnya investasi dalam aktiva tetap dan inventaris. Sebelum diberlakukannya Pakfeb'91, peringkat pertama diduduki oleh Bank Danamon dengan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris rata-rata 7,55 % dan peringkat terakhir diduduki oleh Bank Surya dengan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris rata-rata 0,90 %. Sedangkan sesudah Pakfeb'91 diberlakukan, peringkat pertama diduduki oleh Bank Bali dengan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris rata-rata 9,935 % dan peringkat terakhir diduduki oleh Bank Surya dengan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris rata-rata yang lebih besar, yaitu 1,85 %.

Berbedanya prosentase investasi dalam aktiva tetap dan inventaris sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91, disebabkan berbedanya ukuran bank, dalam arti besar aset dan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki, akan semakin besar pula investasi dalam aktiva tetap dan inventaris ini, mengingat semakin berusahanya pihak bank dalam memenuhi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Besar kecilnya penyaluran dana yang berbentuk investasi dalam aktiva tetap dan inventaris dalam suatu bank, tergantung dari perbandingan komponen yang membentuk investasi dalam aktiva tetap dan inventaris itu sendiri.

Dalam hal ini investasi dalam aktiva tetap dan inventaris ditentukan persentasenya atas total aktiva. Sehingga, besar kecilnya investasi dalam aktiva tetap dan inventaris ditentukan oleh :

- a) Apabila investasi dalam aktiva tetap dan inventaris bertambah sedangkan total aktiva tetap, maka nilai investasi dalam aktiva tetap dan inventaris dalam persentase akan bertambah besar.
- b) Apabila investasi dalam aktiva tetap dan inventaris tetap sedangkan total aktiva bertambah, maka nilai investasi dalam aktiva tetap dan inventaris dalam persentase akan bertambah kecil.
- c) Apabila investasi dalam aktiva tetap serta inventaris dan total aktiva bertambah, tetapi pertambahan total aktiva tidak sebesar pertambahan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris, maka nilai investasi dalam aktiva tetap dan inventaris dalam persentase akan bertambah kecil.
- d) Apabila investasi dalam aktiva tetap dan inventaris dan total aktiva berkurang, tetapi pengurangan total aktiva tidak sebesar pengurangan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris, maka nilai investasi dalam aktiva tetap dan inventaris dalam persentase akan bertambah besar.

Investasi dalam aktiva tetap dan inventaris ini sangat perlu dilakukan oleh pihak bank, karena apabila pihak bank tidak memiliki gedung untuk menjalankan aktivi-

tasnya, kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak akan timbul dan kredibilitas bank tersebut akan terganggu.

Besarnya dana yang diinvestasikan pihak bank untuk keperluan ini tidaklah sedikit, sehingga perlu dilakukan perhitungan secara cermat dan matang, agar dana perusahaan tidak hanya terserap untuk investasi dalam aktiva tetap dan inventaris saja. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini banyak fasilitas-fasilitas yang berupa kemudahan yang dapat dinikmati masyarakat sebagai nasabah suatu bank baik untuk menginvestasikan maupun menarik dana dari suatu bank, yang tidak hanya membutuhkan dana sedikit. Adanya sistem on-line antar kantor pusat dan kantor cabang di seluruh Indonesia merupakan salah satu bentuk investasi ini, disamping juga pelayanan ATM (Automatic Teller Machine) yang semakin banyak dimiliki oleh pihak bank. Fasilitas ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang apabila tidak dipenuhi oleh pihak bank, maka suatu bank akan kalah bersaing dengan bank lain dalam hal pengadaan fasilitas untuk kemudahan masyarakat penggunaannya.

## BAB 7

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengolahan data terhadap perubahan CAR dan komposisi penyaluran dana sebelum dan sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 serta menganalisisnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hipotesis kesatu yang diajukan dalam penelitian adalah *tidak terbukti benar*, bahwa nilai persentase CAR pada bank-bank yang telah go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 adalah sama dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91. Hal ini dibuktikan dengan  $t_0 (1,7540) < t_t (2,23)$  dan probabilitas kesalahan besarnya lebih dari 5 % (5,5 %).
- b. Hipotesis kedua (yang kesatu) yang diajukan dalam penelitian adalah *terbukti benar*, bahwa nilai persentase cadangan primer pada bank-bank yang telah go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 adalah berbeda dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91. Hal ini dibuktikan dengan  $t_0 (2,7182) > t_t (2,23)$  dan probabilitas kesalahan besarnya kurang dari 5 % (1,08 %).
- c. Hipotesis kedua (yang kedua) yang diajukan dalam penelitian adalah *terbukti benar*, bahwa nilai persentase cadangan sekunder pada bank-bank yang telah

go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 adalah berbeda dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91. Hal ini dibuktikan dengan  $t_0 (-4,8906) < t_t (-2,23)$  dan probabilitas kesalahan besarnya kurang dari 5 % (0,00 %).

- d. Hipotesis kedua (yang ketiga) yang diajukan dalam penelitian adalah *terbukti benar*, bahwa nilai persentase penyaluran kredit pada bank-bank yang telah go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 adalah berbeda dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91. Hal ini dibuktikan dengan  $t_0 (3,5489) < t_t (-2,23)$  dan probabilitas kesalahan besarnya kurang dari 5 % (0,00 %).
- e. Hipotesis kedua (yang keempat) yang diajukan dalam penelitian adalah *tidak terbukti benar*, bahwa nilai persentase investasi jangka panjang pada bank-bank yang telah go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 adalah sama dengan sebelum diberlakukannya Pakfeb'91. Hal ini dibuktikan dengan  $t_0 (1,1404) < t_t (2,23)$  dan probabilitas kesalahan besarnya lebih dari 5% (14,04 %).
- f. Hipotesis kedua (yang kelima) yang diajukan dalam penelitian adalah *terbukti benar*, bahwa nilai persentase investasi dalam aktiva tetap dan inventaris pada bank-bank yang telah go public antara tahun 1989 sampai dengan 1990 sesudah diberlakukannya Pakfeb'91 adalah berbeda dengan sebelum diberlakukannya

Pakfeb'91. Hal ini dibuktikan dengan  $t_0 (-2,8419) < t_t (-2,23)$  dan probabilitas kesalahan besarnya kurang dari 5 % (0,00 %).

- g. Penurunan pada rata-rata CAR disebabkan semakin besarnya aset yang dimiliki setiap bank yang diikuti dengan kenaikan ekuitas yang lebih besar. Selain itu terdapatnya beberapa bank yang telah mampu memenuhi standar CAR sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pihak BI, sedangkan beberapa bank yang lain belum mampu untuk memenuhinya.
- h. Cadangan primer mengalami kenaikan disebabkan semakin baiknya likuiditas yang dimiliki pihak bank, yang tercermin juga dari perolehan nilai CAR dalam persentase.
- i. Cadangan sekunder selain digunakan untuk menjaga likuiditas, juga untuk menjaga rentabilitas bank. Berbedanya persentase cadangan sekunder atas total aktiva menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan rentabilitas adalah berbeda-beda tergantung dari besarnya nilai cadangan sekunder yang ditetapkan pihak bank itu sendiri.
- j. Semakin besarnya penyaluran kredit menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan tambahan modal guna memperlancar usahanya dan pihak bank berusaha untuk memenuhinya.

- k. Investasi jangka panjang merupakan bentuk penanaman dana dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan resiko yang kecil, dimana pihak bank baru melaksanakannya apabila terdapat kelebihan dana setelah cadangan primer, cadangan sekunder dan penyaluran kredit terpenuhi. Sedangkan investasi dalam aktiva tetap dan inventaris diadakan oleh pihak bank guna memperlancar aktivitasnya dalam melayani masyarakat.

## 7.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang ada, dibawah ini diberikan beberapa saran untuk sempurnanya operasi perbankan dimasa mendatang. Adapun saran yang penulis ajukan, adalah :

- a. Rata-rata CAR hendaknya mampu lebih ditingkatkan oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut kemampuan bank dalam mengelola modal dan likuiditas yang dimiliki pada masa-masa mendatang.  
Pengelolaan likuiditas ditampakkan pada besarnya alat-alat likuid yang dimiliki yang tercermin pada cadangan primer.
- b. Cadangan sekunder ditetapkan oleh BI dengan besar tertentu, yang diharapkan mampu diraih pihak bank agar likuiditas dan rentabilitas terjaga, sehingga bank dapat terhindar dari likuidasi.

- c. Dengan semakin besarnya persentase penyaluran kredit yang dilakukan, pihak bank harus tetap melakukan seleksi atas nasabah yang akan menikmati kredit tersebut, agar kasus kredit macet yang akhir-akhir ini mewarnai perekonomian dapat dieliminir.
- d. Dengan adanya deregulasi, para pengelola bank berpacu untuk menaikkan kegiatan usaha mereka yang seringkali melampaui batas-batas kewajaran dan etika yang selama ini masih dipegang teguh. Oleh karena itu, etika bisnis perlu lebih diperhatikan para pengelola bank dengan menyadari keberadaannya.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Supriyatna, 1991, "Bank Wajib Penuhi Modal", Warta Ekonomi, No. 06 Tahun III/08 Juli, PT. Obor Sarana Utama, Jakarta.
- Anah Afifi, 1995, "Deregulasi Setengah Hati", Emiten, No. 28/V/Juni, Jakarta.
- Apep Suhendar, 1995, "Ujian Beral Bagi Perbankan Nasional", Info Finansial, No. 31/VI/24 Mei, LKBN Antara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, "Kondisi Kesehatan Perbankan Nasional", Info Finansial, No. 31/VI/24 Mei, LKBN Antara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, "Target CAR 7% Tidak Ada Gejala", Info Finansial, No. 23/IV/31 Maret, LKBN Antara, Jakarta.
- Bank Indonesia, 1988, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Paket Kebijakan Keuangan, Moneter dan Perbankan 27 Oktober 1988, Bank Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1989, Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 Oktober 1988, Tanggal 25 Maret 1989, Bank Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 Oktober 1988 Tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan 29 Januari 1990, Bank Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991 Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 Oktober 1988 Tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank Tanggal 28 Februari 1991, Bank Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, Himpunan Ketentuan Perbankan Yang Disempurnakan Tanggal 29 Mei 1993, Bank Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahlan M. Satalaksana, 1991, Situasi Moneter dan Perkembangannya Setelah Lahir Paket 28 Pebruari 1991, Seminar sehari tentang "Situasi Moneter Indonesia, Problem Pembiayaan dan Investasi Tahun 1991-1992", tidak diterbitkan.
- Dahlan Siamat, 1993, Manajemen Bank Umum, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta.

- Fraser, Donald R. and Lyn M. Fraser, 1990, Evaluating Commercial Bank Performance A Guide to Financial Analysis, Banker's Publishing Company, Rolling Meadows, Illinois, USA.
- Ganet, 1995, "Perbankan Nasional Lebih Keras Lagi Benahi Permodalan", Info Finansial, No. 31/VI/24 Mei, LKBN Antara, Jakarta.
- Ginanjari Kartasasmita, 1995, Infobank, No. 20/V, Jakarta.
- Hasyim, 1993, "Merger Salah Satu Alternatif Perbaiki CAR", Info Finansial, No. 23/IV/31 Maret, LKBN Antara, Jakarta.
- , 1993, "Tekanan Pemenuhan CAR Hambat Pertumbuhan Ekonomi", Info Finansial, No. 23/IV/31 Maret, LKBN Antara, Jakarta.
- , 1993, "Pemenuhan CAR Kendala Untuk Ekspansi Kredit", Info Finansial, No. 23/IV/31 Maret, LKBN Antara, Jakarta.
- Hempel, George H., 1976, Bank Capital, Determining and Meeting Your Bank's Capital Needs, Bankers Publishing Company, Boston.
- Jonker Sihombing, 1990, Pengantar Funds Management Untuk Perbankan, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.
- J. Supranto, 1988, Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kamerschen, David R., 1988, Money and Banking, 9th Edition, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
- Leden Marpaung, 1993, Kejahatan Terhadap Perbankan, Erlangga, Jakarta.
- Lydia Ari Widayarni, 1994, Analisis Portfolio Penyaluran Dana Bank-Bank yang Go Public di Bursa Efek Surabaya Tahun 1990 - 1993, Karya Tulis Utama, Program Magister Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya.
- Marzuki Darusman, 1989, Untalan Karangan Keuangan dan Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama, Infobank, Jakarta.
- Meyer, Paul A., 1982, Monetary Economics and Financial Markets, Richard D. Irwin Inc., USA.
- Moh. Nazir, 1988, Metode Penelitian, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Muchdarsyah Sinungan, 1993, Manajemen Dana Bank, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Priambodo, 1993, "Ketentuan CAR Perlu atau Tidak", Info Finansial, No. 23/IV/31 Maret, LKBN Antara, Jakarta.
- Rijanto, 1992, "Strategi Bank Memenuhi CAR, Masalah Suku Bunga, Dan Pelaksanaan Undang-Undang Perbankan 1992", Manajemen dan Usahawan Indonesia, No. 6 Tahun XXI Juni, Lembaga Management FE-UI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, "Masalah Pemenuhan CAR", Info Finansial, No. 23/IV/31 Maret, LKBN Antara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, "Setelah Bank Diberi Kebebasan", Infobank, Edisi Khusus Agustus, Infoarta Pratama, Jakarta.
- Romario, 1993, "CAR Bank Pemerintah Tidak Ada Masalah", Info Finansial, No. 23/IV/31 Maret, LKBN Antara, Jakarta.
- Ronnie H. Rusli, 1993, "Manajemen Aset dan Resiko Sumber Dana Perbankan", Manajemen dan Usahawan Indonesia, No. 4 Tahun XXII April, Lembaga Management FE-UI, Jakarta.
- Ruddy Tri Santoso, 1994, Mengenal Dunia Perbankan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ryback, William, 1988, Capital Adequacy, Seacem Lectures 1988, Bank Indonesia, Jakarta.
- Sinkev, Joseph F. Jr., 1982, Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry, Second Edition, Macmillan Publishing Company, New York or Collier Macmillan Publishers, London.
- Soediyono Reksoprayitno, 1992, Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Socharsono Sagir, 1993, "Paket Deregulasi 29 Mei 1993 Prospek Bisnis Menjelang Pelita VI", Manajemen dan Usahawan Indonesia, No.9 Tahun XXII September, Lembaga Management FE-UI, Jakarta.
- Sonar Sihombing, 1992, "LDR Di bawah 100% Belum Tentu Baik", Warta Ekonomi, No. 3/Th. IV/15 Juni, PT. Obor Sarana Utama, Jakarta.
- Suhardjono, 1992, "Semua Karena CAR", Infobank, Edisi Agustus No. 152, Infoarta Pratama, Jakarta.

- Sujatmaka et.al, 1995, "Basil Perlombaan Ketika Cuaca Cerah", Swa Sembada, No. 2/XI/Mei, Yayasan Sembada Swakarya, Jakarta.
- , 1996, "Peringkat Bank Ketika Perebutan Dana Makin Ketat", Swa Sembada, No. 10/XII/11-31 Juli, Yayasan Sembada Swakarya, Jakarta.
- Taufik Andriawan, 1994, "Analisis Tingkat Likuiditas dan Profitabilitas Bank Umum Indonesia Pra dan Pasca Paket Februari 1991", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Teguh Pudjo Mulyono, 1994, "Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial", Edisi Ketiga, BPF, Yogyakarta.
- Thomas Suyatno et.al, 1993, "Kelembagaan Perbankan", Edisi Kedua, PT Gramedia, Jakarta.
- Walker, John R., 1992, "Reporting System for Bank Management", First Edition, Banker Publishing Company Toppan Co., Ltd., Tokyo.
- Widjanarto, 1994, "Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia", Edisi Kedua, Cetakan Pertama, PT Temprint, Jakarta.

## Lampiran 1

**TABEL PERINGKAT RATA-RATA CAR, CADANGAN PRIMER, CADANGAN SEKUNDER, PENYALURAN KREDIT, INVESTASI JK PANJANG DAN INVESTASI DALAM AKTIVA TETAP & INVENTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

**TABEL PERINGKAT RATA-RATA CAR SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

Nama Bank	Sebelum Pakfeb'91			Peringkat	Sesudah Pakfeb'91			Peringkat
	1990	1991	Rata'		1992	1993	Rata'	
Surya	13.84	10.74	12.29	1	9.36	9.10	9.23	3
Panin	7.26	15.67	11.645	2	13.14	10.06	11.06	1
Tamara	11.84	9.09	10.645	3	8.57	5.33	6.95	8
BI	10.19	9.43	9.81	4	8.83	7.22	8.025	6
BDNI	11.09	8.49	9.79	5	6.82	12.11	9.465	2
Bali	8.38	8.84	8.57	6	8.94	7.86	8.40	5
Danamon	8.98	7.92	8.45	7	7.27	6.69	6.98	7
Duta	7.36	8.12	7.74	8	8.91	8.62	8.765	4
BN	7.06	7.00	7.03	9	7.39	5.90	6.645	9
Lippo	6.12	5.86	5.99	10	5.33	7.82	6.575	10
Niaga	4.87	5.12	4.995	11	5.65	5.31	5.48	11
Rata-rata	8.84	8.75	8.80		8.20	7.82	8.01	

Sumber : data diolah

**TABEL PERINGKAT RATA-RATA CADANGAN PRIMER SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

Nama Bank	Sebelum Pakfeb'91			Peringkat	Sesudah Pakfeb'91			Peringkat
	1990	1991	Rata'		1992	1993	Rata'	
BN	13.34	16.59	14.965	1	13.74	2.71	8.225	1
Duta	16.08	8.03	12.055	2	1.78	2.01	1.895	11
Surya	6.17	10.91	8.545	3	4.88	3.49	4.185	3
BI	10.67	2.56	6.615	4	2.43	2.23	2.33	8
Tamara	4.38	3.79	4.085	5	2.47	1.63	2.05	9
Lippo	4.09	3.86	3.975	6	2.51	2.49	2.50	6
Panin	4.57	2.96	3.765	7	2.24	2.02	2.13	10
BDNI	2.35	4.18	3.265	8	5.45	3.06	4.255	2
Niaga	2.87	2.95	2.91	9	2.54	2.62	2.58	4
Danamon	2.27	3.00	2.635	10	2.91	2.23	2.57	5
Bali	2.77	2.43	2.60	11	2.59	2.24	2.415	7
Rata-rata	6.32	5.57	5.95		3.96	2.43	3.19	

Sumber : data diolah

**TABEL. PERINGKAT RATA-RATA CADANGAN SEKUNDER  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

Nama Bank	Sebelum Pakfeb'91			Peringkat	Sesudah Pakfeb'91			Peringkat
	1990	1991	Rata <sup>2</sup>		1992	1993	Rata <sup>2</sup>	
Lippo	26.79	29.91	28.35	1	35.50	22.14	28.86	3
Bali	25.97	23.59	24.78	2	28.03	18.52	23.275	6
Panin	19.31	27.85	23.58	3	49.86	43.86	46.86	1
Duta	14.54	21.12	17.83	4	32.97	36.84	34.905	2
Danamon	21.73	7.91	14.82	5	17.67	20.96	19.315	9
Niaga	8.96	11.33	10.145	6	17.95	19.54	18.745	10
Surya	4.11	12.49	8.30	7	27.06	29.14	28.10	4
Tamara	5.88	10.24	8.06	8	19.43	28.32	23.875	5
BDNI	8.68	5.94	7.31	9	18.84	22.38	20.61	8
BFI	5.24	8.11	6.675	10	17.50	28.60	23.05	7
BUN	4.98	6.98	5.98	11	8.18	26.06	17.12	11
Rata-rata	13.29	15.04	14.17		24.82	26.94	25.88	

Sumber : data diolah

**TABEL PERINGKAT RATA-RATA PENYALURAN KREDIT  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

Nama Bank	Sebelum Pakfeb'91			Peringkat	Sesudah Pakfeb'91			Peringkat
	1990	1991	Rata <sup>2</sup>		1992	1993	Rata <sup>2</sup>	
BDNI	85.40	85.49	85.445	1	72.23	67.97	70.10	3
Niaga	82.76	80.18	81.47	2	73.32	72.07	72.695	1
Tamara	83.79	78.38	81.085	3	68.57	64.09	66.335	6
BFI	77.22	82.34	79.78	4	74.29	64.53	69.41	4
BUN	78.27	72.31	75.29	5	73.05	64.79	68.92	5
Danamon	69.33	80.21	74.77	6	71.36	69.43	70.395	2
Panin	71.30	62.50	66.90	7	41.20	48.15	44.675	11
Hali	65.30	65.20	65.25	8	58.65	67.72	63.185	8
Surya	63.22	62.61	62.915	9	65.35	64.94	65.145	7
Duta	62.13	62.77	62.45	10	57.78	52.03	54.905	10
Lippo	61.81	59.02	60.415	11	55.22	68.98	62.10	9
Rata-rata	72.78	71.91	72.34		64.64	64.06	64.35	

Sumber : data diolah

**TABEL. PERINGKAT RATA-RATA INVESTASI JK. PANJANG  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

Nama Bank	Sebelum Pakfeb'91			Peringkat	Sesudah Pakfeb'91			Peringkat
	1990	1991	Rata <sup>3</sup>		1992	1993	Rata <sup>3</sup>	
Surya	25.60	13.09	19.345	1	0.71	0.74	0.725	6
BII	5.23	2.86	4.045	2	0.89	0.28	0.585	9
Niaga	2.46	2.46	2.46	3	1.94	2.19	2.065	1
Panin	1.29	0.96	1.125	4	1.10	0.84	0.97	4
Duta	0.91	1.11	1.01	5	0.83	0.90	0.905	5
Bali	0.65	1.15	0.90	6	1.33	1.06	1.195	3
Lippo	0.94	0.84	0.87	7	0.68	0.60	0.64	7
BDNI	0.35	0.63	0.49	8	0.49	0.70	0.595	8
Tamara	0.81	0.54	0.275	9	1.64	0.92	1.28	2
Danamon	0.25	0.21	0.23	10	0.16	0.77	0.465	10
BUN	0.16	0.17	0.165	11	0.16	0.12	0.14	11
Rata-rata	3.44	2.18	2.81		0.90	0.84	0.875	

Sumber : data diolah

**TABEL PERINGKAT RATA-RATA INVESTASI DALAM AT & INVENTARIS  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

Nama Bank	Sebelum Pakfeb'91			Peringkat	Sesudah Pakfeb'91			Peringkat
	1990	1991	Rata <sup>3</sup>		1992	1993	Rata <sup>3</sup>	
Danamon	6.42	8.68	7.55	1	7.91	6.62	7.265	2
Lippo	6.42	7.13	6.775	2	6.01	5.80	5.905	5
Duta	6.34	6.97	6.655	3	6.65	8.15	7.40	3
Bali	5.32	7.63	6.475	4	9.40	10.47	9.935	1
Tamara	4.95	7.05	6.00	5	7.89	5.06	6.475	4
Panin	3.52	5.74	4.63	6	5.61	5.14	5.375	7
BUN	3.26	3.96	3.61	7	4.87	6.32	5.595	6
BDNI	3.22	3.77	3.495	8	3.00	5.90	4.45	9
Niaga	2.96	3.08	3.02	9	4.26	3.58	3.92	10
BII	1.63	4.14	2.885	10	4.89	4.37	4.63	8
Surya	0.90	0.90	0.90	11	2.00	1.70	1.85	11
Rata-rata	4.09	5.37	4.73		5.68	5.74	5.71	

Sumber : data diolah

## Lampiran 2

**TABEL RATA-RATA CAR, CADANGAN PRIMER,  
CADANGAN SEKUNDER, PENYALURAN KREDIT, INVESTASI JK PANJANG  
DAN INVESTASI DALAM AKTIVA TETAP & INVENTARIS  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

**TABEL RATA-RATA CAR  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

Nama Bank	$x_1$	$x_2$	$d_j$	$(d_j - d)^2$
Surya	12.29	9.23	-0.585	1.8831
Panin	11.645	11.06	3.060	5.1652
Tamara	10.645	6.95	1.785	0.9954
BII	9.81	8.025	-0.485	1.8186
BDNI	9.79	9.465	1.470	0.4661
Bali	8.57	8.40	0.385	0.1618
Danamon	8.45	6.98	0.170	0.3810
Duta	7.74	8.765	3.515	7.4404
BUN	7.03	6.645	0.325	0.2136
Lippo	5.99	6.575	-1.025	3.2843
Viaga	4.995	5.48	0.845	0.5509
Jumlah	96.775	88.115	0.660	22.1610

Sumber : data diolah

$$\bar{x}_1 = \frac{96.775}{11} = 8.80$$

$$\bar{x}_2 = \frac{88.115}{11} = 8.01$$

$$\bar{d} = 0.7872$$

**TABEL RATA-RATA CADANGAN PRIMER  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

Nama Bank	$x_1$	$x_2$	$d_j$	$(d_j - d)^2$
BUN	14.965	8.225	1.475	1.6314
Duta	12.055	1.895	4.355	2.5687
Surya	8.545	4.185	4.285	2.3492
BII	6.615	2.33	0.330	5.8674
Tamara	4.085	2.05	0.065	7.2214
Lippo	3.975	2.50	6.740	15.9010
Panin	3.765	2.13	0.185	6.5908
BDNI	3.265	4.255	2.035	0.5144
Viaga	2.91	2.58	-0.990	14.0040
Danamon	2.635	2.57	10.160	54.8740
Bali	2.60	2.415	1.635	1.2482
Jumlah	65.41	35.135	30.275	112.7700

Sumber : data diolah

$$\bar{x}_1 = \frac{65.410}{11} = 5.95$$

$$\bar{x}_2 = \frac{35.135}{11} = 3.19$$

$$\bar{d} = 2.7522$$



**TABEL RATA-RATA CADANGAN SEKUNDER  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB '91**

Nama Bank	$x_1$	$x_2$	$d_i$	$(d_i - d)^2$
Lippo	28.35	28.86	- 0.51	125.590
Hali	24.78	23.275	-19.80	65.337
Panin	23.58	46.86	-16.37	21.698
Duta	17.83	34.905	- 8.60	9.7145
Danamon	14.82	19.315	- 4.495	52.1544
Niaga	10.145	18.745	-11.14	0.3327
Surya	8.30	28.10	1.505	174.810
Tamara	8.06	23.875	-15.810	16.795
BDNI	7.31	20.61	-13.300	2.5064
BII	6.675	23.05	-17.070	28.710
BUN	5.98	17.12	-23.280	133.700
Jumlah	155.83	284.71	-128.800	631.360

Sumber : data diolah

$$\bar{x}_1 = \frac{155.83}{11} = 14.17$$

$$\bar{x}_2 = \frac{284.71}{11} = 25.88$$

$$d = -11.71$$

**TABEL RATA-RATA PENYALURAN KREDIT  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB '91**

Nama Bank	$x_1$	$x_2$	$d_i$	$(d_i - d)^2$
BDNI	85.445	70.10	- 1.685	93.640
Niaga	81.47	72.695	- 2.230	104.480
Tamara	81.085	66.335	10.370	5.6557
BII	79.78	69.41	8.775	0.6133
BUN	75.29	68.92	4.3755	13.0814
Danamon	74.77	70.395	6.370	2.6302
Panin	66.90	44.675	2.0655	35.127
Hali	65.25	63.185	14.755	45.740
Surya	62.915	65.145	15.345	54.069
Duta	62.45	54.905	7.545	0.1996
Lippo	60.415	62.10	22.225	202.580
Jumlah	795.77	707.86	87.910	557.820

Sumber : data diolah

$$\bar{x}_1 = \frac{795.77}{11} = 72.34$$

$$\bar{x}_2 = \frac{707.86}{11} = 64.35$$

$$d = 7.9918$$

**TABEL RATA-RATA INVESTASI JK. PANJANG  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB '91**

Nama Bank	$x_1$	$x_2$	$d_i$	$(d_i - d)^2$
Surya	19.345	0.725	0.23	2.9272
BII	4.045	0.585	18.62	278.190
Niaga	2.46	2.065	3.46	2.3076
Panin	1.125	0.97	0.395	2.3898
Duta	1.01	0.905	- 0.235	4.7345
Bali	0.90	1.195	0.025	3.6707
Lippo	0.87	0.64	- 0.295	4.9992
BDNI	0.49	0.595	- 1.005	8.6783
Tamara	0.275	1.28	- 0.105	4.1857
Danamon	0.23	0.465	0.105	3.3705
HUN	0.165	0.14	0.155	3.1894
Jumlah	30.915	9.565	21.350	318.640

Sumber : data diolah

$$\bar{x}_1 = \frac{30.915}{11} = 2.81$$

$$\bar{x}_2 = \frac{9.565}{11} = 0.87$$

$$\bar{d} = 1.9409$$

**TABEL RATA-RATA INVESTASI DALAM AT & INVENTARIS  
SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB '91**

Nama Bank	$x_1$	$x_2$	$d_i$	$(d_i - d)^2$
Danamon	7.55	7.265	0.87	3.4309
Lippo	6.775	5.905	- 0.95	0.9010
Duta	6.655	7.40	- 1.745	0.5817
Bali	6.475	9.935	- 0.90	0.0067
Tamara	6.00	6.475	0.285	1.6059
Panin	4.63	5.375	- 1.985	1.0054
HUN	3.61	5.595	- 3.460	6.1391
BDNI	3.495	4.45	- 0.475	0.2573
Niaga	3.02	3.92	- 0.955	0.0007
BII	2.885	4.63	- 0.745	0.0562
Surya	0.90	1.85	- 0.745	0.0562
Jumlah	51.995	62.80	-10.80	13.141

Sumber : data diolah

$$\bar{x}_1 = \frac{51.995}{11} = 4.73$$

$$\bar{x}_2 = \frac{62.80}{11} = 5.71$$

$$\bar{d} = -0.982$$

**Lampiran 3****DATA RATA-RATA CAR SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

HEADER DATA FOR: B:CAR LABEL: RATA2 CAR PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

	SEB (X1)	SES (X2)
1	5.9900	6.5750
2	12.2900	9.2300
3	9.8100	8.0250
4	4.9950	5.4800
5	8.4500	6.9800
6	7.0300	6.6450
7	8.5700	8.4000
8	10.4650	6.9500
9	9.7900	9.4650
10	7.7400	8.7650
11	11.6450	11.6000

----- HYPOTHESIS TESTS FOR MEANS -----

HEADER DATA FOR: B:CAR LABEL: RATA2 CAR PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

**DIFFERENCE BETWEEN MEANS: PAIRED OBSERVATIONS****CAR**

HEADER DATA FOR: B:CAR LABEL: RATA2 CAR PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

HYPOTHESIZED DIFF. = .0000  
 MEAN = .7873  
 STD. DEV. = 1.4887  
 STD. ERROR = .4488  
 N = 11 (CASES = 1 TO 11)

T = 1.7540 (D.F. = 10) GROUP 1: SEB (X1)  
 GROUP 2: SES (X2)

PROB. = .0550

**Lampiran 4****DATA RATA-RATA CADANGAN PRIMER SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

HEADER DATA FOR: B:PRI LABEL: RATA2 PRI PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

	SEB (X1)	SES (X2)
1	3.9750	2.5000
2	8.5400	4.1850
3	6.6150	2.3300
4	2.9100	2.5800
5	2.6350	2.5700
6	14.9650	8.2250
7	2.6000	2.4150
8	4.0850	2.0500
9	3.2650	4.2550
10	12.0550	1.8950
11	3.7650	2.1300

----- HYPOTHESIS TESTS FOR MEANS -----

HEADER DATA FOR: B:PRI LABEL: RATA2 PRI PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

**DIFFERENCE BETWEEN MEANS: PAIRED OBSERVATIONS****CADANGAN PRIMER**

HEADER DATA FOR: B:PRI LABEL: RATA2 PRI PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

HYPOTHESIZED DIFF. = .0000  
 MEAN = 2.7523  
 STD. DEV. = 3.3582  
 STD. ERROR = 1.0125  
 N = 11 (CASES = 1 TO 11)

T = 2.7182 (D.F. = 10) GROUP 1: SEB (X1)  
 GROUP 2: SES (X2)

PROB. = .0108

**Lampiran 5****DATA RATA-RATA CADANGAN SEKUNDER SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

HEADER DATA FOR: B:SEK LABEL: RATA2 SEK PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

	SEB (X1)	SES (X2)
1	28.3500	28.8600
2	8.3000	28.1000
3	6.6750	23.0500
4	10.1450	18.7450
5	14.8200	19.3150
6	5.9800	17.1200
7	24.7800	23.2750
8	8.0600	23.8750
9	7.3100	20.6100
10	17.8300	34.9050
11	23.5800	46.8600

----- HYPOTHESIS TESTS FOR MEANS -----

HEADER DATA FOR: B:SEK LABEL: RATA2 SEK PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

**DIFFERENCE BETWEEN MEANS: PAIRED OBSERVATIONS****CADANGAN SEKUNDER**

HEADER DATA FOR: B:SEK LABEL: RATA2 SEK PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

HYPOTHESIZED DIFF. = .0000  
 MEAN = -11.7168  
 STD. DEV. = 7.9459  
 STD. ERROR = 2.3958  
 N = 11 (CASES = 1 TO 11)

T = -4.8906 (D.F. = 10) GROUP 1: SEB (X1)  
 GROUP 2: SES (X2)

PROB. = 3.159E-04

**lampiran 6****DATA RATA-RATA PENYALURAN KREDIT SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

HEADER DATA FOR: B:KRE LABEL: RATA2 KRE PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

	SEB (X1)	SES (X2)
1	60.4150	62.1000
2	62.9150	65.1450
3	79.7800	69.4100
4	81.4700	72.6950
5	74.7700	70.3950
6	75.2900	68.9200
7	65.2500	63.1850
8	81.0850	66.3300
9	85.4450	70.1000
10	62.4500	54.9050
11	66.9000	44.6750

----- HYPOTHESIS TESTS FOR MEANS -----

HEADER DATA FOR: B:KRE LABEL: RATA2 KRE PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

**DIFFERENCE BETWEEN MEANS: PAIRED OBSERVATIONS****PENYALURAN KREDIT**

HEADER DATA FOR: B:KRE LABEL: RATA2 KRE PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

HYPOTHESIZED DIFF. = .0000  
 MEAN = 7.9918  
 STD. DEV. = 7.4688  
 STD. ERROR = 2.2519  
 N = 11 (CASES = 1 TO 11)

T = 3.5489 (D.F. = 10) GROUP 1: SEB (X1)  
 GROUP 2: SES (X2)

PROB. = 2.639E-03

**Lampiran 7****DATA RATA-RATA INVESTASI JK. PANJANG SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

HEADER DATA FOR: B:JAP LABEL: RATA2 JAP PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

	SEB (X1)	SES (X2)
1	.8700	.6400
2	19.3450	.7250
3	4.0450	.5850
4	2.4600	2.0650
5	.2300	.4650
6	.1650	.1400
7	.9000	1.1950
8	.2750	1.2800
9	.4900	.5950
10	1.0100	.9050
11	1.1250	.9700

----- HYPOTHESIS TESTS FOR MEANS -----

HEADER DATA FOR: B:JAP LABEL: RATA2 JAP PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

**DIFFERENCE BETWEEN MEANS: PAIRED OBSERVATIONS****INVESTASI JANGKA PANJANG**

HEADER DATA FOR: B:JAP LABEL: RATA2 JAP PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

HYPOTHESIZED DIFF. = .0000  
 MEAN = 1.9409  
 STD. DEV. = 5.6449  
 STD. ERROR = 1.7020  
 N = 11 (CASES = 1 TO 11)

T = 1.1404 (D.F. = 10) GROUP 1: SEB (X1)  
 GROUP 2: SES (X2)

PROB. = .1404

**Lampiran 8****RATA-RATA INV. dlm AT & INVENTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PAKFEB'91**

HEADER DATA FOR: B:INV LABEL: RATA2 INV PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

	SEB (X1)	SES (X2)
1	6.7750	5.9050
2	.9000	1.8500
3	2.8850	4.6300
4	3.0200	3.9200
5	7.5500	7.2650
6	3.6100	5.5950
7	6.4750	9.9350
8	6.0000	6.4750
9	3.4950	4.4500
10	6.6550	7.4000
11	4.6300	5.3750

----- HYPOTHESIS TESTS FOR MEANS -----

HEADER DATA FOR: B:INV LABEL: RATA2 INV PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

**DIFFERENCE BETWEEN MEANS: PAIRED OBSERVATIONS****INVESTASI DALAM AT DAN INVENTARIS**

HEADER DATA FOR: B:INV LABEL: RATA2 INV PRA & PASCA PAKFEB  
 NUMBER OF CASES: 11 NUMBER OF VARIABLES: 2

HYPOTHESIZED DIFF. = .0000  
 MEAN = -.9823  
 STD. DEV. = 1.1464  
 STD. ERROR = .3456  
 N = 11 (CASES = 1 TO 11)

T = -2.8419 (D.F. = 10) GROUP 1: SEB (X1)  
 GROUP 2: SES (X2)

PROB. = 8.746E-03



**Lampiran 9**

No. 23/67/Kep/Dir

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI BANK INDONESIA  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK**

DIREKSI BANK INDONESIA,

Mengingat

- a. bahwa modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kemungkinan kerugian;
- b. bahwa perkembangan perbankan nasional secara bertahap telah mengikuti globalisasi perbankan, sehingga perlu menyesuaikan permodalannya dengan ketentuan yang berlaku secara internasional;
- c. bahwa oleh karena itu, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 No.34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2842).
- 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2865).

3. Keputusan .....

3. Keputusan Presiden No. 38 tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 No. 27).
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang lembaga keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan bank dalam Surat Keputusan ini adalah bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan bank perkreditan rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 tentang Bank

Perkreditan

DIREKSI  
KINDONESIA

Perkreditan Rakyat. Dalam pengertian bank termasuk lembaga keuangan yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.

#### Pasal 2

Bank wajib menyediakan modal sekurang-kurangnya sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

#### Pasal 3

- (1) Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap.
- (2) Modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak.
- (2) Modal pelengkap terdiri atas cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, dan dana pinjaman yang dapat dipersamakan dengan modal.

(3) Modal

- 3) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperhitungkan sebagai modal bank setinggi-tingginya sebesar 100% dari modal inti.

#### Pasal 5

- 1) Pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap.
- 2) Tahap pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum, pedoman perhitungan dan penjelasan lebih lanjut dari Surat Keputusan ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

#### Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

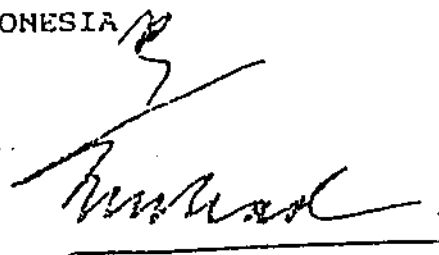
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 1991

DIREKSI  
BANK INDONESIA



ADRIANUS MOOY



BINHADI